

CHEMISTRY: SBY DALAM DIRI SUDI SILALAH

BERINDO

MAJALAH BERITA INDONESIA®

EDISI 87 TAHUN VII ★ MARET 2013

Rp.16.000,-

SBY:

“KPK Segera
Tuntaskan
Kasus Anas.”



ANAS:

“Nabok
Nyilih
Tangan.”

SBY vs ANAS

SANTUN ATAU SADIS?

Lembar Pertama Partai Demokrat dalam Pusaran Korupsi dan 'Politik Sengkuni'



DARMIN: INTEGRASI EKONOMI ASEAN 2015



TokohINDONESIA
THE EXCELLENT BIOGRAPHY



MOBILE VERSION
m.tokohindonesia.com

menu

**ENSIKLOPEDI
DIREKTORI
WIKI TOKOH
BERITA
C-JOURNALISM
KOMUNITAS**

ENSIKLOPEDI ONLINE

Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terlengkap dan terpadu perihal profil para tokoh di Indonesia yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional.

TOKOHINDONESIA.COM
THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY



Edisi.87/Th.VIII/
Maret 2013

Desain Sampul:
ESERO
Foto:
Hotisan



BERITA UTAMA

TATKALA CITRA DEMOKRAT RUNTUH 8-17 PANIK ATAU SKENARIO INTELIJEN POLITIK?

Dalam kiprah politik Susilo Bambang Yudhoyono, baik selaku Presiden Republik Indonesia maupun 'Presiden' Partai Demokrat, sangat terkesan bahwa pencitraan atau tebar pesona adalah suatu hal yang teramat penting dan utama.8

Politik Para Sengkuni12

Partai Demokrat, Santun atau Sadis?13

7 Sikap Majelis Tinggi PD16

SALAM REDAKSI 4

VISI BERITA
Lagak Pendiri Partai 5

VISI TOKOH
Indonesia Kiblat Toleransi 6

BERITA TERDEPAN
Dampak Ganda Bocornya Sprindik 7



BERITA WAWANCARA
● Chemistry, SBY dalam Diri Sudi Silalahi 18

BERITA POLITIK
● Partai Dihantam Tsunami Korupsi 23

BERITA HUKUM
● Ironi Penegakan Hukum 24

BERITA TOKOH
● Agus Martowardojo: Calon Tunggal Gub BI 26
● Obituari Tarmizi Taher: Pembentuk Dana Abadi Umat 27
● Feisal Tanjung: ABRI-Islam Mitra Sejati 27
● Suryadharna Ali: Doktor HC Epistemologi Kajian Islam 28

BERITA BUDAYA
● Identitas Budaya Masyarakat Aceh 40

BERITA HIBURAN
● Menumpas Kejahatan Tanpa Basa-basi 41

OPINI EKUIN
● Dr. Darmin Nasution:
Integrasi Ekonomi ASEAN 2015 44

BERITA EKUIN
● Demam Akuisisi Bisnis Bakrie Grup 46
● Hary Tanoë Incar VIVA 47

BERITA KHAS
● Regulasi Lemah, Rokok Merajalela 48
● Narkoba Semakin Merasuk 50

BERITA DAERAH
● Tim Sembilan Terbelit Tipikor 54
● Menjadi Milik Orang Berdasi 55
● Penyelewangan di Balik Empat Kapal 56
● Tersandung 'Karung Beras' 56

BERITA KOTA
● Ganjil Genap Pro Si Kaya 57



BERITA HUMANIORA
Menjawab Tantangan Zaman 42



BERITA IPTEK
Adu Kekuatan di Perang Cyber 52

BERITA LINGKUNGAN
● Bukan Sekadar Simbol 58

BERITA WISATA
● Catatan untuk Wisata Kuliner 59
● Pink Beach, Mutiara Wisata di Lombok 60
● Menuju Gunung Rinjani 61

BERITA PEREMPUAN
● Hj. Indah Suryadharna Ali
Keharmonisan Komunikasi Keluarga Politisi ... 62

BERITA KESEHATAN
● Hampa di Usia Senja 64
● Bila Otak Meradang 65

BERITA BUKU
● Kiat Jitu Mengajar Anak 66
● Strategi Memperjuangkan Ide 66

LENTERA | 30-39

Semestinya, Tidak Ada Kelaparan di Indonesia



Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tanahnya subur serta alam dan iklimnya selalu mendukung, namun masih sering dijumpai masyarakat yang kekurangan pangan bahkan tak sedikit yang mati kelaparan. Apa penyebabnya? 32

JATI EMAS DEMI GENERASI

Pohon jati (*tectona grandis*) merupakan primadona tanaman hutan yang dikembangkan di Al-Zaytun. 38



Koperasi Desa Kota: Kaya dan Gagah

Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, telah berdiri Koperasi Serba Usaha Desa Kota (Koperasi Desa Kota) yang berpusat di Mahad Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat 30

PEMIMPIN UMUM:

Syaykh Dr. AS Rasyidi Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch. Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:Agung Sidayu
Imam Prawoto
Sudirman Leonard Pohan
Samsuri**REDAKTUR EKSEKUTIF:**

Mangatur Lorieclide Paniroy

REDAKTUR:Marjuka Situmorang
Dian Gina Rahayu
Ade Wiharyana**SEKRETARIS REDAKSI**

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:Nawawi, Ikhwani Triatmo, Sarjiman, Doan Adikara
Pudan, Mulyanti Sahara**WARTAWAN FOTO:**Wilson Edward, Bantu Hotsan
& Fleasta Image**KARIKATUR:**

Doan AP

KONTRIBUTOR:Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Retno
Handayani, Chusnato, Tumpal Siburian, J.
Pasariibu, Hator Sianipar**BIRO REDAKSI:**Sumut: Edward Tahi Purba (Medan), Parasian
Manalu (Tapanuli), Batam: Ridwan Marbun,
Sumsel: Sri Windayani, Jawa Barat: Ade
Wiharyana, Prana Citra (Bandung), Marjuka
Situmorang (Bekasi), Bernard Sihite (Purwakarta)
Kalimantan Timur: Sudirman Leonard Pohan
(Tarakan), Leo Situmeang (Balikpapan)Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland),
Rukyal Basri (Philadelphia)**DESAIN GRAFIS:****ESERO** Design**PENERBIT:**PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan PT Asasira dan
Yayasan Pesantren Indonesia**IKLAN DAN PROMOSI:**

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:Jl. H.Naman Raya No.44, Pondok Kelapa, Jakarta
Timur 13450. Telp. (021) 8690 7690 - 3219 5353
Fax. (021) 8690 1951**E-MAIL:**redaksi@berindo.com
iklan@berindo.com**WEBSITE:**

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PENCETAK:PT GRAMEDIA
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)**HARGA:**

Rp.16.000,-



Menteri Sekretaris Negara Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi saat diwawancara wartawan TokohIndonesia.com dan Berita Indonesia, Ch. Robin Simanullang, di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Gedung Utama Sekretariat Negara

Pembaca! Memasuki bulan ketiga tahun 2013, Berita Indonesia menampilkannya isu-isu menarik di seputar dunia perpolitikan Indonesia. Bagaimana partai berkuasa digoncang oleh tsunami korupsi sehingga menggusur ketua umumnya dari tahta kekuasaan. Para pendiri partai pun berlagak seolah mereka pemilik partai.

Dengan judul 'Tatkala Citra Demokrat Runtuh' dalam rubrik Berita Utama, kami berusaha menyajikan ulasan peristiwa yang menimpa Partai Demokrat. Presiden SBY dan Anas Urbaningrum berada pengaruh di partai besutan SBY-Andi dan Choel Mallarangeng itu. Alih-alih memiliki amunisi yang kurang kuat, sang penguasa pun menggunakan pihak ketiga untuk melengserkan 'bayi yang tidak diinginkan' itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap ikut bermain dalam skenario penguasa negeri ini. KPK yang diharapkan independen, mandiri, dan profesional mengalami kebocoran sprindik entah sengaja atau tidak disengaja. Integritas para petinggi KPK pun dipertanyakan.

Dalam rubrik Lentera, kami menyampaikan laporan tentang berdirinya Koperasi Desa Kota tepat pada 12/12/12 di Mahad Al-Zaytun. Peresmian yang bertepatan dengan panen perdana padi unggul Simisuda ini ingin menyatakan bahwa koperasi berperan sebagai wadah ekonomi untuk menggerakkan desa menjadi sumber petani kaya dan kota menjadi konsumen pertanian yang gagah. Syaykh Panji Gumilang mengatakan semestinya tidak ada kelaparan di Indonesia mengingat besarnya hasil panen padi dan bila adanya proteksi hasil pertanian. Ada pula laporan penanaman pohon Jati Emas di kawasan kampus Al-Zaytun.

Kami juga memuat wawancara khusus dengan Mensesneg Sudi Silalahi perihal kedekatannya dengan SBY. Bagaimana keduanya merasakan *chemistry* yang sama walau berbeda latar belakang suku. Dalam Berita Hukum, dibahas bebaskan Hotasi Nababan, Dirut MNA, yang menjadi korban kejahatan mitra bisnis.

Berita Kesehatan yang berjudul Bila Otak Meradang dan Hampa di Usia Senja patut dibaca guna menambah referensi pembaca. Selanjutnya, ulasan merasuknya narkoba di berbagai lini yang diangkat dalam Berita Khas. Diikuti dengan pro dan kontra pelaksanaan kurikulum 2013, kami angkat dalam Berita Humaniora.

Rubrik menarik lainnya seperti Opini Darmin Nasution tentang Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, Berita buku tentang Kiat Jitu Mengajar Anak, Berita Iptek tentang Adu Kekuatan di Perang Cyber, dan sebagainya.

Kami juga menyajikan rubrik Berita Lingkungan tentang Jelang Earth Hour, Berita Wisata menilik Keindahan Pink Beach dan Catatan Wisata Kuliner, dan Berita Budaya yang mengangkat Tarian Sebagai Identitas Aceh.

Selamat membaca.
Redaksi



Lagak Pendiri Partai

CH. ROBIN SIMANULLANG

Beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan ini memperlihatkan lagak para pendiri partai politik yang salah kaprah. Beberapa pendiri (inisiator) parpol memeragakan seolah mereka pemilik parpol, baik dalam ucapan, maupun sikap dan tindakan. Seolah-olah parpol itu seperti badan usaha perseroan atau komanditer dimana pendiri (pemegang saham) sebagai pemilik.

Peristiwa politik terbaru yang sangat kuat mengindikasikan perilaku pendiri partai yang salah kaprah dan terbilang arogan lagaknya (layaknya, setidaknya terkesan) sebagai pemilik partai diperagakan oleh inisiator (pendiri) Partai NasDem dan Partai Demokrat. Padahal kedua partai ini menyatakan diri sebagai partai modern pengusung perubahan dan/atau restorasi. Memang, perlu digarisbawahi bahwa lagak pendiri seolah pemilik partai bukan hanya oleh kedua partai ini.

Kesan publik atas lagak pendiri partai tersebut semakin kuat dengan mencuatnya tindakan dan reaksi internal kedua partai tersebut. Ratusan elit Partai Nasdem, termasuk Ketua Dewan Pakar dan Sekjen DPP, memilih keluar karena menilai sikap dan tindakan pendiri yang memakai baju Ketua Dewan Pertimbangan Partai tidak sesuai dengan visi dan konstitusi partai. Begitu pula ketika inisiator Partai Demokrat yang menggenggam sejumlah jabatan tinggi partai mulai dari Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Komisi Pengawas, dengan gayanya mengambil-alih kewenangan Ketua Umum.

Beberapa kader partai tersebut memprotes, bahwa pendiri partai atau majelis tinggi partai tidak bisa seandainya mengambil-alih kewenangan Ketua Umum dengan melanggar etika dan AD/ART partai.

Sekali lagi, peristiwa politik yang dimainkan pendiri kedua partai tersebut (Nasdem dan Demokrat) hanyalah sebagai contoh terbaru. Beberapa pendiri partai lain tidak sepi dari lagak pemilik partai tersebut. Walaupun sudah ada satu-dua partai yang sudah merdeka dari bayang-bayang kekuasaan sebagai pemilik oleh pendirinya.

Pendiri partai, tentulah mesti dihargai dan dihormati. Sepantasnyalah dicatat (diabadikan) dalam sejarah partai. Ajaran, saran dan pendapat mereka yang sesuai dengan visi, misi dan konstitusi partai dan negara, juga pantasnyalah dihormati dan dikembangkan. Tetapi, inisiator, pendiri atau apapun sebutannya bukanlah pemegang saham atau pemilik partai.

Partai itu bukan badan usaha, seperti perseroan apalagi badan usaha komanditer. Partai politik itu adalah badan publik. Badan Publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi nonpemerintah, bukan hanya partai politik, juga LSM, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kendati dalam UU Partai Politik terbaru sekali pun (UU No.2 Tahun 2011) tidak ada penyebutan secara eksplisit tentang parpol adalah badan publik (milik publik), tetapi dari posisi (eksistensi), fungsi dan pendanaannya, sangat terang keberadaannya sebagai badan publik. Dalam konteks undang-undang keterbukaan informasi publik pun, parpol termasuk badan publik, hal mana setiap badan publik wajib menginformasikan kinerjanya kepada masyarakat, termasuk soal laporan keuangan.

Dalam UU Parpol disebut Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi, Parpol itu adalah milik publik, bukan hanya milik kader (anggota), pengurus atau pendiri. Mereka adalah (hanyalah) sebagai pengelola, bukan saja (hanya) untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, tetapi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Silakan simak! Publik, yang bukan anggota partai, mempunyai hak untuk memilih dan memberi dukungan, baik sumbangan dana maupun pikiran dan tenaga kepada parpol. Makanya, kebesaran atau keberhasilan sebuah partai sangat tergantung dari sebesar apa dukungan dan sumbangan publik kepada partai tersebut. Bahkan boleh dibilang publik adalah nafas partai.

Maka sangat ironis manakala ada elit partai bersuara melarang orang lain (publik) supaya jangan mencampuri urusan partainya. Hal ini justru menunjukkan arogansi, setidaknya kekurangpahaman, para elit politik tersebut tentang keberadaan parpol sebagai badan milik publik. Sama ironis dan buruknya dengan sikap beberapa pendiri partai yang berlagak sebagai pemilik partai. Inilah yang menunjukkan bahwa sebuah partai belum layak disebut partai modern, cerdas dan santun. Apalagi jika partai itu dipenuhi nafsu nepotisme dan otoritarianisme. Sering dilupakan, bahwa hakikatnya berpolitik atau berorganisasi (etika) adalah kesediaan untuk berbagi, berbagi pemikiran, kepentingan dan kekuasaan. ■

Inilah yang menunjukkan bahwa sebuah partai belum layak disebut partai modern, cerdas dan santun. Apalagi jika partai itu dipenuhi nafsu nepotisme dan otoritarianisme. Sering dilupakan, bahwa hakikatnya berpolitik atau berorganisasi (etika) adalah kesediaan untuk berbagi, berbagi pemikiran, kepentingan dan kekuasaan.



Indonesia Kiblat Toleransi

OLEH SURYADHARMA ALI

Dalam mengelola kerukunan antarumat beragama dan kemajemukan bangsa, sesungguhnya Indonesia diakui sebagai 'kiblat' toleransi dan kerukunan beragama di dunia. Dalam hal kehidupan bertoleransi, masyarakat-bangsa Indonesia yang demokratis, egaliter sangat menghormati HAM. Tetapi masih diperlukan kesadaran untuk menjunjung etika kerukunan, seperti sikap tenggang rasa antarkomunitas pemeluk agama, tidak menjadikan umat yang telah memeluk suatu agama tertentu sebagai sasaran penyebaran agama lain. Juga menghormati kesucian tempat ibadah, kitab suci, dan simbol keagamaan dari tindak penodaan dan sebagainya.

Perihal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disampaikan KH Ma'ruf Amin bahwa haram bagi Muslim menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Nasrani yang tengah merayakannya, pemerintah melalui Menteri Agama selalu mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama. Ulama memiliki interpretasi masing-masing dengan sumber hukum antara lain berlandaskan Alquran, Sunah dan ijma (kesepakatan para ulama). Oleh karena itu, perlu juga dilihat pernyataan itu sebagai fatwa lembaga atau pribadi.

Pendapat berbeda antara MUI dan Kementerian Agama, bisa saja terjadi karena dilatarbelakangi oleh referensi hukum yang berbeda-beda. Jadi tidak ada masalah dengan memberi ucapan selamat Natal. Bahwa ucapan selamat Natal yang disampaikan umat Islam kepada umat Nasrani tidak menjadi persoalan karena disampaikan di luar makna ritual.

Namun, dalam menyikapi pro-kontra tersebut, pandangan pemerintah harus dijadikan rujukan. Pemerintah tidak pernah mempersoalkan mengenai hal ini, bahkan presiden, wakil presiden dan menteri agama merayakan Natal, dan semua hari raya agama-agama di Indonesia, sebagai wujud

toleransi yang kita bangun. Ketika umat Hindu merayakan hari besarnya, banyak umat Islam menyampaikan ucapan selamat, dan demikian pula saat Buddha dan Kong Hu Cu, juga tidak ada persoalan. Semua itu menggambarkan semangat toleransi bangsa Indonesia dalam Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karenanya, organisasi Kementerian Agama di seluruh wilayah tanah air, dari Sabang sampai Merauke, memiliki peran yang penting dalam

merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, segenap jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus memelajari wawasan sejarah Kementerian Agama, menggali pemikiran-pemikiran besar para tokoh Kementerian Agama, serta mengkaji perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat, dalam rangka memberi bobot dan makna terhadap peran aktual Kementerian Agama di tengah pusaran kehidupan bangsa.

Tugas Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Ada lima hal yang menjadi program

strategis, yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, peningkatan pelayanan ibadah haji, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, serta pendidikan agama dan keagamaan, mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan masyarakat, yang tentu pula membutuhkan proses dan waktu untuk menikmati hasilnya. ■

Menteri Agama Drs. Suryadharma Ali, dari sambutan pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-67 Kementerian Agama RI di halaman Kantor Kemenag, Jl. Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (03/01/2013).



Pendapat berbeda antara MUI dan Kementerian Agama, bisa saja terjadi karena dilatarbelakangi oleh referensi hukum yang berbeda-beda. Bahwa ucapan selamat Natal yang disampaikan umat Islam kepada umat Nasrani tidak menjadi persoalan karena disampaikan di luar makna ritual. Namun, dalam menyikapi pro-kontra tersebut, pandangan pemerintah harus dijadikan rujukan.

Dampak Ganda Bocornya Sprindik

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

Draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus suap proyek Hambalang bocor dan beredar luas. Ironisnya, orang yang diduga kuat membocorkan Sprindik itu adalah unsur pimpinan dan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri.

Ketua KPK Abraham Samad sendiri merasa sedang difitnah soal bocornya Sprindik atas nama Anas tersebut. "Saya tidak pernah membocorkan sprindik, itu semua fitnah untuk menjatuhkan saya dari ketua KPK," kata Abraham kepada pers, Kamis (21/2/13).

Dia mengaku, hanya bisa berdoa agar semuanya bisa terungkap dengan benar. Abraham juga berharap fitnah terhadap dirinya tidak lagi disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab. "Berhentilah saling memfitnah dan saling menjatuhkan," ujarnya tanpa menyebut rinci siapa yang dimaksud menyebar fitnah tersebut.

Copy dokumen dengan kepala Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tersebut mulai beredar di publik Sabtu 9 Februari 2013. Sehari sebelumnya, Presiden SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil-alih semua kewenangan pengendalian PD dan memberi kesempatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di KPK.

Timbul dugaan bahwa pimpinan KPK sendiri yang memberikan copy draf Sprindik itu kepada 'orang istana' atau intelijen atau pihak tertentu yang kemudian sengaja membocorkannya kepada media (publik) untuk tujuan tertentu. Jadi bukan pimpinan KPK yang langsung membocorkannya ke media. Dugaan itu muncul bukan tanpa sebab. Berawal dari berita sebuah media online yang merilis pernyataan Ketua KPK Abraham Samad Jumat, 8 Februari 2013, bahwa seluruh pimpinan lembaga antirasuah itu telah sepakat untuk menetapkan Anas, sebagai tersangka. Tetapi, siangnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah isu itu. Busyro menegaskan, belum ada surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum.

Banyak pihak yang sangat menyesalkan sikap Ketua KPK Abraham Samad yang mengomentari status hukum Anas di tengah tingginya keinginan para pihak untuk melengserkan Anas dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Sesungguhnya, proses penerbitan sprindik itu hanya diketahui segelintir orang berposisi penting di KPK, yakni satuan tugas kasusnya, direktur penyelidikan, direktur penyidikan,

deputi bidang penindakan, dan lima pimpinan KPK. Sehubungan dengan itu, KPK sudah membentuk tim menyelidiki bocornya sprindik itu. Ternyata, Sprindik yang beredar itu adalah milik KPK. Sprindik itu tergolong rahasia negara. Maka, pembocornya terancam sanksi etika dan pidana.

Karena pembocor Sprindik itu diduga adalah unsur petinggi dan pimpinan KPK sendiri maka KPK telah menyerahkan kasus itu kepada



Komite Etik untuk menyelidiki siapa pihak internal yang membocorkan. Komite Etik yang terdiri dari lima orang itu dalam satu bulan akan menyelidiki berdasarkan rekomendasi dari temuan Tim investigasi Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK yang sudah selesai melaksanakan tugasnya.

Biasanya, Komite Etik KPK dibentuk apabila telah ditemukan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh petinggi KPK, meliputi Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, Satuan Tugas yang menangani kasus, dan lima pimpinan KPK sendiri.

Sementara, kuasa hukum Anas, Firman Wijaya mengatakan tengah mendiskusikan kemungkinan untuk mempidanakan pimpinan KPK terkait bocornya sprindik itu. Mereka menyoroti keanggalan dalam bocornya sprindik itu. Menurutnya, kasus bocornya sprindik dapat dituntut dengan delik penyalahgunaan jabatan.

Bocornya Sprindik itu telah menyulitkan KPK. Berat dugaan, hal ini merupakan produk kerja intelijen atau orang-orang tertentu yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan lingkaran kekuasaan atau pihak berkepen-

tingan. Sangat sulit membayangkan hal ini hanya sekadar akibat kelalaian. Apalagi para petinggi KPK dianggap memiliki integritas tinggi dan telah melalui seleksi ketat.

Tetapi sangat disayangkan jika ternyata di antara petinggi KPK masih ada celah untuk dimasuki para intelijen atau pihak-pihak berkepentingan. Celah itu bisa saja muncul manakala petinggi KPK memiliki interes politik. Indikasi adanya interes politik ini antara lain bisa terlihat dari ada tidaknya niat pencitraan diri dengan menaikkan popularitas melalui media. Seyogyanya para petinggi KPK itu bertindak senyap! Tidak butuh pencitraan dan popularitas. Indikasi lainnya terlihat dari kemampuan pemimpin KPK dalam mengendalikan diri, misalnya masih senang disanjung dan masih mudah tersinggung. Pimpinan KPK yang memiliki celah inilah kemungkinan mudah dibaca intelijen atau pihak berkepentingan dan memperdayanya. Tentu dengan tujuan tertentu yang berdampak ganda. Pertama, untuk digunakan dalam tujuan politik. Misalnya, menjatuhkan lawan politik. Jika pada zaman Orba stigma PKI dipakai menjatuhkan lawan politik, sekarang dugaan korupsi telah menjadi alat politik. Kedua, menyandera KPK, terutama petinggi KPK pembocor rahasia negara tersebut. Itu berarti mengendalikan dan memperlemah KPK. Paling tidak kedua tujuan ini, tampaknya terjadi dalam bocornya Sprindik tersebut.

Selain itu, bocornya Sprindik tersebut juga sangat menyulitkan KPK untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada intervensi dalam kasus yang tengah ditanganinya (dalam hal ini kasus yang menimpa Anas Urbaningrum).

Pada gilirannya, bocornya Sprindik tersebut, akan memukul balik KPK. Kelak, temuan Komite Etik, setelah menemukan bukti petinggi KPK pembocor Sprindik tersebut misalnya, tentulah akan ditindak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Sehingga, KPK akan tergembosi oleh ulah petingginya sendiri. Tentu, komplotan koruptor sistemik yang berkolaborasi dengan para petinggi kekuasaan akan bertepuk tangan. Bagi mereka, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu kali melakukan pekerjaan, mendapatkan beberapa hasil atau keuntungan sekaligus.

Inilah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak gemar masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas. Jangan terseret dengan interes politik, iming-iming jabatan apa pun. Jangan lagi gemar disanjung dan sebaliknya gampang tersinggung. Jagalah integritas dan bekerjalah dengan senyap!

■ ch. robin simanullang

Tatkala Citra Demokrat

PANIK ATAU SKENARIO INTELIJEN POLITIK?

Dalam kiprah politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik selaku Presiden Republik Indonesia maupun 'Presiden' Partai Demokrat, sangat terkesan bahwa pencitraan atau tebar pesona adalah suatu hal yang teramat penting dan utama. Sehingga ketika hasil survei menunjukkan citra dan elektabilitas Partai Demokrat runtuh, SBY dan pendukung fanatiknya terlihat amat galau, bahkan SBY sendiri terkesan sempat panik. Mereka menilai situasi Partai Demokrat sudah SOS. Lalu timbul pertanyaan, apakah mereka benar-benar panik atau ada skenario intelijen politik?

Genderang pencitraan penyelamatan Partai Demokrat (PD) pun ditabuh bertalu-talu di ranah publik di tengah pusaran korupsi dan intrik politik para kader (petinggi) PD sendiri. Tabuh genderang itu diawali SBY sendiri dalam jumpa pers di sebuah hotel di Jeddah, di sela-sela lawatannya ke Arab Saudi, Senin (4/2/2013). SBY mengungkapkan kegalauan atas merosotnya citra partai yang didirikan dan dipimpinnya itu. SBY selaku pemimpin tertinggi (*presiden partai*) yang merangkap berbagai jabatan tertinggi di PD (Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pengawas), tampak tidak hanya galau bahkan terkesan panik. Walaupun di pihak lain, ada pula yang menenggarainya sebagai sebuah lakon yang telah diatur skenarionya (intelijen politik).

"Sejak kemarin malam dan sepanjang hari ini, saya terima banyak berita dari tanah air sesuai rilis survei tentang keadaan parpol dilihat dari sisi dukungan publik saat ini. Yang jadi perhatian adalah



SUNGKEM: Anas sungkem kepada SBY setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat

merosotnya angka untuk Partai Demokrat," kata SBY yang mengenakan pakaian serba putih dan songkok hitam mengungkapkan kegaluannya.

Memang, entah kebetulan atau telah

diskenariokan, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Minggu (3/2/2013) merilis merosotnya elektabilitas PD hingga hanya tersisa 8,3 persen, jauh di bawah Golkar (21,3 persen) dan PDIP (18,2 persen). Hasil survei itu dipaparkan dengan tajuk

"Kinerja Pemerintah dan Partai, Tren Anomali 2012-2013". Digambarkan, kinerja pemerintah yang relatif baik justru berbanding terbalik dengan elektabilitas PD. Maka disimpulkan penyebab utama-



Runtuh



BERPIKIR: SBY penat mencari solusi

nya adalah isu kasus korupsi yang melanda kader PD, termasuk sering disebutnya nama Anas terseret dalam kasus korupsi Hambalang. Survei SMRC itu melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia dengan rentang kesalahan plus-minus 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini membuat SBY dan pendukung fanatiknya terlihat amat galau. Menurut SBY sendiri, ini elektabilitas PD terendah. Padahal, dalam Pemilu 2009 lalu, PD masih mendapat 21 persen suara. "Atas hasil ini, terus terang beberapa kader mengatakan SOS, sudah berada dalam lampu merah," ujar SBY mengondisikan posisi PD.

Pernyataan SBY itu diawali kegalauan terbuka para elit PD yang merupakan loyalis SBY, seperti Jero Wacik dan Syarif Hasan. Menteri ESDM Jero Wacik yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu secara khusus menggelar

konferensi pers di Kementerian ESDM menyikapi hasil survei tersebut. Saat itu, Jero mengatakan, untuk menyelamatkan PD akan lebih baik jika Anas mundur dari jabatannya. Jero menyebut nama Anas yang kerap dikait-kaitkan dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang turut berkontribusi pada rendahnya apresiasi publik.

Sungguh di luar kelaziman, Jero Wacik dan Syarif Hasan bahkan berani meminta SBY untuk segera turun tangan menyelamatkan PD. Keberanian Jero dan Syarif ini di mata pengamat politik Tjipta Lesmana dari Universitas Pelita Harapan dan Gun Gun Heryanto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengindikasikan sangat mungkin sesungguhnya SBY tahu atau bahkan merestui apa yang dilakukan Jero dan kawan-kawannya. Sebab, menurut Gun Gun (Jumat 8/2/2013), tak mudah bagi aktor di luar SBY untuk membuat manuver di luar kehendak SBY. Mereka tidak akan berani bersikap begitu tanpa izin dari SBY.

Senada, Tjipta Lesmana (Kamis 7/2/2013) mengatakan Pak Syarif Hasan dan Pak Jero Wacik waktu konferensi pers Minggu (3/2/2013) pasti sudah kontak dengan SBY, dan pasti dapat lampu hijau. Kalau tidak demikian, menurut Tjipta, kedua tokoh Partai Demokrat itu tak akan berani bertindak seperti itu. Menurut Tjipta, pernyataan Jero merupakan keinginan SBY berdasarkan desakan kader Demokrat, untuk melengserkan Anas demi menyelamatkan partai ini. Apakah ini sebuah lakon skenario? Entah ya atau tidak!

Namun yang jelas tampak di permukaan, pernyataan Jero inilah yang dijadikan alasan oleh SBY untuk segera turun tangan menyelamatkan PD dari kondisi SOS tersebut. Langkah pertama, Presiden SBY pun menyerukan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan

korupsi yang diduga melibatkan kader PD, termasuk Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Sebuah taktik jitu melibatkan KPK. Bisa saja petinggi KPK menyadari atau tidak menyadari langkah (skenario) ini. Tentu, seruan ini telah dipertimbangkan secara matang untung ruginya bagi Partai Demokrat.

Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang memiliki insting dan nalar politik standar tinggi, telah mengendus arah seruan kepada KPK tersebut. Lalu, dia pun mengekspresikannya dengan menuliskan 'Politik Para Sengkuni' dalam status BlackBerry Messenger (BBM) miliknya. Diduga lakon politik Sengkuni itu tidak sekadar ditujukan kepada Jero Wacik dan Syarif Hasan. Tampaknya, Anas yang sudah merasa disudutkan dan didorong supaya segera ditetapkan KPK sebagai tersangka, berusaha melakukan perlawanan. Dalam percakapan dengan Wartawan Berindo beberapa waktu lalu, sudah diungkapkannya beberapa indikasi bahwa sebagai Ketua Umum PD, dia ibarat bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki. Meski Anas sendiri mengatakan bahwa politik Sengkuni tidak ada kaitannya dengan ramainya desakan beberapa elit PD menanggapi survei tersebut. "Apa kaitannya, tidak ada. Jangan dihubungkan, meskipun Anda bebas hubungkan itu," kata Anas yang mengaku secara kebetulan tengah membaca cerita Mahabharata. (*Baca: Politik Para Sengkuni*).

Ironisnya, tampaknya KPK merespon cepat seruan Presiden SBY tersebut. Walaupun Ketua KPK Abraham Samad dan Juru Bicara KPK Johan Budi secara normatif menampik mengikuti seruan dan irama SBY: "KPK tidak ada urusan dengan politik!" Namun, berselang beberapa hari beredar (bocor) pula *copy* draf surat perintah penyidikan (Sprindik) yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Amat memprihatinkan karena diduga, Sprindik ini sengaja 'diberikan' salah seorang pimpinan KPK

SIAPA MENYUSUL: Iklan Partai Demokrat pada Pemilu 2009, 'Katakan Tidak pada Korupsi!'





TATAPAN: SBY dan Anas saling bertatapan: Persahabatan atau perseteruan?

kepada 'orang istana' atau intelijen atau pihak berkepentingan. Pihak pegawai istana yang rupanya kebagian *copy* sprindik ini sempat diduga sebagai pembocor kepada media (publik), walaupun kemudian jubah istana membantah bahwa itu bukan atas sepele lembaga kepresidenan (istana). Lalu siapa yang membocorkan *copy* sprindik itu sehingga menyebar ke berbagai media? Berat dugaan hal ini merupakan produk kerja intelijen yang bertujuan ganda. Bisa saja si penerima *copy* sprindik dari oknum petinggi KPK sengaja melanggar janjinya untuk tidak membocorkan Sprindik itu ke pihak lain. Sebab justru bocornya draf sprindik inilah salah satu bagian penting dari jalan cerita (skenario), yang berdampak ganda. (Baca: *Berita Terdepan, Dampak Ganda Bocornya Sprindik*).

Sementara itu, di tengah desakan loyalis SBY soal status hukum Anas Urbaningrum, di kalangan pers, beredar pesan pendek (SMS) yang disebut dari Presiden SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ketika berdoa di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi (5/2/2013). Pesan pendek SBY yang diterima Majalah Berindo di Jakarta, Rabu (6/2/2013) tersebut ditujukan kepada Para Anggota Majelis Tinggi Partai, Ses Wanhor, Sekjen PD, dan Ketua Fraksi PD DPR. Anehnya, tidak ikut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Setelah SMS itu beredar di berbagai media, dari Arab Saudi, Presiden SBY menyatakan bahwa dia selaku Ketua Majelis Tinggi telah memiliki langkah

strategis (solusi) untuk menyelamatkan PD yang akan segera dilaksanakannya setelah tiba di tanah air. Solusi itu akan dibicarakan dengan Majelis Tinggi.

Setelah SBY tiba di tanah air, Kamis (7/2/2013) pagi, malam harinya dia mengumpulkan menteri dari PD dan tokoh senior PD di Cikeas, tanpa mengikutkan Anas. Sumber Berindo menyebut tak heran bila dalam pertemuan ini, SBY memaparkan langkah yang akan diambilnya untuk 'mempreteli' kewenangan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum PD. Tidak diberhentikan, tetapi kewenangannya dipreteli (dilumpuhkan). Sementara, pada saat bersamaan, Anas didatangi beberapa pengurus pusat dan daerah di rumahnya di Duren Sawit. Ketegangan antara kubu SBY dan Anas dalam tubuh PD mencuat ke permukaan bagai lahar panas.

Besoknya, Jumat (8/2/2013) SBY selaku Ketua Majelis Tinggi PD mengumpulkan jajaran Majelis Tinggi, termasuk Anas, di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor. Majelis Tinggi PD terdiri dari sembilan orang yakni SBY sebagai ketua, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum sebagai wakil ketua, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Setelah mengadakan rapat tertutup Majelis Tinggi yang diperluas (dihadiri Ketua Fraksi PD di DPR dan menteri-

menteri yang berasal dari PD), SBY dalam jumpa pers yang digelar pukul 22.30 malam menyampaikan delapan solusi yang disebut sebagai langkah penyelamatan partai. Intinya, bahwa kendali partai diambil-alih oleh Ketua Majelis Tinggi. "Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," tegas SBY.

Anas tidak diberhentikan sebagai ketua umum, namun kewenangannya dipreteli. Walaupun Anas sebagai Ketua Umum juga menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi. Sementara dalam poin tujuh disebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal saat itu, Anas belum menyangang status hukum apa pun di KPK. Jangankan sebagai tersangka, sebagai saksi pun tidak. Hanya saja, terpidana korupsi Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, sering menuding-nuding Anas terlibat dalam korupsi termasuk pernah menerima mobil Harrier dari sebuah perusahaan BUMN. Nazar yang semula sempat menyebut nama Ibas, putera SBY, yang menjabat Sekjen DPP PD, belakangan tidak lagi. Nazar tampak getol menasar Anas. Apakah ini bagian dari rangkaian skenario cerita, bisa ya, bisa tidak!

Namun, Anas bukan anak ingusan dalam politik. Dia menghormati delapan solusi Ketua Majelis Tinggi itu, sebagai bagian kerja semua tim dalam tubuh PD. Majelis Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas yang semuanya diketuai SBY silakan melaksanakan perannya, begitu juga Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang, secara bersama-sama melaksanakan perannya demi kemajuan partai.

Besoknya, Sabtu (9/2/2013), Anas tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa selaku Ketua Umum dalam kegiatan PD di Lebak, Banten. Dia menghadiri pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Lebak dan deklarasi calon Bupati Lebak. Anas juga melakukan penanaman pohon kedelai di Desa Gunung Anten, Desa Cimarga, Lebak. Menurut Anas, hal itu menjadi bukti kewenangannya tidak dipreteli oleh SBY. Dia menegaskan kondisi internal PD tidak ada masalah, hanya sedang berusaha bangkit dari banyaknya anggapan negatif yang mengakibatkan turunnya elektabilitas partai berdasarkan survei.

Dia tak mau banyak komentar terkait delapan solusi penyelamatan partai yang disampaikan Ketua Majelis Tinggi PD tersebut. Menurut Anas, hal tersebut merupakan persoalan internal partai yang tidak bisa dibebankan ke hadapan publik. "Yang harus saya lakukan adalah

terus menyebarkan virus optimisme. Terus menggalang semangat kader untuk solid, terus bersatu, terus bekerja keras,” tegas Anas.

Pakta Integritas Normatif

Selanjutnya, sebagai bagian dari delapan solusi penyelamatan partai, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi, mewajibkan semua kader menandatangani 10 poin Pakta Integritas. Tahap pertama, semua jajaran Majelis Tinggi bersama 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah dikumpulkan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/2/2013) malam untuk menandatangani pakta integritas tersebut.

Anas sendiri baru menandatangani pakta integritas tersebut bersama jajaran DPP di kantor Partai Demokrat, Kamis, 14 Februari 2013. “Tanda tangan pakta integritas di hari kasih sayang,” katanya berseloroh sembari menandatangani piagam pakta itu. Menurut dugaan sebagian pengamat, pakta integritas tersebut bertujuan untuk menjerat Anas untuk melepas jabatan Ketua Umum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Kalimat terakhir dari 10 Pakta Integritas tersebut berbunyi: “Saya siap menerima sanksi organisasi bila saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.”

Namun, menurut Anas, langkah ini akan menjadi tahapan Demokrat mem-

Anas bahkan menyatakan akan *walk-out* jika ada langkah memaksakan Rapimnas menjadi KLB untuk memaksa Anas mundur.

Survei yang Menakutkan

Di tengah hiruk-pikuk Partai Demokrat tersebut, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei yang melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi melalui *quick poll* pada 11-14 Februari 2013. Penelitian ini menggunakan metode *multistage random sampling* dengan *margin of error* sekitar 2,9 persen. Survei dilengkapi riset kualitatif dan wawancara mendalam. Survei ini tampaknya di luar kehendak pihak istana, terlihat dari reaksi beberapa menteri yang membantah hasil survei ini.

Pendapat publik yang terekam dalam survei “Prahara Partai Demokrat dan Kekhawatiran Publik terhadap Kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” tersebut dirilis di Jakarta, Minggu (17/2/2013). Hasilnya, publik meminta Presiden SBY lebih fokus menangani tugas-tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Survei itu menunjukkan sebanyak 68,42 persen responden khawatir dengan komitmen Presiden dalam menjalankan tugas di sisa masa pemerintahannya. Sebanyak 67,33 persen percaya, keputusan SBY untuk mengambil alih pengendalian Partai Demokrat akan membuatnya terjebak pada urusan partai dan melupakan rakyat. Hanya 24,29 persen responden yang tak khawatir dengan komitmen SBY sebagai presiden. Dan hanya 32,67 persen yang percaya, pengambilalihan partai oleh SBY tak memengaruhi kinerjanya sebagai presiden.

Peneliti LSI, Barkah Patimahu mengatakan, publik menilai, keputusan SBY untuk mengurus langsung partainya adalah langkah kontraproduktif. Selama ini, Presiden selalu berjanji fokus menjalankan pemerintahannya, bahkan pernah mempersilakan para menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Ternyata, kini Presiden justru mengurus partai.

Hasil survei itu juga memperlihatkan, 60,38 persen publik tidak yakin pengambilalihan Partai Demokrat oleh SBY dari Ketua Umum Anas Urbaningrum akan meningkatkan elektabilitas partai tersebut pada Pemilu 2014. Hanya 27,31 persen yang yakin elektabilitas partai akan membaik.

Menurut LSI, langkah tersebut justru melemahkan dua kekuatan SBY sekaligus. Pertama, kebijakan itu menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden karena dinilai tidak fokus mengurus bangsa dan negara. Kedua, langkah itu juga sulit mengembalikan dukungan publik kepada Partai Demokrat.

Tampaknya, SBY tidak mau terseret begitu mudah dalam rentak irama politik Anas Urbaningrum yang didendangkan dalam pidato pengunduran diri tersebut. Dia malah mempersilakan pihak lain, terutama KPK, untuk menjelaskan apakah dalam penetapan Anas sebagai tersangka ada rekayasa dan intervensi. Harus diakui, oleh teman atau lawan politik, senang atau tidak, SBY sangatlah (paling, ter) piawai dalam mengelola politik. Siapa pun tidak pantas memandangnya remeh. Terbukti, SBY bisa menduduki jabatan presiden dalam dua periode, melalui pertarungan politik bebas pada era reformasi di negeri ini.

Namun, Anas sendiri tidak hadir dengan alasan sakit. Di awal pidato pengantar pembacaan dan penandatanganan pakta integritas tersebut, SBY mengatakan Anas sudah diundang sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, hanya saja, Anas mengaku sakit. “Kita undang. Sekali lagi memang berhalangan karena sakit,” kata SBY.

Dalam pidato, SBY menjelaskan mengapa dia selaku ketua Majelis Tinggi mengambil-alih secara langsung penyelamatan partai. Antara lain karena desakan kader agar SBY selaku penggagas Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina partai ikut tanggungjawab meningkatkan elektabilitas partai. Karena itu, kata SBY, setelah rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, dia menyusun sebuah Pakta Integritas yang berlaku di jajaran partai dan akan ditandatangani kader dan pejabat utama.

Isi 10 Pakta Integritas tersebut bersifat normatif dan sudah jamak, khususnya bagi kader partai dan pejabat publik. Namun, rasanya penting untuk selalu mengingatkan sekaligus menaikkan citra partai. Sama seperti semboyan “Katakan Tidak pada Korupsi” yang diteriakkan elit PD pada kampanye Pemilu 2009 lalu, yang dimaksudkan menaikkan citra.

perbaiki citranya di mata kader internal dan di depan masyarakat. Secara pribadi, dia sendiri juga mempunyai standar etika yang sejalan dengan pakta integritas tersebut.

Sementara itu, para loyalis SBY, seperti Ruhut Sitompul menunjukkan kegemilangan atas langkah Ketua Majelis Tinggi tersebut. Apalagi, Majelis Tinggi kemudian melanjutkan langkah menyelenggarakan Rapimnas yang dihadiri semua elit partai, DPD dan DPC. Para loyalis SBY tampaknya berharap Rapimnas ini bisa menyepakati penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Anas. Namun, di pihak lain, para pendukung Anas dari berbagai daerah tampak menunjukkan konsolidasi perlawanan, terutama setelah menerima undangan yang ditandatangani Sekjen Dewan Pembina Jero Wacik dan Sekjen DPP Edhi Baskoro Yudhoyono.

Polarisasi pendukung SBY dan pendukung Anas pun bergelinding. Berbagai ulasan tentang adanya dua matahari di PD pun mencuat. Siapa yang paling kuat? Beberapa orang pengurus pusat, yang antara lain dimotori Ulil Abshar Abdalla mendesak Anas mundur. Sementara, para pengurus daerah yang loyal kepada

Hasil survei ini tampaknya sangat menakutkan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah hasil survei tersebut. Menurut Dipo, Presiden akan tetap fokus bekerja hingga akhir masa jabatan. "Tidak benar hasil survei itu. Terlalu berlebihan," kata Dipo sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/2/2013). Dipo pun meminta para menteri untuk menjelaskan bahwa Presiden SBY tetap fokus mengurus negara.

Perlawanan pendukung Anas dan hasil survei LSI ini tampaknya telah mengubah skenario strategi 'penyelamatan partai' oleh Majelis Tinggi. Hal ini terlihat dari realitas penyelenggaraan Rapimnas Partai Demokrat, Minggu 17/2/2013 di Jakarta yang semula digemborkan akan berujung lengsernya Anas, ternyata berlangsung antiklimaks. SBY dan Anas tampak berbincang bahkan berbisik akrab. Dua politisi tengah memainkan peran dengan jitu. Rapimnas itu berlangsung tertutup.

Acara pembukaan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan penutupan pada pukul 16.45 WIB. Diawali laporan dari Ketua Umum Anas Urbaningrum soal kesiapan Rapimnas sekitar 10 menit. (Padahal sebelumnya kewenangannya sudah dipreteli dan tidak lagi dilibatkan dalam persiapan Rapimnas). Dilanjutkan dengan pembekalan dan arahan dari Ketua Majelis Tinggi SBY selama 60 menit. Kemudian, para peserta dari DPD dan DPC yang telah menandatangani pakta integritas menyerahkan kepada panitia yang dilakukan secara simbolik mewakili Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setelah itu digelar konferensi pers selama 20 menit. Dilanjutkan dengan foto bersama dan doa.

Para pengamat menyebut, Rapimnas tersebut sebagai bukti kuatnya pendukung Anas di PD. Pengamat politik dari Lingkaran Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (18/02/2013) mengatakan Rapimnas ini merupakan kegagalan SBY untuk yang kesekian kali dalam upaya mendongkel Anas dari tampuk ketua umum Demokrat yang selalu berujung antiklimaks.

Setelah itu, harapan satu-satunya untuk bisa mendepak Anas dari posisi Ketua Umum hanyalah dengan mengandalkan KPK untuk segera menetapkan Anas sebagai tersangka korupsi. Jika tidak, kekuatan, kewenangan dan pengaruh Anas Urbaningrum di Partai Demokrat akan benar-benar kokoh dan tak bisa dikendalikan oleh SBY. Contohnya, dalam penyusunan daftar caleg, KPU (undang-undang) hanya mengakui tanda tangan ketua umum, KPU tidak mengenal Majelis Tinggi. Begitu pula dalam pencalonan presiden. Bukankah sudah ada jurisprudensi tentang hal ini? Yakni pengalaman Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB yang dikalahkan oleh Muhaimin Iskandar

selaku Ketua Umum PKB?

Tentu saja hal ini tidak dikehendaki oleh SBY selaku pendiri dan Ketua Majelis Tinggi partai. Apalagi kekuatan pengurus daerah dan cabang sudah cenderung lebih dikuasai oleh Anas. Suka atau tidak, masih kuat kesan di publik bahwa SBY selaku pendiri dan 'pemimpin tertinggi' masih cenderung bertindak sebagai pemilik Partai Demokrat. Sama seperti kebanyakan pendiri partai lain. Hal inilah yang membuat partai ini tak pantas disebut partai modern. Nepotisme dalam partai ini juga masih sangat kental. Bayangkan, orang yang sama sekali belum punya pengalaman politik bisa langsung menjadi ketua umum dan Sekjen partai hanya karena hubungan kekerabatan.

Lalu, bagaimana cara untuk menghempang laju pengaruh dan kekuatan Anas di Partai Demokrat?

Nabok Nyilih Tangan

Beruntung! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja atau tidak, sadar atau tidak, telah membuka jalan lebar bagi SBY dan para loyalisnya untuk memaksa Anas mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Jumat 22 Februari 2013, KPK setelah melalui rapat gelar perkara menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus proyek Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan pers menjelaskan semua pimpinan dan tim penyidik KPK sepakat meningkatkan status Anas seba-

gai tersangka. Ketika menjabat sebagai anggota DPR, Anas diduga menerima hadiah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

KPK menjerat Anas dengan menggunakan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Penetapan KPK ini, sebelumnya telah diwarnai berbagai spekulasi. Mulai dari pernyataan Ketua KPK Abraham Samad Jumat, 8 Februari 2013 yang dilansir sebuah media, bahwa seluruh pimpinan lembaga antirasuah itu telah sepakat untuk menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka. Namun, surat perintah penyidikan kasus suap tersebut masih belum diteken, walau sudah disiapkan.

"Sudah sepakat, tetapi kan harus ditandatangani semua (pimpinan KPK)," ujar Abraham seusai melantik Direktur Penuntutan KPK, Ranu Mihardja, dan Sekretaris Jenderal KPK, Anis Zaid Basalama, di kantornya, Jumat, 8 Februari 2013. Abraham mengatakan KPK belum meneken surat itu lantaran tiga dari pimpinannya masih bertugas di luar daerah, yakni

Politik Para Sengkuni

Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat menuliskan 'Politik Para Sengkuni' dalam status BlackBerry Messenger (BBM) miliknya. Statusnya ini menimbulkan banyak spekulasi karena ditulisnya setelah Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menggelar konferensi pers menanggapi hasil survei melorotnya elektabilitas Partai Demokrat dengan mendesak Anas Urbaningrum segera mengundurkan diri dari jabatan ketua umum serta mendesak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi untuk segera turun tangan.

Berbagai pihak berspekulasi bahwa sebutan 'Politik Para Sengkuni' itu ditujukan kepada orang-orang yang mendesaknya lengser, di antaranya Jero Wacik dan Syarif Hasan. Meski Anas sendiri mengatakan bahwa politik para Sengkuni itu tidak ada kaitannya dengan ramainya desakan beberapa elit PD menanggapi survei tersebut. "Apa kaitannya, tidak ada. Jangan dihubungkan, meskipun Anda bebas hubungannya itu," kata Anas yang mengaku se-

cara kebetulan tengah membaca cerita Mahabharata'.

Menjawab pertanyaan pers tentang siapa yang dia maksud sebagai pelakon politik Sengkuni itu, Anas berkelit. Anas menjelaskan, bahwa dia kebetulan sedang baru belajar cerita Mahabharata. Cerita legendaris dari India itu memuat perang saudara antara Kurawa dan Pandawa yang penuh intrik politik, salah satunya keterlibatan Sengkuni. Anas mengaku baru mengetahui sedikit cerita soal Sengkuni. "Kalau saya sudah selesai baca, nanti Anda kasih tahu tentang Sengkuni itu siapa," ujarnya.

Sebagaimana dikisahkan dalam cerita Mahabharata karangan Vyasa, Sengkuni adalah patih di Astina, sebuah kerajaan yang diperintah oleh pimpinan Kurawa, Prabu Duryudana. Dalam lakon Mahabharata, Sengkuni yang secara fisik digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah, tetapi memiliki watak menjengkelkan, licik, senang memipu, menghasut, memfitnah dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah refleksi

Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Namun, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi perihal berita yang menyebutkan Anas telah ditetapkan sebagai tersangka membantah isu yang beredar tersebut. Busyro mengatakan, belum ada surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum. "Belum ada sprindik (surat perintah penyidikan), jadi belum tersangka," ujar Busyro kepada pers, Jumat (8/2/2013) siang.

Sementara itu, beredar pula *copy* Sprindik yang telah ditandatangani oleh tiga pimpinan KPK yakni Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Belakangan Adnan mengaku telah mencahut tanda tangannya setelah mengetahui belum ada gelar perkara kasus itu.

Berbagai spekulasi pun berkembang sekitar penetapan Anas sebagai tersangka tersebut. Tidak hanya media nasional yang mengangkatnya menjadi berita hangat. Media asing juga ramai memberikannya. Seperti Washington Post, The Wall Street Journal, BBC, ABC News, Bernama (Malaysia) dan lain-lain. Washington Post memberikannya dengan judul 'KPK Tetapkan Ketua Partai Berkuasa Sebagai Tersangka dalam Kasus Korupsi.'

Washington Post menulis bahwa penetapan Anas sebagai tersangka adalah pukulan baru terhadap reputasi Partai Demokrat serta sang pendiri yang kini menjabat sebagai Presiden yang dalam kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres RI) 2009, SBY dan

Demokrat mengusung slogan anti korupsi.

Sementara, itu Sabtu (23/2/2013) sekitar pukul 03.00 dini hari, akun Facebook milik Anas Urbaningrum diisi status baru berbunyi '*Nabok Nyilih Tangan*'. Peribahasa '*nabok nyilih tangan*' itu secara harfiah berarti memukul dengan meminjam tangan orang lain. Peribahasa yang digunakan untuk menyindir secara tidak langsung orang yang mencelakakan orang lain, biasanya untuk tujuan tertentu, tetapi seolah-olah orang lainlah yang melakukan.

Praktik seperti ini biasanya terjadi dalam politik oleh orang yang tidak kesatria, untuk menyingkirkan lawan politiknya, dengan menggunakan tangan orang lain. Sehingga dia seolah-olah terkesan sebagai orang yang bersih, baik, suci, santun dan cerdas.

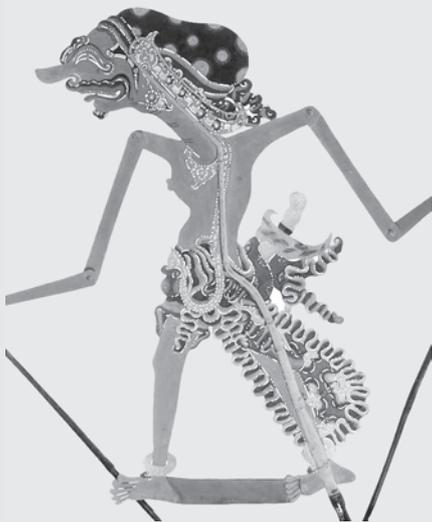
Siangnya, Sabtu (23/2/2013) pukul 14.00 di kantor DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyampaikan pidato tanpa teks pernyataan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah akhir perjalanan politik Anas? Anas dalam rangkaian pernyataannya menegaskan, barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. "Hari ini, saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama." (*Selengkapnya pidato Anas, baca: Partai Demokrat,*

Santun atau Sadis?)

Malam harinya Sabtu (23/2/2013) di Puri Cikeas, Bogor, SBY memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mengikutsertakan menteri-menteri dari PD dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR, menyikapi pernyataan pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang oleh KPK.

Rapat yang berlangsung hingga dini hari itu dirumuskan dalam tujuh poin. Kali ini, SBY memilih lebih bijaksana, santun dan cerdas mengkalkulasi strategi politiknya. Tidak sebagaimana lazimnya SBY yang menyampaikan langsung hasil rapat kepada pers, tetapi kali ini hanya dipercayakan kepada Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto. (*Baca: Tujuh Sikap Majelis Tinggi PD*).

Tampaknya, SBY tidak mau terseret begitu mudah dalam rentak irama politik Anas Urbaningrum yang didendangkan dalam pidato pengunduran diri tersebut. Dia malah mempersilakan pihak lain, terutama KPK, untuk menjelaskan apakah dalam penetapan Anas sebagai tersangka ada rekayasa dan intervensi. Harus diakui, oleh teman atau lawan politik, senang atau tidak, SBY sangatlah (paling, ter) piawai dalam mengelola politik. Siapa pun tidak pantas memandangnya remeh. Terbukti, SBY bisa menduduki jabatan presiden dalam dua periode, melalui pertarungan politik bebas pada era reformasi di negeri ini. ■ mbi-crs



orang yang ingin orang lain celaka. Sementara, lawan Sengkuni dalam lakon Mahabarata versi Jawa adalah Semar. Semar adalah seorang pembantu atau punakawan para Pandawa. Semar adalah simbol dari seseorang yang

melayani Pandawa dengan tulus dan tanpa pamrih. Semar bertubuh gempal, berbeda dengan Sengkuni yang kurus. Sengkuni dalam perang Baratayuda tewas di tangan Bima.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai, status politik para Sengkuni itu menyiratkan sebagai bentuk perlawanan Anas. "Saya bukan ahli Jawa. Tapi, sekilas saya baca, itu simbol dari perlawanan," ujar Effendi kepada sejumlah wartawan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/2/2013).

Pengamatan lebih tegas dikemukakan pengamat politik Sugeng Soerjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2/2013) malam. Dia menilai bahwa sosok Sengkuni yang disebut Anas dalam status BlackBerry Messenger-nya tersebut tidak dapat dipandang remeh. Menurut Toto, penyebutan Sengkuni tersebut berkorelasi dengan lawan politik Anas di Partai Demokrat.

Menurut Toto, Anas menyerang lawan-lawan politiknya di internal partai. "Ia menyerang Syarif Hassan dan Jero Wacik dengan menganalogikan mereka sebagai patih Sengkuni yang amat licik, itu demi mengejar kepentingan dirinya," kata Toto. Menurut Toto, ungkapan politik Sengkuni

merupakan serangan balik Anas bagi kubu yang menginginkan dirinya lengser dari kursi kekuasaannya di Partai Demokrat. Di mata Toto, penyebutan Sengkuni oleh Anas membuktikan bahwa struktur Demokrat sedang goyah, retak akibat adanya faksi di Demokrat yang pro dan kontra Anas.

Para Sengkuni tampaknya berusaha menjadikan Anas sebagai kambing hitam merosotnya elektabilitas Partai Demokrat. Anas sendiri mengakui merasakan hal itu. Menurutnya, pergantian Ketua Umum bukanlah solusi atas merosotnya elektabilitas partai. Solusi terhadap masalah itu adalah dengan melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2014. "Kini bukan saatnya bagi kader Partai Demokrat mencari kambing hitam," katanya.

Menurut Anas, kasus korupsi yang menjerat kader Demokrat memang menjadi faktor yang turut membuat elektabilitas partai merosot. Namun, hal itu bukan satu-satunya faktor. "Banyak faktornya. Semua orang yang berpikir jernih pasti sudah tahu, tidak perlu saya katakan," katanya. Beberapa pihak menilai, kinerja pemerintahan SBY menjadi salah satu faktor penyebab merosotnya elektabilitas PD. ■ mbi-crs

Partai Demokrat, Santun atau

Anas Urbaningrum: “Hari-hari ini dan ke depan, sejarah akan menguji apakah Partai Demokrat etikanya bersih, cerdas dan santun. Partai yang bersih atau korup? Partai cerdas atau tidak cerdas? Partai yang santun atau sadis? Apakah yang akan terjadi kesantunan politik atau sadisme politik? Tentu ujian itu akan berjalan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.”



Anas Urbaningrum, lembar pertama

Anas Urbaningrum mengemukakan hal itu dalam pidato tanpa teks pernyataan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat di hadapan wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (23/2/2012), setelah sehari sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Mantan Ketum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sebelumnya merasa sangat yakin tidak akan punya status hukum di KPK, karena dia yakin KPK bekerja independen, mandiri dan profesional dan tidak bisa ditekan oleh opini dan kekuatan sebesar apapun itu. Namun, dia baru mulai berpikir akan punya status hukum di KPK, ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukumnya yang diikuti rangkaian bocornya sprindik (surat perintah penyidikan), serta ketika dia dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, yang berarti dia sudah divonis punya status hukum tersangka.

Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (2001-2005) ini menyebut dirinya

ibarat bayi yang lahir tidak diharapkan dalam Kongres Partai Demokrat 2010, di mana dia terpilih sebagai Ketua Umum, mengalahkan Andy Mallarangeng yang didukung penuh oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dia mengalami rangkaian peristiwa politik dan organisasi di Partai Demokrat yang pada waktunya akan dia ceritakan lebih panjang.

Berkaitan rangkaian peristiwa ini, Anas menegaskan: “Di atas segalanya, saya ingin menyatakan barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Barangkali ada yang meramalakan dan menyimpulkan ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini, saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama. Tentu untuk kebaikan kita bersama.”

Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Anas Urbaningrum melepas jaket biru kebesaran Partai Demokrat. Politisi muda yang ‘Piawai Memilih Kata’ yang diapresiasi oleh TokohIndonesia.com sebagai figur yang kalem, santun, cerdas dan terampil dalam komunikasi politik membuat namanya digadagadag sebagai salah satu sosok unggulan di teras perpolitikan nasional masa depan. Dia memang bukanlah politisi sembarangan. Dia politisi yang sudah terasah berorganisasi sejak kecil. Dia berpengalaman sejak menjadi Sekretaris OSIS MTsN Kunir (1983-1984), Ketua SKI OSIS SMAN Srengat (1986-1987), dan Kelompok Studi Dharmawangsa, Surabaya (1989-1992).

Lulusan terbaik FISIP Universitas Airlangga (1992) itu lebih dulu menjabat Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur, sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI (1997-1999). Kemudian dia aktif sebagai Anggota Tim Revisi UU Politik (Tim 7) (1998), Anggota Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau Tim Verifikasi Partai Politik Peserta

Pemilu (1999), Direktur Komunitas untuk Transformasi Sosial (2000), dan Anggota Tim Revisi UU Politik Depdagri (2000).

Kemudian dia menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (2001-2005) yang menyelenggarakan Pemilu saat SBY terpilih menjadi Presiden (2004-2009). Rangkaian selanjutnya, secara mengejutkan dia diberi penghargaan (kepercayaan) menjadi Ketua Bidang Politik dan Otda DPP Partai Demokrat. Kemudian, dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung (2010) dia berhasil memerankan kepaiwaan politiknya sehingga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2015). Tampaknya, keterpilihannya bagai anak yang lahir tanpa dikehendaki pemimpin tertinggi partainya. Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditanggalkannya lebih dini pada Sabtu, 23 Februari 2013, setelah terseret pusaran korupsi yang melibatkan beberapa kader petinggi Partai Demokrat yang diwarnai berbagai peristiwa (permainan) politik di tubuh partai tersebut.

Pernyataan Lengkap Anas

Untuk mengetahui isi dan makna pernyataannya secara utuh, berikut ini transkrip pernyataan lengkap Anas Urbaningrum (lahir di Blitar, Jawa Timur, 15 Juli 1969; sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, 1992 dan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000), politisi muda potensial menjadi pemimpin nasional yang terseret dalam pusaran korupsi dan permainan ‘politik Sengkuni’ di partai penguasa (Partai Demokrat) selaku Ketua Umum:

Pertama saya sampaikan terima kasih dan selamat datang, khususnya rekan-rekan wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat. Hari ini, saya akan menyampaikan sikap, pikiran dan pandangan, menyangkut status saya dan apa-apa yang akan saya lakukan ke depan.

Saudara-saudara sekalian. Seperti diketahui bersama, tanggal 22 Februari 2013 KPK sudah mengumumkan bahwa saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya menyatakan akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil dan obyektif dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan.

Saya garis bawahi, saya masih percaya lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan berdasarkan kriteria-

Sadis?

kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar, saya yakin kebenaran dan keadilan masih bisa ditegakkan. Karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan.

Yang kedua, saudara-saudara sekalian, lewat proses hukum yang obyektif dan transparan itu, saya akan melakukan pembelaan hukum sebaik-baiknya. Dan lewat proses hukum itu, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel, saya meyakini betul sepenuhnya bahwa saya tidak terlibat di dalam proses pelanggaran hukum yang disebut sebagai proyek Hambalang itu. Ini saya tegaskan karena sekali lagi, sejak awal, saya punya keyakinan yang penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu.

Saya meyakini bahwa kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi dari fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul mengalahkan fitnah dan rekayasa, sekuat apapun dibangun, sehebat apapun itu dibangun, serapi apapun itu dijalankan. Itu keyakinan saya.

Saudara-saudara sekalian. Saya ingin sampaikan, sejak awal, saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK. Mengapa? Karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri dan profesional. Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu.

Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK, ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya: "Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah." Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir, jangan-jangan, saya menjadi yakin, saya menjadi tersangka setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum yang dimaksud, yaitu tersangka.

Apalagi saya tahu, beberapa petinggi Partai Demokrat yakin betul, hakkul yakin, pasti minggu ini Anas menjadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sebagai sprindik (surat perintah penyidikan). Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh. Sama sekali terkait dengan sangat erat. Itulah faktanya, itulah rangkaian kejadiannya. Dan tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu. Bahkan masyarakat umum dengan mudah membaca dan mencermati itu.

Saudara-saudara sekalian. Kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini pasti terkait dengan Kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin bercerita lebih panjang. Pada waktunya saya akan bercerita lebih panjang. Tetapi inti dari kongres itu ibarat bayi yang lahir. Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Dan rangkaian itu saya rasakan, saya

alami dan menjadi rangkaian peristiwa politik dan organisasi di Partai Demokrat. Pada titik ini, saya belum akan menyampaikan secara rinci. Tapi ada konteks yang sangat jelas menyangkut rangkaian-rangkaian peristiwa politik itu.

Saudara-saudara sekalian. Ketika saya memutuskan terjun ke dunia politik dan saya masuk menjadi kader Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Dalam dunia politik, tidak sulit untuk menemukan intrik, fitnah dan serangan-serangan. Itu saya sadari sejak awal.

Dan karena itu, saya tahu persis konsekuensi-konsekuensinya. Maka saya sampaikan, saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya tidak akan pernah mengeluh tentang perkembangan situasi ini. Dan saya punya keyakinan kuat dan semangat untuk terus menghadapinya, termasuk dengan risiko dan konsekuensi. Itu hal yang lazim saja. Saya anggap sebagai sebuah kelaziman, tidak ganjil, tidak aneh. Apalagi di dalam sistem demokrasi kita yang masih muda, termasuk Partai Demokrat yang tradisinya masih muda.

Saudara-saudara sekalian. Karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin posisi tersangka itu lebih karena faktor nonhukum, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar itu mengatakan "kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat." Ini bukan soal jabatan atau posisi, ini soal standar etik.

Standar etik pribadi saya itu, Alhamdulillah dengan pakta integritas yang diterapkan di Partai Demokrat. Saya



PERNYATAAN ANAS: Anas Urbaningrum menyampaikan pernyataan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Sabtu 23/2/2013 dan melepas jaket kebanggaan Demokrat setelah sehari sebelumnya KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang.



BISIKAN MESRA: Anas terlihat berbisik mesra dengan SBY saat Rapimnas PD di Jakarta, 17/2/2013

sendiri di tempat ini, seminggu lalu kurang lebih, sudah menandatangani pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas pun, standar etik pribadi saya mengatakan hal seperti itu: "Saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat."

Terkait dengan itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus pada kader-kader Partai Demokrat yang telah memberikan kepercayaan dan mandat politik kepada saya untuk memimpin

Partai Demokrat sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Saya mohon maaf, kalau saya berhenti di awal 2013. Saya tidak merencanakan untuk berhenti di tahun 2013. Sejauh perjalanan yang saya tempuh, saya jalankan, saya tunaikan, sebagai ketua umum, sepenuhnya saya bersungguh-sungguh menjalankan mandat dan amanat politik partai itu.

Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu ada capaian prestasi dan masih

ada bolong-bolongnya, ada lubang-lubangnya. Tapi saya menegaskan, semua itu saya jalani dengan sungguh-sungguh, serius, penuh konsentrasi, karena itu bagian dari panggilan jiwa politik saya. Alhamdulillah, saya bersyukur di dalam proses menunaikan tugas kurang lebih hampir tiga tahun, dua setengah tahun lebih, semuanya saya jalankan dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi.

Terimakasih pada kader-kader Demokrat yang selama ini sama-sama menjalankan dan menunaikan tugas sesuai dengan kewenangan, otoritas dan tugas masing-masing. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, pengurus DPD, DPC, kader-kader di seluruh Indonesia, Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Komisi Pengawas, saya sampaikan terimakasih yang selama ini bersama-sama menjalankan tugas.

Meskipun saya sudah berhenti menjadi Ketua Umum, saya akan tetap menjadi sahabat bagi kader-kader Partai Demokrat. Saya ketika melepas tentu tidak punya kewenangan organisatoris karena saya sudah lepas. Tetapi saya menjaminkan satu hal, yaitu ketulusan persahabatan dan persaudaraan. Saya jamin ketulusan itu kepada kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, apapun nanti tugas langkah yang akan saya tempuh, termasuk saya ada di dalam atau di luar, apakah saya menjalani proses hukum, apakah proses hukum itu berjalan adil, obyektif, transparan atau tidak, saya menyatakan, menegaskan, menggarisba-

7 Sikap Majelis Tinggi PD

Untuk menyikapi pernyataan pengunduran diri Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (23/2/2013) malam hingga Minggu (24/2/2013) dini hari. Dihadiri jajaran Majelis Tinggi Marzuki Alie, Jero Wacik, TB Silalahi, Max Sopacua, Jhonny Alen, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Toto Riyanto serta menteri-menteri dari Demokrat Jero Wacik, Syarif Hasan, EE Mangindaan dan Roy Suryo ditambah Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf.

Rapat itu merumuskan tujuh poin sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto kepada pers di luar komplek Puri Cikeas, yakni:

1. Keluar besar Partai Demokrat prihatin ditetapkannya mantan Ketua

Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Dengan harapan hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan, dalam arti jika Anas tidak bersalah, maka yang bersangkutan mesti dibebaskan.

2. Majelis Tinggi telah mendengar pernyataan pers Anas sekaligus pernyataan berhenti dari ketua umum. Baik Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina Demokrat belum terima surat resmi pengunduran diri sesuai dengan etika dan tata administrasi yang biasa berlaku di organisasi.

3. Dengan pengunduran diri Anas, untuk sementara tugas-tugas DPP dijalankan oleh dua Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Direktur Eksekutif. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi. Agenda tugas dan pekerjaan DPP tetap berjalan seperti biasa.

4. Langkah-langkah penyelamatan dan penataan partai yang tengah dilaksanakan sekarang ini tetap berjalan. Semua agenda

dan kegiatan yang telah disampaikan dalam Rapimnas 17 Februari 2013 akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

5. Menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat yang intinya KPK menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka karena tekanan politik, Partai Demokrat serahkan kepada KPK untuk memberikan tanggapan. Apakah benar Anas dijadikan tersangka tanpa ada alasan dan pertimbangan hukum apapun dan benar-benar karena motif politik, atau sebaliknya tidak seperti itu. Majelis Tinggi Demokrat tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi dengan Anas berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang. Keluarga besar Demokrat dan masyarakat selama ini hanya mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan Nazaruddin dalam berbagai kesempatan yang menyebutkan Anas. Agar masyarakat mengetahui duduk persoalan, ada baiknya KPK menjelaskan spekulasi itu, sepanjang tidak mengganggu tugas dan pekerjaan KPK.

6. Berkaitan dengan tuduhan dan serangan mantan ketua umum, kami tidak ingin beri-



TUTUP WAJAH: Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Anas dan SBY menutup wajah dengan telapak tangan masing-masing

wahi, saya menjamin ketulusan persahabatan dan persaudaraan.

Loyalitas sebagai sahabat merupakan bagian yang indah dan menyegarkan dalam dinamika politik partai yang kadang-kadang keras dan agak panas. Karena itulah, saya yakin betul, saya akan tetap berkomunikasi sebagai sahabat dengan kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Tidak dalam posisi sebagai Ketua Umum, tetapi sebagai

teman dan sahabat.

Saya juga berharap siapapun yang nanti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat bisa menunaikan tugas, bahkan jauh lebih baik dari apa yang sudah saya tunaikan bersama teman-teman pengurus. Saya yakin pasti akan datang ketua umum yang lebih baik. Saya percaya itu, karena sejarah selalu melahirkan pemimpin pada waktunya.

Selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Apa yang akan saya lakukan ke depan adalah tetap dalam kerangka memberikan kontribusi dan menjaga momentum bagi perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kualitas demokrasi di Indonesia. Apapun kondisi dan keadaan saya. Kondisi dan keadaan saya itu bukan faktor. Faktornya yang penting adalah bahwa saya akan tetap bersama-sama dalam sebuah ikhtiar untuk membuat Indonesia ke depan makin baik dan makin bagus.

Hari-hari ini dan ke depan, akan diuji pula bagaimana etika Partai Demokrat. Partai yang etikanya bersih, cerdas dan santun. Akan diuji oleh sejarah apakah Demokrat partai yang bersih atau tidak bersih. Partai yang bersih atau korup. Akan diuji partai yang cerdas atau partai yang tidak cerdas. Partai yang solutif menawarkan gagasan cerdas dan bernas atau partai yang tidak seperti itu. Juga diuji, apakah Demokrat akan menjadi partai yang santun atau sadis. Apakah yang akan terjadi kesantunan politik atau sadisme politik? Tentu ujian itu akan berjalan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.

Tetapi yang paling penting saya garis bawahi, bahwa tidak ada kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan kebencian itu jauh dari rumus politik yang saya anut.

Dan mudah-mudahan juga dianut siapapun kader-kader Partai Demokrat.

Di atas segalanya, saya ingin menyatakan barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Barangkali ada yang meramalkan dan menyimpulkan, ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini, saya nyatakan, ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan, ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama. Tentu untuk kebaikan kita bersama.

Saya sekali lagi dalam kondisi apapun akan tetap berkomitmen berikhtiar memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan politik kita, demokrasi kita. Jadi, ini bukan tutup buku. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman-halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama.

Inilah saudara-saudara sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya akan terus menjadi sahabat-sahabat kalian. Karena banyak buku yang akan kita baca bersama. Buku-buku itu jangan dipahami dalam perspektif yang ngeres, tetapi positif dan konstruktif, kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar. Itulah yang menjadi titik orientasi kita.

Saya akan melepas jaket biru kebesaran dan saya akan menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Bukan berarti selama ini tidak bebas dan merdeka. Tapi tentu ini ada maknanya secara etik dan organisatoris. Selamat berjuang kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia, berjuang sesuai pilihan yang merdeka. Sekali lagi terima kasih. ■ mbi-bhs

kan tanggapan saat ini. Semua ada jawabannya. Banyak hal yang tidak tepat disampaikan ke publik menyangkut Anas sejak awal bergabung ke Demokrat tahun 2005 lalu. Sepanjang kongres dan setelah menjadi ketua umum, bagaimanapun Anas pernah memimpin Demokrat selama 2,5 tahun. Meski selama kepemimpinannya banyak masalah yang terjadi di Demokrat, tapi Anas ikut berbuat untuk kepentingan partai. Oleh karena itu, Demokrat memilih tidakanggapi pandangan sepihak, tudingan, dan serangan mantan ketua umum Demokrat, kecuali apabila sungguh diperlukan. Konsentrasi dan prioritas Demokrat saat ini adalah untuk penyelamatan dan penataan partai dalam rangka menyongsong tugas mendatang.

7. Kami jajaran kepemimpinan Demokrat tetap berdoa dan berharap kepada KPK agar hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jika Anas tidak bersalah, termasuk Andi Mallarangeng, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. ■

Chemistry, SBY dalam D

Wawancara Mensesneg Sudi Silalahi



Chemistry Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Sudi Silalahi bagai pinang dibelah dua. Kendati berbeda latar belakang suku (budaya), Jawa dan Batak, keduanya memiliki kecocokan batin, sanubari, pola pikir dan visi (*chemistry*). Saking cocoknya, tak heran bila kemungkinan keduanya saling merasakan yang satu ada dalam dirinya: SBY ada dalam diri Sudi dan Sudi ada dalam diri SBY. Maka tak mustahil Sudi Silalahi suatu ketika akan dipercaya SBY menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Kesimpulan ini, sebagai apresiasi berdasarkan analisa atas 'pengakuan' dan 'jejak rekam' kedua tokoh yang saling percaya dan bersinergi tersebut. *Chemistry* kedua jenderal ini telah terbangun sejak 1971, saat di Akademi Militer, Magelang. Ketika itu, pertemuan pertama mereka, SBY sebagai Sersan Taruna (junior) dan Sudi sebagai Sersan Mayor Dua Taruna (senior,

satu tingkat di atas). Dalam tradisi di Akademi Militer dengan disiplin keras, para taruna senior bisa (berhak) menghukum junior, sehingga taruna senior amat ditakuti para taruna junior. Umumnya para senior satu tingkat di atas kepada juniornya lebih menonjolkan otoritas, bisa menghukum junior, bahkan terkadang dengan tindakan fisik yang berlebihan, sampai junior minta ampun.

Namun, sesuai pengakuan Presiden SBY¹: "di mata saya, Sermadatar Sudi Silalahi sedikit berbeda." Saat itu, SBY mengaku pernah bertemu Sudi, tapi yang dia dapatkan bukan hukuman atau tindakan disiplin seperti yang sering dilakukan para senior lainnya, melainkan nasehat dan pemberian motivasi agar berhasil dalam menempuh pendidikan di Akademi Militer tersebut.

Ketika itu, Sudi aktif sebagai pembina taruna beragama Islam, yang sering diistilahkan Pokdojid, singkatan dari Kelompok Komando Masjid, yang mengurus pembinaan rohani, ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Selain itu, mereka juga bergabung dalam satu kesatuan yaitu Kompi Drumband Canka Lokananta, drum bandnya Akabri. Sudi sebagai pelatih (senior).

Kendati belum diekspresikan kala itu, Sudi mengaku² melihat SBY sebagai seorang yang cerdas, mempunyai kepribadian lebih dari yang lain. Hal itu juga dibuktikan, waktu di Akademi Militer, SBY mendapatkan tiga bintang. Yakni Bintang Kartika Tambunpusaka (berkepribadian terbaik); Bintang Kartika Adi Tanggap (atas intelektualnya); dan Bintang Kartika Dira Trengginas (ketangkasan fisik). "Saya melihat dia ini taruna yang baik, calon perwira yang bagus. Dalam pikiran saya begitu," pengakuan Sudi.

Jadi, di luar pengetahuan masing-masing, keduanya telah memiliki penilaian positif tersendiri dan bahkan telah merasakan adanya kecocokan di antara mereka. "Baru belakangan saya tahu dari pengantar buku yang diberikan kepada saya, ternyata waktu di Akademi Militer, beliau (SBY) juga melihat saya sosok

¹ Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono: Pekerja Keras, Relijius dan Setia; Kata Pengantar Buku Sudi Silalahi Jenderal Batak dari Tanah Jawa, Pustaka Bina Imtag, 2011, hlm. v-x

² Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi, Wawancara Wartawan TokohIndonesia.com Ch. Robin Simanullang di Kantor Menteri Sekretaris Negara, pada 13 Februari di Gedung Utama Sekretariat Negara.

Diri Sudi Silalahi

yang beda dengan yang lain,” papar Sudi Silalahi.

Namun, kala itu penilaian dan kecocokan itu belum terekspresikan sedemikian rupa. Baru setelah keduanya ketemu lagi di beberapa medan pengabdian, muncul dan semakin terasa adanya kesamaan visi dan panggilan tugas. Kemudian singkat cerita, mereka sama-sama bertugas sebagai instruktur, guru militer di Bandung. Sudi sebagai Komandan Secaba reguler. SBY sebagai komandan pelatih bintangara infanteri.

Menteri Sekretaris Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Sudi Silalahi mengungkapkan hal itu dalam wawancara dengan wartawan TokohIndonesia.com Ch. Robin Simanullang, dan Bantu Hotsan di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Gedung Utama Sekretariat Negara, beberapa waktu lalu. Beliau didampingi Staf Khusus Mensesneg Mayjen TNI (Purn) Kohirin SS, MSc dan dua staf Humas.

Sebagian materi wawancara adalah

tentang bagaimana Sudi Silalahi sebagai orang terdekat Presiden SBY. Berikut petikan wawancara tersebut.

Bagaimana kisah kedekatan Pak SBY dan Pak Sudi Silalahi yang saling mengagumi sejak semasih di AMN sampai akhirnya tampil bersama-sama mengurus negara di pusat kekuasaan. Pak Sudi sejak di Menkopolkam, dari pengamatan kami sangat dekat dengan Pak SBY sampai beliau menjadi Presiden. Dan kami mengapresiasi Pak Sudi sebagai orang ketiga di Republik. Bagaimana komentarnya?

Iya, tentunya tidak, biasa-biasa saja. Hanya sejak dulu memang kita sudah banyak kecocokan mulai dari bagaimana kita mereformasi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ketika itu. Saya membantu beliau (Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Kepala Staf Teritorial - Kaster ABRI, 1998-1999), sebagai

Asospol (Asisten Sosial Politik). Sebagai Asospol banyak kesamaan pandangan kita tentang perlunya reformasi di internal ABRI ketika itu. Yang kemudian dilanjutkan di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam), saya sebagai Sekmen Menkopolkam, lebih fokus.

Itu yang ditanyakan tadi bahwa di Polkam itu juga kita banyak melakukan hal-hal yang cukup konstruktif, konkrit hasilnya. Internal di Polkam, bagaimana kami membenahinya menjadi Kementerian Koordinator yang efektif. Beliau sebagai menteri membantu tugas-tugas presiden. Utamanya, kalau di internal di kementerian itu sendiri bagaimana manajemen Kementerian Koordinator Polkam itu dan bagaimana kita mewujudkan administrasi, keuangan dan semua yang sangat penting. Kita juga membereskan masalah internal, bagaimana kita mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya di Kementerian Koordinator Polkam.

Dan kedua, ke luar, bagaimana kita mencari solusi, untuk persoalan Ambon dan Aceh ketika itu. Niat kita, bagaimana masalah Aceh dan Ambon kita selesaikan secara damai dan bermartabat. Dan saya mendampingi beliau ke luar masuk Aceh dengan usaha-usaha yang konkrit mengajak semua eksponen bangsa ini, untuk ikut serta.



WAWANCARA: Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi saat diwawancara Wartawan TokohIndonesia.com dan Berita Indonesia

Bagaimana dengan komponen-komponen GAM yang ada di hutan untuk mencari solusi secara damai. Dan ternyata dengan komunikasi-komunikasi kita waktu itu, ketika di Polkam itu tidak maksimal karena memang masih banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Banyak yang mengatakan bahwa di Aceh itu, tidak ada istilah damai, separatistis harus ditumpas. Tapi karena kita, tidak ingin melihat prajurit kita setiap hari gugur, begitu juga dari GAM keluarga-keluarganya ditinggalkan. Juga masyarakat jatuh korban setiap hari.

Akhirnya betul-betul sama-sama mempunyai keinginan yang kuat menyelesaikan Aceh secara damai. Singkatnya, dengan berbagai upaya draft yang kita masukkan, kita menyelesaikan Aceh itu dengan bermartabat. Jadi, menurut saya, itu upaya atau kerja keras kita di Polkam untuk menyelesaikan Aceh.

Begitu juga Ambon, Maluku, ketika itu sudah hampir dua tahun bakar-bakaran, juga tidak selesai. Kita berupaya keras. Ternyata mengajak duduk bersama, menentukan pejabat-pejabat yang tepat di sana untuk menyelesaikan Ambon, itu akhirnya selesai juga dengan baik.

Kemudian Pak SBY jadi presiden, Pak Sudi selalu menjadi orang terdekat. Sebenarnya yang mengantarkan Pak SBY itu menjadi Presiden, bukan Partai Demokrat, tapi lingkarannya Pak Sudi yang mengatur strateginya. Yang tampak di depan memang Partai Demokrat, tetapi untuk mencapai strategi itu Pak Sudi dan kawan-kawan?

Sebetulnya tidak sepenuhnya betul, ya kita sama-samalah. Tapi begini, intinya ketika itu, saya sebagai TNI aktif, tidak mungkin saya terjun langsung untuk mendukung beliau jadi presiden, dalam arti berpolitik praktis. Tapi perlu juga saya ingin luruskan, bahwa beliau itu sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi presiden. Sama sekali tidak ada, hanya ketika itu, ya, mungkin telah ada sedikit, permainan-permainan politikkah atau mungkin yang mengesek-gesek kepada presiden ketika itu yang menyatakan Pak SBY ini mau *running* untuk presiden dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada. Sama sekali tidak ada.

Kalau tidak salah, waktu itu,

sudah ada Partai Demokrat, lalu kita tanya Pak Sudi, bagaimana kemungkinan Pak SBY menjadi wakil presiden. "Oh untuk apa jadi wakil presiden, yang penting presiden"?

Oh, bukan. Jadi begini, itu belakangan. Sebetulnya beliau justru ada keinginan menjadi Wakil Presiden, tapi beliau tidak pernah ditawari oleh Presiden Megawati ketika itu. Bahwa beliau itu sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi presiden. Dalam hati beliau itu kalau diajak jadi wakil presiden beliau sangat bersedia. Itu sebetulnya, permulaannya.

Pernyataan ini penting, belum pernah terungkap?

Belum, memang belum pernah terungkap. Yang kedua, tapi justru yang berkembang ketika itu ada masuk (informasi) barangkali kepada presiden (Megawati) seolah-olah Pak SBY ini mau *running* jadi presiden. Sebetulnya tidak. Waktu itu bermula, Polkam ada suatu survey. Survey itu sebetulnya survey yang diadakan untuk keputusan atau kebijakan presiden. Ketika itu suasana di Aceh masih seperti itu, dibuatlah survey apakah di Aceh sudah siap untuk ikut Pemilu. Itu kira-kira, misalnya apakah peraturan perundangannya ataupun perangkat-perangkatnya semua sudah siap, sudah oke.

Sebetulnya survey tentang itu yang dilakukan, waktu itu oleh Deputy Satu bidang dalam negeri yaitu Pak Yatim. Ketika itu entah kenapa sudah masuk informasi, bahwa beliau (SBY) sudah membuat survey untuk mengukur dukungan. Padahal sama sekali tidak!

Kemudian dengan itulah, mungkin ada yang gesek-gesek dan sebagainya. Beliau barangkali waktu itu, sudah tidak begitu diajak aktif di kabinet. Ketika itu, saya pun sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa beliau itu tidak dilibatkan di kabinet. Tapi ketika para wartawan mendesak saya, bertanya, "apakah betul Pak Sekmenko bahwa Pak SBY sudah tidak diajak lagi sidang kabinet dan sebagainya." Aduh saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Tapi tunggu saya cari jawaban dan bertanya kepada beliau.

Saya bertanya kepada beliau, waktu itu belum sampai ke kantor, "Ini Pak (SBY) para wartawan bertanya. Apa betul Pak Menkopolkam itu tidak dilibatkan di sidang kabinet lagi. Terus jawabnya Pak SBY kepada saya, "mas jawab apa adanya." Wah, ketika

saya disuruh menjawab apa adanya itu, di situlah saya menjawab para wartawan, kalau tidak salah, dulu itu, wartawan darimana, lupa saya. Tapi saya menjawabnya, ya, sesuai dengan pertanyaan rekan-rekan wartawan. Saya sudah bertanya kepada presiden (Menkopolkam). Saya diminta untuk menjawab apa adanya. Memang beliau sudah jarang diajak ke kabinet. Saya bilang begitu.

Ketika itulah dukungan publik, se-pertinya beliau ini dikucilkan atau apa begitu. Akhirnya ketika itu bapak presiden menulis surat ke Ibu Mega, untuk memberikan klarifikasi bahwa tidak ada keinginan beliau untuk *running* jadi presiden dan sebagainya dengan harapan beliau dipanggil, diajak lagi begitu. Tapi tidak, malah saya tidak perlu ceritakan apa respon presiden (Megawati) ketika itu.

Tapi katanya sampai tiga kali Presiden Megawati bertanya?

Tidak. Tidak pernah, tidak pernah! Dan beliau mengatakan kepada saya, andai kata saya ditanya, siap untuk membantu beliau. Tapi saya tidak berhak. Kemudian hal ini hanya permainan politik. Siapa yang bermain di sini yang mengesek-gesek sehingga Ibu Mega dapat informasi yang seperti itu. Dengan seperti itu (diperlakukan) barulah beliau berpikir untuk mendirikan partai itu.

Kapan pertama kali Pak Sudi membicarakan tentang jabatan presiden sama Pak SBY?

Saya tidak pernah membicarakan tentang beliau. Tapi begini, ketika beliau, setelah mengundurkan diri ke luar dari kabinet, di situlah. Itupun saya masih tetap ada di Polkam. Saya kira apa yang, katakanlah, yang sedang beliau rancang di luar. Itu memang beliau ada, ya, sekali lagi beliau juga tidak mau menyeret-nyeret saya sebagai tentara yang masih aktif ketika itu. Saya hanya memberikan pandangan, barangkali gambaran kepada beliau bahwa mungkin bisa dilibatkan yang senior-senior yang punya pandangan-pandangan. Saya memberikan beberapa nama yang akhirnya juga diajak beliau untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah ke depan.

Setelah itu, saya juga mengajukan permohonan berhenti dari Sekmenkopolkam ketika itu. Tapi tidak kunjung keluar keputusan. Saya minta izin umroh, saya berdoa mudah-mudahan



KETUM DEMOKRAT: Sudi bilang: "Anggota saja tidak! Jangan tanya partai. Tapi mungkin sebagai *back of mind*, boleh...."

saya juga berhenti dari Polkam. Alhamdulillah, begitu saya selesai umroh, Kepres turun, saya ke luar. Begitulah saya bermaksud (memberikan dukungan).

Karena saya melihat figur yang cocok jadi presiden ketika itu, beliaulah. Beliau mempunyai wawasan yang luas, kepemimpinan, pengalaman mulai dari TNI. Di TNI kayak apa, pemikiran-pemikiran beliau yang sangat strategis itu. Saya ingin supaya presiden mendatang itu adalah presiden yang cakap bisa membawa negara ini kepada keadaan yang kita harapkan. Kirakira begitu. Dengan harapan, tidak ada keinginan saya untuk masuk ke kabinet. Saya pun ketika ditawari oleh beliau, saya mengatakan tidak. Saya ingin, kalau bapak sudah jadi presiden, sayapun pensiun tenang, itu saja.

Tapi waktu itu saya membuat "Blora Center" yang *alhamdulillah* sukarelawan datang dari mana-mana, ingin berkontribusi menyukseskan beliau sebagai calon presiden. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Ketika itu, mereka tidak melihat partainya, datang ke Blora Center yang saya buat itu. Saya sediakan fasilitas untuk wartawan, mau makan, minum dan komputer, segala macam lengkap. Dan itupun

pengadaan dari mereka (relawan). Tidak ada dari kita. Jadi itu semua sukarrelawan yang berkontribusi di situ. Ada yang menyumbang alat-alat komunikasi, segala macam keperluan-keperluan untuk mensosialisasikan beliau sebagai calon presiden.

Selain itu Pak Sudi, kita 'kan tidak selalu yakin betul apa yang Pak Sudi (katakan). Karena menurut pengamatan kami, ada *think tank* yang koordinasinya itu ditangani Pak Sudi, jauh sebelum Pak SBY jadi presiden?

Iya bolehlah (ha-ha-ha). Kalau sebelum, tidak. Selama saya Sesmenpolkam, beliau ya, saya buka dari awal sebelum dari apa (TNI). Beliau ketika di TNI pun dengan saya, sama sekali jadi menteri pun tidak ada (keinginan). Beliau itu waktu dipanggil Presiden Gus Dur untuk jadi menteri. Itu kita berkabung malah. Tiga hari kita itu merenung, karena beliau sama sekali tidak ingin meninggalkan TNI, cita-citanya waktu itu, kita ingin sama-sama membenahi TNI agar menjadi tentara yang profesional. Kita mereformasi ABRI ketika itu, kita perbaiki semua. Banyak hal-hal yang signifikan kita ubah. Ketika itu distorsi

kekaryaan Dwifungsi yang kebablasan dan sebagainya itu.

Itu betul-betul! Ketika diberitahu beliau diminta menjadi Mentamben (Menteri Pertambangan dan Energi), orang kasih selamat, telepon berdering-dering, kita berdua itu malah merenung. Apa beliau senang jadi menteri? Nggak mau beliau. Sebetulnya ingin membenahi TNI.

Baru setelah dipanggil Presiden Gus Dur, dijelaskan kenapa beliau diminta jadi menteri. Setelah itu beliau mendapat telepon dari almarhum ayahandanya, bahwa pengabdian itu tidak hanya di TNI, di mana pun pengabdian kepada negara sama saja. Barulah beliau mulai terbangun dan belajar apa pertambangan dan energi dan kemudian menyesuaikan. Itulah beliau, sama sekali tidak ada keinginan jadi menteri. Keinginan beliau hanya ingin menjadi pimpinan angkatan darat saja. Itu cita-citanya.

Pak Sudi itu 'kan begitu dekat dengan beliau (Pak SBY). Ketika diajak jadi Mentamben pun, sudah membicarakannya berdua. Berarti kedekatannya itu sangat luar biasa. Jadi apa sih kelebihan Pak SBY?

Sebetulnya panjang ya. Sebetulnya mulai bagaimana kedekatan itu terbangun. Itu mulai dari Akademi Militer. Waktu itu, saya lebih senior dari beliau. Saya lebih senior satu tahun, ketika saya tingkat tiga Sersan Mayor Taruna, beliau adalah tingkat dua Sersan Taruna. Kebetulan kami bergabung dalam satu kesatuan yaitu Kompi Drumband Canka Lokananta, drum bandnya Akabri. Saya sebagai pelatih, katakanlah seperti itu.

Saya melihat, dia ini seorang yang cerdas, mempunyai kepribadian lebih dari yang lain-lainnya. Dan itu juga dibuktikan, waktu beliau di Akademi Militer, mendapatkan bintang kepribadian terbaik. Dia dapat tiga bintang di Akademi Militer, yaitu Bintang Kartika Tambunpusaka, itu artinya yang mempunyai kepribadian yang bagus. Jadi contohlah, yang bagus. Kemudian ada Bintang Kartika Adi Tanggap, itu intelektualnya. Ada Kartika Dira Trengginas, yaitu ketangkasan fisiknya. Dia mempunyai bintang kepribadian yang menonjol. Saya melihat dia ini taruna yang baik, calon perwira yang bagus. Dalam pikiran saya begitu.

Di luar pengetahuan saya dan baru saya ketahui, dia juga mempunyai penilaian kepada saya. Baru belakangan saya tahu dari pengantar buku yang diberikan kepada saya, ternyata waktu di akademi militer, beliau juga melihat saya sosok yang beda dengan yang lain. Tapi bukan dalam arti hebat saya, tapi umumnya dulu waktu di akademi, kebetulan saya waktu di akademik itu, saya masuk istilahnya ada Pokdojid (Kelompok Komando Masjid) yang mengurus pembinaan rohani, ceramah-ceramah agama dan sebagainya.

Nah ketika itu, saya sebagai senior, umumnya senior satu tingkat di atas, kepada juniornya itu lebih menonjolkan otoritas. Jadi bagaimana dia menghukum juniornya sampai ampun-ampunlah, kira-kira begitu ya. Bahkan dengan tindakan fisik yang berlebihan. Beliau melihat saya adalah senior yang selalu memberikan motivasi, persuasi, dan memberikan dorongan-dorongan agar lebih sukses dalam akademik. Jadi itu rupanya, jadi saya juga menilai beliau dari berbagai aspek, tapi tanpa saya ekspresikan.

Rupanya beliau juga mempunyai penilaian terhadap saya, tanpa diekspresikan. Baru setelah kita ketemu di medan pengabdian ini, muncul kes-



POLITIK: Taat hukum dan taat azas

maan panggilan tugas ini. Jadi itulah kira-kira. Kemudian singkat cerita, kita sama-sama di Bandung sebagai instruktur, guru militer. Saya komandan Secaba regular. Beliau waktu itu sebagai komandan pelatih bintangara infanteri. Ketemu di sana, jadi banyak persamaan-persamaan itu. Singkat lagi, bertemu lagi di Cilangkap. Sempat beliau menjadi Asospol ABRI ketika itu, saya sempat menjadi Wasospol walaupun tidak terlalu lama. Kemudian saya menjadi Kasdam Jaya, beliau naik jadi Kasospol (Kaster). Kemudian waktu beliau jadi Kasospol, saya ditarik beliau untuk jadi wakilnya, jadi Asospol di Cilangkap.

Sebelum ditarik di Asospol, saya sebagai Kasdam Jaya, dulu pernah dua kali diminta beliau untuk mewakili beliau memberikan ceramah. Pertama, ceramah reformasi TNI/ABRI di Universitas Indonesia (UI) di Depok. Permintaan ceramah itu mendadak, dimana saya harus memberikan ceramah jam 10, saya diberitahu jam 8. Harusnya beliau yang memberikan ceramah. Tapi karena mendadak, beliau ada tugas dari penglima ABRI ketika itu, saya diminta tolong mewakili memberikan ceramah reformasi ABRI di UI tersebut. Ketika itu, saya sebetulnya, wah mendadak sekali ya, karena waktunya sangat singkat. Tapi singkat cerita saya penuhlah, waktu itu bagaimana penolakan dari mahasiswa melihat ABRI itu dan sebagainya. Saya disambut dengan demo dan sebagainya.

Kemudian setelah saya memberikan ceramah, saya menyampaikan bagaimana konsep reformasi ABRI dan apa-apa saja yang sudah dilaku-

kan ABRI. Beberapa hal yang signifikan yang telah berubah setelah reformasi itu. Ketika itu saya menantang mahasiswa: Sekarang rekan-rekan mahasiswa, setelah reformasi itu, apa yang berubah yang kalian lakukan? Kalau ABRI sudah jelas, yang tadinya menduduki jabatan-jabatan sipil, kita sudah melepaskan. Tidak boleh lagi, kalau mau menjabat jabatan bupati, walikota, gubernur harus pensiun.

Kemudian kita tidak lagi melakukan, peran-peran kekarayaan, misalnya menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan dan sebagainya, kita stop. Kita bubarkan Sospol, kekarayaan, jelas yang kita lakukan, kita tidak berpolitik praktis lagi. Kita tidak mau ikut-ikutan parpol lagi, netralitas dalam pemilihan umum, nyata-nyata kita sampaikan kepada mereka (mahasiswa). Akhirnya, sambutan mahasiswa itu berbalik yang tadinya antipati menjadi simpati. Itulah, ketika saya laporkan kepada beliau (SBY), beliau mengapresiasi.

Yang kedua, ketika diminta beliau, mendadak juga mewakili beliau sebagai Kasospol untuk memberikan ceramah di HMI, padahal waktu itu saya masih berpangkat Brigjen dengan jabatan Kasdam Jaya. Waktu itu penolakan HMI begitu juga. Tapi setelah saya memberikan ceramah, akhirnya juga cair, berbalik dari penolakan menjadi dukungan yang sangat baik. Dan ketika saya laporkan kepada beliau, terkesan sekali. Sehingga ketika itu saya langsung diminta untuk menjadi Asospol. Ceritanya begitu.

Bagaimana agenda politiknya?

Oh, kita tidak akan bermain-main dengan politik. Kita betul-betul taat hukum, taat azas. Ini profesional.

Kemudian mengenai Partai Demokrat?

Jangan tanya partai. Tapi mungkin sebagai *back of mind*, boleh....

Tapi kita melihat Pak Sudi akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat?

Oh tidak. Saya anggota saja tidak, bagaimana jadi ketua.

Kan Pak Sudi 'suhunya' Partai Demokrat?

Anggota saja tidak!

■ ti-mbi

Partai Dihantam Tsunami Korupsi

Beberapa partai dihantam badai korupsi. Namun kemelut yang melanda Partai Demokrat tampak lebih rumit.

Perilaku koruptif merasuk tubuh partai semakin dalam, tidak hanya di barisan elite Dewan Pimpinan Pusat, tetapi juga di lapis menengah dan bawah.

Tidak hanya Demokrat, partai besar lainnya, PKS juga sedang diterpa badai korupsi. Sedangkan Partai Golkar menghadapi ancaman perpecahan terkait pencalonan presiden yang sudah digenggam erat ARB. Padahal di kubu yang berseberangan ada tokoh-tokoh senior, seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, sama-sama mantan Ketua Umum.

Jadi tinggal tiga partai besar yang berada di posisi relatif aman - PDIP, PAN dan PPP - disusul PKB, Gerindra, Hanura dan Nasdem. Partai Nasdem yang belum teruji oleh Pemilu juga sedang dilanda bencana perpecahan akibat mundurnya Hary Tanoesoedibyo Dewan Pakar, dan naiknya Surya Paloh menjadi Ketua Umum. Hary, raja media, bergabung dengan Partai Hanura, diberi jabatan Ketua Dewan Pertimbangan.

Namun hantaman kepada Demokrat tampaknya lebih dahsyat, laksana tsunami. Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, disusul pernyataan publiknya melepas semua jabatan partai. Kasus megakorupsi yang susul menyusul menerpa elite partai, membuat Demokrat tersungkur. Elite Demokrat yang sudah divonis pidana penjara, M. Nazaruddin (mantan Bendahara Umum), Angelina Sondakh (mantan Wakil Sekjen) dan Hartati Murdaya (mantan anggota Dewan Pembina).

Sedangkan Andi Alfian Mallarangeng (AAM), mantan Sekretaris Dewan Pembina dan Menpora, sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Menyusul pula Ketua Umum Anas Urbaningrum telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi mega-proyek Hambalang. Jhony Alen dan Max Sopacua, masing-masing Wakil Ketua Umum, masih dalam posisi aman kendati namanya pernah pula dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi.

Selain itu, Choel Mallarangeng juga dinyatakan sebagai tersangka, karena mengaku menerima dana proyek Hambalang Rp 2 miliar. Choel juga masih bernasib baik seperti abangnya, belum ditahan KPK. Tetapi yang jelas, situasi tersebut membuat Demokrat berkubang "lumpur korupsi."

Ketika mendirikan dan membesarkan Partai Demokrat, SBY didampingi sosok-

sosok brilian, seperti Andi dan Choel Mallarangeng bersaudara. Andi doktor politik lulusan Amerika, sedang Choel memimpin Yayasan Fox yang berafiliasi pada Fox Foundation, AS. Sehingga publik di sini mengindentikkan Partai Demokrat di



SBY terbeban menaikkan citra Demokrat

Indonesia berafiliasi dengan Partai Demokrat AS.

Semula DR. AAM bermitra dengan DR. Ryaas Rasyid sesama alumnus doktor ilmu politik AS dari Sulawesi Selatan untuk mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, tetapi tidak berkembang. AAM tergiur bergabung dengan SBY dan meninggalkan Ryaas. SBY dan AAM berhasil, pada Pemilu 2004, Demokrat meraup 7% suara, SBY terpilih jadi presiden. Demokrat menantang menjadi pemenang Pemilu 2009, meraup 21% suara. Dan SBY terpilih menjadi presiden kedua kalinya, masa jabatannya berakhir 2014.

Rekam jejak AAM di masa lalu cukup cemerlang. Dia dosen dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). AAM, tahun 1997, meraih gelar Ph.D di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, AS. Di universitas yang sama, dia meraih gelar Master of Science di bidang sosiologi. Sebelum itu, tahun 1986, Andi menyandang gelar sarjana Ilmu Sosiologi dari Fisipol UGM, Yogyakarta. Sekarang, SBY kehilangan

AAM yang pernah menjabat Jubir presiden, dan Choel.

Demokrat ibarat tembok rapuh yang sedang dihantam "tsunami korupsi." Jadi persoalan Demokrat bukan hanya menyangkut kepengurusan, tetapi yang utama, kepercayaan massa pemilih yang terus terkikis.

Kepercayaan rakyat terkikis sejak terungkapnya skandal mega korupsi Bank Century, menyangkut dana talangan "palsu" Rp 6,7 triliun. Kenapa dibilang palsu? Karena sebagian besar uang tersebut tidak jatuh pada upaya-upaya penyelesaian Bank Century. Voting pleno DPR menetapkan Opsi C - jalur hukum - untuk menuntaskan skandal tersebut.

Namun saat itu, Demokrat masih mampu mengelola "perlawanan semu" mitra koalisi. Sebab perlawanan mereka hanya "gertak sambal" agar SBY tidak gantuk-atik kursi mereka ketika merombak kabinet. Nyatanya, mereka diam setelah kursi kabinet tidak ada yang dikurangi, kecuali terjadi pertukaran sana-sini.

Skandal dana talangan tidak lagi menjadi mimpi buruk Demokrat, meskipun tetap jadi bayang-bayang. Namun, skandal tersebut tampaknya tidak menjadi bahan renungan dan pembelajaran bagi sebagian elite Demokrat. Mereka masih berani menggegeroti uang negara, seperti dana proyek atlet SEA Games dan dana proyek pembinaan olahraga Hambalang yang senilai Rp 2,5 triliun lebih.

Beban SBY Sangat Berat

Pertanyaan pokok yang mengepung SBY: "Mampukah dia mengangkat kembali nama baik Demokrat dari kubangan lumpur korupsi?" Pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan ketika SBY ingin mengangkat kembali reputasi Demokrat, terutama menghadapi Pemilu 2014. Tsunami korupsi tengah memporak-porandakan Demokrat. Jadi wajar jika sejumlah lembaga survei menempatkan Demokrat di urutan ke empat setelah Golkar, PDIP dan Gerindra.

Sementara itu, SBY dihantam badai kritik, bahwa presiden lebih mengutamakan Demokrat daripada kepentingan negara dan rakyat Indonesia. "Kesetiaan pada partai harus ditinggalkan begitu Anda menerima amanah dari rakyat dan negara," demikian komitmen yang sangat melekat dengan Presiden J.F. Kennedy (almarhum). ■ BERINDO - sahbuddin hamzah

Ironi Penegakan Hukum

Mantan Dirut MNA Hotasi Nababan menjadi korban kejahatan mitra bisnis

Wajah Evelin Hutapea, istri Hotasi Nababan, berseri-seri dalam tangis bahagia. Suasana gembira luar biasa merasuk keluarga Hotasi, mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Hotasi divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dipimpin Hakim Ketua Pangeran Napitupulu beserta dua hakim anggota, Alexander Marwata dan Hendra Yosfin.

Pujian meluncur menuju majelis hakim bahwa keadilan masih ada di negeri ini. "Tuhan tidak tidur, hidup hakim," teriak seorang pengunjung. Vonis bebas ini langsung disambut tangis haru bermacam tepuk tangan gembira para kerabat dan rekan Hotasi yang hadir pada sidang tersebut. Anggota keluarga Hotasi berpelukan.

Usai sidang, Selasa siang (19/2) satu per satu anggota keluarga dan rekan Hotasi dari Merpati dan alumni ITB menyalami dan menciumi pipinya tanda ucapan selamat. Pengadilan Tipikor Jakarta pertama kali sejak berdiri tahun 2004, memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Hotasi, tertuduh korupsi pertama yang mendapat vonis bebas.

Hakim anggota Hendra mengajukan *dissenting opinion* (pendapat yang menentang), bersikukuh bahwa Hotasi bersalah, tetapi vonis hakim didasarkan pada suara terbanyak.

Napitupulu menyatakan terdakwa Hotasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan primer dan subsider. Karenanya, majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Hotasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi, melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, jaksa penuntut umum menuntut Hotasi dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta,

subsider kurungan enam bulan.

Hotasi usai sidang mengatakan, keadilan masih ada di negeri ini. Fakta persidangan dan vonis bebas majelis hakim, konsisten dengan pendapat KPK yang pernah menyatakan perkara Hotasi tak layak masuk ranah ko-



Hotasi Nababan di persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan

rsi. Namun, kasus Hotasi ngotot dibawa ke pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Agung.

Hotasi, mantan aktivis pro-reformasi itu mengatakan bahwa dia percaya pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dengan cara-cara yang benar. Karena itu, ke depan sebelum jaksa membawa perkara ke persidangan harus benar-benar mengkajinya dengan cermat dan benar.

Masuknya perkara ini ke Pengadilan Tipikor, karena jaksa di Kejaksaan Agung menganggap ada korupsi yang merugikan negara dalam praktik penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh PT MNA. Pesawat-pesawat tersebut disewa melalui perusahaan penyewaan Third-

stone Aircraft Group (TALG). TALG sendiri menyewa pesawat-pesawat tersebut dari perusahaan East Dover.

Pokok masalah, TALG tidak menepati janjinya untuk mengirimkan kedua pesawat tersebut. Padahal PT MNA sudah menyetorkan dana deposit atau *security deposit* sebesar USD 1 juta kepada TALG melalui kantor pengacara *Hume Associates*. Deposit dana yang seharusnya bersifat bisa dikembalikan, ternyata tidak dikembalikan oleh TALG.

Dana USD 1 juta dollar itulah yang dinilai jaksa sebagai kerugian negara. Kejaksaan akhirnya menyeret Hotasi dan Tony Sudjiarto, mantan General Manager PT MNA dalam perkara ini.

Sampai sekarang, PT MNA masih mengupayakan agar *security deposit* tersebut kembali, dan dalam buku keuangan dicatat sebagai piutang yang harus dikejar. PT MNA juga sudah menggugat TALG di pengadilan Washington DC, Amerika Serikat, dan dimenangkan oleh PT MNA. Namun, Kejaksaan Agung tetap menggulirkan kasus ini ke pengadilan.

Keputusan Bisnis

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan, Hotasi memimpin PT MNA dalam kondisi keuangan yang buruk. Untuk memperbaiki kinerja perusahaan, tak ada pilihan bagi MNA, kecuali menambah pesawat. Maka, pada Rapat Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2006, diputuskan perlu adanya penambahan pesawat, meskipun jenisnya tidak disebut secara eksplisit.

Namun di dalam RKAP, terdapat klausul yang menyebutkan, apabila direksi menganggap perlu, bisa dilakukan penyewaan pesawat tertentu. Karena itu, keputusan untuk menyewa pesawat Boeing tipe 737 seri 400 dan seri 500 menurut hakim tidak melanggar hukum.

Majelis hakim juga mencatat, kece-

patan dan ketepatan mengambil keputusan memang perlu dilakukan oleh jajaran direksi di tengah persaingan yang ketat. Risiko bisnis tidak bisa diabaikan sama sekali, yang diperlukan bagaimana melacak risiko bisnis.

Manajemen PT MNA berusaha memilih untuk mengambil kesempatan memperbaiki kinerja perusahaan, dan majelis hakim menganggapnya itulah keputusan bisnis. Soal *security deposit* yang tidak bisa ditarik lagi oleh PT MNA, majelis hakim memakluminya sebagai risiko bisnis.

“Manajemen telah memitigasi risiko bisnis, tetapi ketika TALG tak punya itikad baik, hal itu bukan di bawah kendali MNA,” kata Napitupulu.

Akibat kegagalan TALG yang tidak bisa mengirim pesawat dan tidak juga mengembalikan *security deposit*, MNA telah mengajukan kasus tersebut ke pengadilan di Washington DC, Amerika Serikat. Hasilnya, TALG dinyatakan telah bertindak Wanprestasi dan mengharuskan TALG mengembalikan *security deposit* beserta bunganya.

Dalam mengambil keputusan bisnis, berdasarkan Undang-Undang Persewaan Terbatas, manajemen MNA dianggap telah memenuhi kriteria memiliki informasi yang dianggapnya benar, tidak memiliki kepentingan, memiliki itikad baik dan dasar rasional.

Majelis hakim berkeyakinan, unsur melawan hukum dalam dakwaan primer tidak terbukti. “Majelis hakim berpendapat, tindakan Hotasi dengan menyewa pesawat tersebut sudah dilakukan hati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur melawan hukum yang dikatakan tidak hati-hati dan tidak berdasarkan prinsip *good governance* tidak terbukti,” kata Napitupulu.

Dakwaan subsider juga tak bisa dibuktikan. Salah satu pertimbangannya, MNA memiliki itikad dengan masih mengupayakan untuk mengembalikan *security deposit*, termasuk memidanakan TALG.

“Majelis hakim tidak melihat adanya niat terdakwa untuk memperkaya TALG dengan *security deposit* sebesar USD 1 juta dollar. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tidak terbukti secara hukum. Karena itu, dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti,” kata Napitupulu.

Lulusan Terbaik

Hotasi telah mengenyam pendidikan terbaik di Indonesia dan juga terbaik di dunia. Dia lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), juga lulus-

an Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rekan-rekan Hotasi sering mengatakan, sebagai lulusan MIT, untuk mencari uang USD 1 juta, seperti yang dituduhkan jaksa nilai kerugian negara, bagi Hotasi sangat mudah. Karena itu, korupsi hanya USD 1 juta bagi Hotasi dianggap tidak masuk akal.

Hotasi sempat membuat pleidoi pribadi setebal 38 halaman. “Membuat pleidoi atas perkara korupsi, pekerjaan yang sulit, karena kita sendiri dan masyarakat sedang marah kepada korupsi,” katanya.

Merpati berusaha meremajakan armadanya dengan menyewa sejumlah pesawat tipe Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Kontrak sewa pesawat dengan pihak lain umumnya berjalan lancar. Kalaupun ada yang gagal, *security deposit* dikembalikan kepada Merpati. Kata Hotasi, hanya satu kontrak yang gagal dan *security deposit* tidak dikembalikan, yaitu kontrak dengan TALG. Perkara inilah yang kemudian menyeret Hotasi dan direksi Merpati lain menjadi tersangka kasus korupsi.

Pengadilan, 8 Juli 2007, memenangkan gugatan Hotasi dan memerintahkan TALG mengembalikan uang deposit sebesar USD 1 juta beserta bunganya. “Namun, pemilik TALG berusaha menghindari pengembalian deposit dan mengulur waktu agar masa kadaluarsa perkara berakhir,” kata Hotasi.

Sebelumnya, Merpati setuju menyetor deposit, karena ketika dilakukan pengecekan, TALG memiliki aset yang meyakinkan. Kantornya berada di kawasan elite Washington DC. Demikian juga dengan Hume Associates, yang menampung dana deposit, kantor hukum yang meyakinkan.

Pemilik TALG, Alan Messner adalah mantan Vice President Investment dari BCI Aircraft Leasing di Chicago, sebuah perusahaan *leasing* besar. Mitra Messner, Jon Cooper, profesor hukum yang memiliki lebih 30 tahun pengalaman sebagai pakar hukum lingkungan, pengacara, akademisi, dan penasihat Pemerintah AS dan Bank Dunia.

TALG juga memberikan surat pernyataan *security deposit* bersifat bisa dikembalikan lagi (*refundable*) jika TALG gagal menyediakan pesawat. Uang deposit diamankan di pihak ketiga, yaitu firma hukum Hume Associates, sesuai hukum *Safekeeping Property* (penyelamatan aset) di Amerika Serikat.

TALG sebenarnya hanya broker penyewaan pesawat, tetapi dalam persidangan terungkap bahwa peran broker sudah menjadi kelaziman bisnis. Pemilik asli pesawat yang

disewakan adalah East Dover. Untuk meyakinkan, TALG telah melengkapi diri dengan perjanjian antara TALG dan East Dover.

Setelah mengirim deposit, Tony Sudjiarto, waktu itu General Manager MNA, berangkat ke AS dan melakukan inspeksi atas Pesawat Boeing 737-500 di Victorville, AS. “Hasil inspeksi menunjukkan pesawat dalam keadaan prima dan siap dikirim. Saat itu kami yakin TALG akan memenuhi komitmennya,” kata Hotasi.

Namun, setelah ditunggu tiga pekan dari tanggal penyerahan 5 Januari 2007, TALG tidak dapat menyerahkan pesawat itu. Mereka mengirim *e-mail*, menjelaskan alasan penundaan itu karena harga sewa harus dinaikkan.

Merpati akhirnya membatalkan kontrak dan langsung meminta pengembalian dana deposit. Namun, permintaan tak ditanggapi positif. Maka, Maret 2007, Merpati mengajukan gugatan kepada TALG. Merpati memenangkan gugatan, 8 Juli 2007.

Hotasi merasakan ironi bagi penegekan hukum di Indonesia dan di AS. Di AS, pengadilannya menyidangkan warganya sendiri yang telah menggelapkan dana deposit demi tegaknya hukum bisnis yang berlaku. Di Indonesia, tempat BUMN kehilangan uang negara, justru menyidangkan perkara perdata ini ke ranah tindak pidana korupsi.

Jika deposit Merpati dianggap uang negara, kejaksaan sebagai pengacara negara seharusnya wajib berupaya keras mengejar pengembalian uang tersebut. Kejaksaan dapat bekerja sama dengan Interpol dan KBRI.

“Namun, tampaknya kejaksaan lebih mudah memidanakan saya dan Pak Tony sebagai sumber masalah yang terjadi daripada bekerja keras mengejar uang itu,” kata Hotasi.

Jika kejaksaan tidak berbuat apa-apa dan keputusan pengadilan AS melepaskan Jon Cooper, di saat itulah kerugian negara telah terjadi. “Jika kami diputuskan bersalah akibat kelalaian yang disengaja, mereka dapat menggunakan pidana korupsi sebagai hal yang meringankan Jon Cooper,” papar Hotasi.

Hotasi merasa menjadi korban kejahatan dua warga negara AS itu, tetapi dijadikan pesakitan dan dipermalukan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi oleh kejaksaan di negeri sendiri. Sedangkan kejaksaan AS memidanakan kedua warga negaranya. “Saya dan Pak Tony, serta rekan mantan Direksi dan Merpati sendiri, jadi korban kejahatan orang lain,” kata Hotasi. ■ mbi/sh

Agus Martowardojo

Calon Tunggal Gubernur BI

Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang pernah ditolak DPR tahun 2008, kembali diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Apakah Presiden tengah memainkan 'kartu politik' mengukur pengaruhnya di DPR dengan mempertaruhkan nama pembantunya itu?

Entah apa pertimbangan Presiden SBY mengajukan kembali Agus Martowardojo yang kini menjabat Menteri Keuangan tersebut. Pencalonan Agus yang ditunjukkan dalam surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirimkan Jumat malam, 22 Februari 2013, itu sungguh di luar perkiraan pengamat ekonomi, kalangan bankir, maupun anggota DPR.

Justru nama Gubernur Bank Indonesia saat ini, Darmin Nasution, yang sebelumnya santer disebut-sebut sebagai calon paling kuat. Nama Agus luput dari perkiraan banyak pihak. Pengajuan nama Agus semakin mengejutkan karena dia baru saja diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Hambalang untuk tersangka mantan Menpora Andi Mallarangeng. Hal mana Rizal Mallarangeng berulang kali menggelar konferensi pers yang menyebut Agus semestinya bertanggung jawab dalam pencairan dana proyek Hambalang tersebut. Sebab Agus sebagai Menteri Keuangan mencairkan dana triliunan tanpa tanda tangan Menpora dan Menteri PU dalam pengajuannya.

Memang, Agus hanyalah saksi bukan tersangka. Sehingga pengajuannya sebagai calon tunggal Gubernur BI tidak menyalahi aturan apa pun. Agus sendiri semula tidak menduga namanya akan diajukan Presiden. Dia malah sempat menyatakan bahwa Darmin Nasution layak dipertimbangkan kembali sebagai calon gubernur BI. Menurut Agus, integrasi dan koordinasi Kementerian Keuangan dengan BI berjalan dengan kompak di masa kepemimpinan Darmin. Sinergi kebijakan antarkedua instansi tersebut sangat solid.

Pengajuan nama calon tersebut terkait masa jabatan Darmin Nasution sebagai gubernur BI sudah akan berakhir pada 22 Mei 2013. Sesuai ketentuan, tenggat waktu penyampaian nama calon adalah tiga bulan sebelum masa jabatan gubernur BI berakhir.

Pada tahun 2008 silam, Presiden SBY



pernah mengajukan Agus bersama Raden Pardede sebagai calon Gubernur BI, namun setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna. Kemudian, SBY mengajukan Boediono sebagai calon tunggal Gubernur BI.

Tampaknya Presiden sedang 'memainkan kartu politik' untuk menjajal pengaruhnya di DPR dengan mempertaruhkan nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sebab, sebenarnya Presiden mempunyai pilihan yang amat banyak yang punya kompetensi menjabat Gubernur BI setara dengan Agus, bahkan mungkin lebih dapat diandalkan untuk mengendalikan bank sentral.

Misteri 'kartu politik' ini akan segera terjawab setelah DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam waktu dekat. Apakah DPR akan meloloskannya atau tidak. Saat ini sudah mulai beragam pandangan di kalangan anggota DPR soal pencalonan Agus tersebut.

Siapakah Agus sehingga Presiden SBY gigit mencalonkannya kedua kali untuk menduduki jabatan Gubernur BI? Bukankah dia saat ini masih menjabat Menteri Keuangan, sebuah jabatan penting dalam pemerintahan Presiden SBY?

Agus bernama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo lahir di Amsterdam, Belanda 24 Januari 1956. Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1984, ini juga telah menyelesaikan kursus perbankan, manajemen dan kepemimpinan di banyak institusi dalam dan luar negeri, antara lain Banking & Management Courses State University of New York, Stanford University dan Institute of Banking & Finance, Singapura.

Karir perbankannya diawali sebagai staf International Loan di Bank of America, cabang Jakarta. Kemudian tahun 1986 pindah ke Bank Niaga, menempati posisi Wakil Presiden Corporate Banking, Banking Group Head. Kariernya terus menanjak pada 1995 menjadi Presiden Direktur PT Bank Bumiputera. Tahun 1998 menjadi Presiden Direktur PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Lalu, 1999-2002, menjabat Direktur Bank Mandiri, sebuah bank BUMN terbesar.

Setelah itu, pada Oktober 2002, dia sempat menjabat sebagai Penasihat Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Indonesia). Kemudian dipercaya sebagai Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk. (hasil merger PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Ekspres, Bank Media dan Bank Patriot) yang ditangani oleh BPPN.

Selepas itu, dia pun menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2005 sampai 17 Mei 2010. Saat itu, dia mendapat kehormatan sebagai Eksekutif Indonesia Terbaik oleh AsiaMoney dan menerima penghargaan *Leadership Achievement* dari *The Asia Banker* tahun 2006, Top Banker 2007 dari *Majalah Investor*, CEO Terbaik 2008 dari *majalah Warta Ekonomi* dan Eksekutif Bankir Top oleh *Majalah Investor* 2008. Saat menjabat Direktur Utama Bank Mandiri tersebut, dia dicalonkan Presiden SBY untuk menjabat Gubernur BI, namun ditolak DPR. Namun, kemudian pada Mei 2010, dia dilantik Presiden SBY menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang 'terdesak' akibat kasus Bank Century dan menjadi Managing Director Bank Dunia.

Dalam bidang organisasi, dia pernah menjabat Ketua Asosiasi Bankir Indonesia dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Juga menjadi Advisor Asosiasi Perbankan Indonesia dan Ketua Himpunan Bank Umum Nasional Swasta (Perbanas) serta Ketua Bankers Club Indonesia. Desember 2008, menjadi anggota Dewan Kadin Indonesia untuk periode 2008-2013. ■ ti-tsl

OBITUARI TARMIZI TAHER

Pembentuk Dana Abadi Umat



Dr. Tarmizi Taher, Laksamana Muda TNI (Purn) adalah Menteri Agama Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) yang berinisiatif membentuk Dana Abadi Umat (DAU) serta yang pertama kali mengembangkan Sistem Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat). Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (2006-2011) ini lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Oktober 1936 dan meninggal di Jakarta, 12 Januari 2013.

Tarmizi Taher adalah anak dari pasangan Taher Marah Sutan (ayah) dan Djawanis (ibu). Ayahnya seorang pendiri Serikat Usaha dan menjadi agen perkapalan di Pelabuhan Teluk Bayur. Sedangkan kakeknya, Tengku Syekh Sabir adalah seorang ulama terkenal dari Batusangkar. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1964, dia mengawali kariernya di TNI Angkatan Laut (AL) sebagai Perwira Kesehatan di KRI Irian.

Kemudian, dia pernah menjabat Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut dan Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI. Pada saat yang sama dia merangkap Anggota MPR dari Fraksi ABRI (1977-1982 dan 1982-1987) dan menjabat Juru Bicara Fraksi ABRI di MPR. Selama karier militer, dia mengikuti beberapa pendidikan di antaranya Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI AL dan Pendidikan di US Navy (Angkatan Laut Amerika Serikat) di bidang kesehatan.

Setelah dua periode menjadi Anggota MPR dan Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI, pensiunan Laksamana Muda TNI ini kemudian dipercaya menjabat Sekjen Departemen Agama (1988-1993). Lalu, diangkat menjadi Menteri Agama Kabinet Pembangunan VI menggantikan Munawir Sjadzali pada 17

Maret 1993 hingga 14 Maret 1998, lalu digantikan oleh Quraish Shihab. Selepas menjabat menteri, dia ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Norwegia yang berkedudukan di Oslo (1998-2004). Setelah pulang ke tanah air, Tarmizi Taher mengabdikan diri sebagai Rektor Universitas Islam Az-Zahra, Jakarta (2004-2008) dan menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2006-2011. Ia pun dianugerahi doktor honoris causa di bidang dakwah oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dia menikah dengan Hj. Djusma dan dikaruniai empat orang anak, tiga laki-laki dan satu perempuan, yakni Afgan, Sakina, Halbana dan Digantoro. Dia meninggal dunia pada Selasa, 12 Januari 2013, pukul 04.15 pagi di RSCM Jakarta. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka Jalan Merbau No 1, Kompleks Angkatan Laut (AL), Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara militer. Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Presiden RI. ■ ti-tsl

Feisal Tanjung: ABRI-Islam Mitra Sejati



Feisal Tanjung, Jenderal TNI (Purn), mantan Panglima ABRI (1993-1998) dan Menkopolkam (1998-1999), kelahiran Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 17 Juni 1939. Penulis buku 'ABRI-Islam Mitra Sejati' ini meninggal dunia di RS Siloam, Jakarta, sekitar pukul 06.25 WIB, Senin 18 Februari 2013.

Feisal Tanjung adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1961. Kemudian semasa berdinastikan di militer pernah mengikuti berbagai pendidikan baik di dalam maupun luar negeri antara lain: Suslapa Infanteri (1977), Lemhannas (1982), Sesko di Jerman Barat (1975) dan IDMC (*International Defence Management Course*) di USA (1981).

Feisal mulai meniti karier militer sebagai Dan Ton 1 Kie 2 Kodam XV/Pattimura. Kemudian menjadi Dan Kie RPKAD, Dan Group 1 RPKAD, Dosen Seskoad (1972), Kas Brigif

Linud 17 Kostrad, Dan Brigif Linud 17 Kostrad, Asops Kas Kostrad, Kas Kopus Linud Kostrad, Pangkopur Linud Kostrad, dan Dan Pusenif (1983-1985).

Pada 1985, dia diangkat menjadi Pangdam VI/Tanjungpura, lalu dimutasi menjabat Dan Seskoad (1987-1992). Kariernya melejit setelah pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena adanya tragedi kerusuhan di Santa Cruz, Dili, Provinsi Timor Timur, 12 November 1991 yang diributkan pihak luar. Pengangkatan Feisal sebagai Ketua DKP sangat mengejutkan, karena Panglima ABRI Jenderal Edi Sudrajat tidak merekomendasikan namanya dalam pembentukan DKP.

Setelah itu, dia diangkat menjabat Kasum ABRI (1992). Lalu mencapai puncak karier militer dengan menjabat Panglima ABRI tahun 1993-1998. Semasa Feisal menjabat Pangab, berkembang rumor penggolongan ABRI Hijau, ABRI Pelangi dan ABRI Merah Putih. ■ ti-tsl

Suryadharma Ali

Doktor HC Epistemologi Kajian Islam

Menteri Agama Suryadharma Ali mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang Epistemologi Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, dalam sidang senat terbuka yang dipimpin rektornya, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Sabtu (23/2/2013).

tau sepak terjang dan berbagai pernyataannya melalui media massa. Khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. SDA tidak mendikotomikan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. SDA justru mendorong terjadinya integrasi dua bidang ilmu tersebut. Karena itu, para santri di pondok pesantren, misalnya, didorong untuk belajar ilmu fisika dan kedokteran.

SDA menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Epistemologi Kajian Islam Indonesia: Memperluas Kajian Islam, Menjawab Tantangan Perubahan. Promovendus Suryadharma Ali mengatakan, pendidikan harus diawali dengan kajian Al-Quran. Tidak sekadar membaca, tapi kajian Al-Quran itu dimaksudkan untuk digali makna filosofis epistemologi keilmuan. Mulai dari ontologi, epistemologi, sampai aksiologi hingga dapat dijadikan dasar dan alat untuk melakukan observasi dan eksperimen.

“Jadi bukan mencari ilmu untuk membenarkan isi Al-Quran, tetapi mengkaji filosofi Al-Quran untuk dasar dan alat melakukan observasi dan kajian. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Paradigma keilmuan itu tentu berbeda dengan paradigma Barat yang umumnya berangkat dari pengamatan, observasi, kemudian mengambil beberapa kesimpulan, baik secara induktif maupun deduktif,” kata SDA.



Promovendus Drs. H. Suryadharma Ali M.Si bersama Rektor UIN Malik Ibrahim Malang



Pemberian gelar penghormatan akademik tersebut, menurut Rektor UIN Malik Malang Prof Dr Imam Suprayogo didasari atas dedikasi SDA terhadap pengembangan keilmuan dalam

pendidikan Agama Islam di Tanah Air. Menurut Imam, SDA telah membuka cakrawala pendidikan di Indonesia. Hal itu terlihat dari berbagai pernyataannya melalui media massa bahwa pondok pesantren pun bisa bersinergi dengan ilmu yang berkaitan nuklir guna mendukung pengembangan teknik pertanian, sehingga ke depan para santri bisa hidup mandiri.

Rektor UIN Malik mengatakan SDA bukanlah ilmuwan politik, tetapi ia mampu memimpin partai politik seperti PPP sekarang ini, dan untuk urusan pendidikan, dia telah membuka cakrawala baru bagi para ulama untuk memajukan para santri. Ke depan, gagasan SDA dapat dijadikan kekuatan untuk memajukan pendidikan di Tanah Air. Ia telah meletakkan konsep dan inspirasi bagi para pendidik. Gagasan dari SDA sebetulnya

jika ditangkap dengan baik oleh para ulama, maka ke depan akan membawa perubahan bagi peradaban Islam.

Sejak Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama, pihak UIN Malik Malang terus menerus memaman-



Para undangan sedang mendengarkan orasi ilmiah dari Promovendus, di antaranya Syaykh Al-Zaytun duduk bersebelahan dengan KH Iskandar SQ dari Pesantren As-Syidiqiyah



UCAPAN SELAMAT: SDA didampingi isteri, Ibu Indah Suryadharna, menerima ucapan selamat dari para tokoh di antaranya Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang atas penganugerahan gelar Doktor HC di UIN Malik Ibrahim Malang

Bertindak selaku promotor Prof. Dr. M. Amin Abdullah dari UIN Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Azhar Arsyad dari UIN Alauddin Makassar, dan Prof. Dr. H. Muhaimin dari UIN Maliki Malang. Sidang senat terbuka tersebut dihadiri seribu-an undangan antara lain Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang, KH. Iskandar SQ dari Pesantren As-Syidiqiyah, Wakil Menteri Agama Prof. Dr Nasarudin Umar, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf, Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maemun Zubair, Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP

Hasrul Azwar, Sekretaris Fraksi PPP M Arwani Thomafi, Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani, para pejabat Kementerian Agama dan sejumlah tokoh lainnya.

SDA lahir di Jakarta pada 19 September 1956. Jejak rekam akademiknya untuk jenjang Strata 1 diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1983) dan Strata 2 di Universitas Indonesia (2003). Jenjang SLTP di Pondok Pesantren Darul Qalam, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (1974). Jenjang SLTA di Pendidikan Guru Agama (PGA) Pondok Pesantren al-Falah, Pagentongan, Bogor, Jawa Barat (1979).

Dia mengawali karirnya di PT. Hero (1985-1999). Dia terjun ke dunia politik sejak 1999 sebagai anggota majelis pakar PPP. Pada 2001 hingga 2004 menduduki posisi sebagai Ketua Komisi V DPR RI, merangkap Bendahara Fraksi PPP MPR RI.

Kemudian, tahun 2007 dia terpilih menjabat Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Haz. Dia menjabat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) sebelum menjabat Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

■ mbi/bhs-abdul halim



Wamen Prof. DR Nasarudin Umar berbincang-bincang dengan Syaykh Panji Gumilang



Rektor UIN Malik Ibrahim Malang Prof Dr Imam Suprayogo bersalaman dengan Syaykh Al-Zaytun



Syaykh Al-Zaytun AS
Panji Gumilang

Koperasi Desa Kota:

Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, telah berdiri Koperasi Serba Usaha Desa Kota (Koperasi Desa Kota) yang berpusat di Desa Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, sebagai wadah ekonomi bersama untuk menggerakkan desa menjadi sumber petani yang kaya dan kota menjadi konsumen pertanian yang gagah.

Peresmian koperasi ini bersamaan dengan panen perdana padi unggul Simisuda (Sigromilir Suryadharna Ali) dan peresmian IAI Al-Azis (Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia) oleh mantan Menteri Koperasi dan UKM yang kini menjabat Menteri Agama Drs. Suryadharna Ali di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kampus Al-Zaytun.

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang menjelaskan makna nama koperasi tersebut yakni Koperasi Desa Kota sebagai wadah ekonomi masyarakat desa (petani) dengan masyarakat kota (konsumen). "Kita namakan Koperasi Desa Kota. Maka nanti anggotanya orang desa juga orang kota. Jangan pernah dipisahkan," jelas Syaykh Panji Gumilang.

Sekarang ini, kata Syaykh, orang desa menjadi lambang ketidakkmajuan, dan orang kota juga jadi lambang ketidakberesan budaya. Maka, melalui wadah koperasi ini, kata Syaykh Panji Gumilang, mari kita buat desa menjadi sumber petani yang kaya dan kota menjadi konsumen pertanian yang gagah.

Syaykh mengutip semboyan (ajaran) Konghucu: *Nong Fu Kuo Chiang* (petani kaya negara kuat). Demikian juga ajaran Nabi Muhammad SAW: Petani pemilik negara, siapa melupakan pertanian menghancurkan negaranya sendiri. Menurut Syaykh, kekuatan sesuatu negara akan sangat kokoh bila petaninya kaya. "Kalau pedagang kaya, negara belum tentu kuat. Apalagi kalau pejabat dan pegawai negeri kaya, negara pasti tidak kuat. Tapi kalau petani kaya negara pasti kuat. Karena petani tidak korupsi dan tidak akan membawa modal dasarnya ke mana-mana kecuali di negaranya sendiri," ujar Syaykh Al-Zaytun dalam beberapa kesempatan. Sebaliknya, bila petani miskin, kekuatan sesuatu negara akan sangat lemah.

Jadi menurut Syaykh Panji Gumilang, *image* petani miskin harus diubah menjadi petani yang makmur dan kaya serta terhormat. Untuk itu, menurut Syaykh Al-Zaytun, selain perlu ada penataan kembali masalah pertanian yang difasilitasi oleh negara, juga perlu membangun sinergi antara petani dengan masyarakat kota

sebagai konsumen hasil pertanian.

Syaykh menegaskan wadah ekonomi Koperasi Desa Kota ini juga merupakan salah satu usaha sadar dan sistematis untuk menumbuhkan keyakinan bahwa bertani bukan suatu simbol kehinaan, melainkan bertani adalah simbol kedigdayaan.

Saat ini, ungkap Syaykh, petani Indonesia sering disebut kelompok kelas bawah, kaum marjinal atau kaum kecil yang terpinggirkan. Timbul *image* di kalangan pemuda, termasuk



Kaya dan Gagah

pemuda anak petani, bahwa bertani berarti akan menjadi orang miskin, hina, tidak terhormat. Petani dianalogikan sebagai buruh tani, petani gurem, orang-orang miskin dan hina. Sehingga orang tua mereka juga berpesan: 'Bersekolah, agar jangan menjadi petani seperti bapak.'

Menurut Syaykh Panji Gumilang, *image* petani miskin inilah yang harus diubah menjadi petani yang makmur dan kaya serta terhormat. Sehubungan dengan itu, Syaykh Panji Gumilang menghimbau agar masyarakat desa (yang mayoritas petani)

dan masyarakat kota segera mendaf-tarkan diri bersatu padu dalam wadah ekonomi bersama Koperasi Desa Kota ini menuju kesejahteraan bangsa.

Salah satu bentuk konkrit dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (petani), saat ini tanah-tanah milik Yayasan Pesantren Indonesia, telah mulai digarap sendiri bersama rakyat lingkungan dengan cara bagi hasil. "Kita meminjamkan modal pada penggarap tanpa memberikan beban bunga. Diambilnya setelah panen. Padi dibagi dua, kemudian yang meminjam modal dipu-

PETANI KAYA: Syaykh mengutip semboyan (ajaran) Konghucu: *Nong Fu Kuo Chiang* (petani kaya negara kuat). Demikian juga ajaran Nabi Muhammad SAW: Petani pemilik negara, siapa melupakan pertanian menghancurkan negaranya sendiri.



langkan setelah panen," jelas Syaykh.

Kemudian seluruh hasil masuk ke Istana Beras. Syaykh mengatakan beras itu harus disimpan di istana beras, jangan lumbang. "Lumbang itu tidak terlalu gagah. Tapi harus istana beras. Jadi cuma dua yang tinggal di istana yakni raja dan beras. Beras yang untuk kepentingan pangan harus dijunjung tinggi, ditempatkan di Istana Beras," kata Syaykh.

Lalu, para petani yang membutuhkan beras dan telah menjadi anggota koperasi, tinggal mengambil dengan mengajukan permohonan. Dengan cara ini, keperluan beras untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik masyarakat petani (desa) maupun masyarakat kota, akan terjamin. Hal ini dimaksudkan agar petani tempatan mengubah kebiasaan yang kurang baik selama ini yakni dengan mudahnya menjual beras pada saat panen, tetapi kemudian menjadi kekurangan beras (lapar). "Tidak punya uang untuk membeli beras. Anak nangis. Kalau hanya ditangisi satu orang anak, kita masih bisa lari ke luar. Nah, kalau semua anak nangis nggak makan, apa jadinya," ungkap Syaykh mengingatkan petani setempat.

Maka, Syaykh mengingatkan bahwa beras harus disimpan di Istana Beras. "Sebab semakin banyak beras, maka uang pun akan semakin banyak pula," jelasnya. "Jangan takut tidak makan. Beras kita tanam sendiri. Kita punya beras dan makan sendiri, rasanya jauh lebih enak daripada membeli. Membeli itu katanya enak, tapi tatkala kantong sedang kosong, pahit. Nasi itu jadinya pahit. Tidak percaya? Jangan pernah mencoba untuk tidak bisa membeli beras. Maka Syaykh paling takut ditangisi santri karena nggak makan, nggak makan itu sakit," urai Syaykh.

Maka Syaykh sangat merisaukan kondisi Indonesia, sebuah negara agraris, tanahnya subur dan sumber daya alamnya kaya, serta sebagian besar (70%) rakyatnya adalah petani yang tinggal di desa, tapi, ironisnya, masih terus mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya. Petaninya miskin, bahkan masih ada yang busung lapar. Menurut Syaykh, negara 'kaya raya' ini ternyata sangat lemah, karena petaninya miskin dan konsumen pertaniannya (masyarakat kota) juga tidak gagah. ■ Berindo - crs

Semestinya, Tidak Ada Kelapa



Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tanahnya subur serta alam dan iklimnya selalu mendukung, namun masih sering dijumpai masyarakat yang kekurangan pangan bahkan tak sedikit yang mati kelaparan. Apa penyebabnya?

Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang yang sangat perhatian pada setiap upaya pencapaian ketahanan pangan mengatakan semestinya tidak ada bahasa kelaparan di Indonesia. “Sesungguhnya di Indonesia tidak boleh terjadi kekurangan pangan, sebab alam Indonesia dalam kondisi apa pun selalu mendukung,” katanya. Memang, kata Syaykh Al-Zaytun, Indonesia memiliki alam yang mempunyai

ran di Indonesia



P3KPI: Tanaman padi yang terletak di lahan sawah milik Yayasan Pesantren Indonesia tumbuh subur. Penggarapan sawah milik Yayasan dikerjasamakan bersama masyarakat lingkungan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indramayu (P3KPI)

potensi banjir, potensi kekurangan air, potensi penyakit, dan potensi hama. Namun, semua itu bukan penghalang, karena Indonesia mempunyai lahan cukup, keterampilan petani cukup, dan bibit padi lokal juga cukup.

Lalu, mengapa masyarakat Indonesia masih ada yang kelaparan? Syaykh Panji Gumilang menyebut

beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya, sudah tidak ada proteksi pada hasil pertanian sehingga petani dibiarkan terjun bebas dan jatuh dalam cengkeraman tengkulak. Sebenarnya, menurut Syaykh, pemerintah itu cukup mengatur saja para petani Indonesia yang memang sudah pintar saat ini. Hanya saja, hasil pertaniannya semestinya di-

protek sedemikian rupa.

“Sekarang ini sudah tidak ada proteksi, sehingga petani terjun bebas, ke air bah pula, atau terjun bebas ke api (kebakaran), dibiarkan tanpa proteksi sama sekali. Dia memberi contoh, apa yang selalu disaksikannya di lingkungan Al-Zaytun (Indramayu), begitu panen tiba sudah diserbu tengkulak. Para tengkulak itulah yang menentukan harga dan sebagainya. Petani tidak berdaya untuk ikut menentukan harga. Sama sekali tidak ada proteksi kepada petani. Semestinya, pemerintah (Bulog) memproteksi, antara lain, dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan petani.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, kini harga pasar beras semestinya telah menguntungkan petani. Sebab, harga beras sudah hampir dua kali lipat atau lebih dari dua kali lipat harga BBM. Harga bensin Rp 4.500 per liter, harga solar Rp 4.500 per liter, harga beras yang ecek-ecek (berkualitas rendah) sudah Rp 9.000 per kg di pasaran. Harga beras yang berkualitas lebih baik sudah di atas Rp.10.000 per kg. Tapi, kata Syaykh, ternyata harga itu bukan milik petani. “Andainya harga ini dimiliki oleh petani, maka daya beli petani akan sangat besar. Sayangnya, harga beras meningkat tetapi harga itu tidak sepenuhnya dimiliki petani. Justru para perantara dan para tengkulak yang memiliki perhitungan yang lebih,” keluh Syaykh. Jadi, kata Syaykh diperlukan proteksi untuk menjamin daya beli petani terus meningkat.

Syaykh Panji Gumilang menekankan betapa mutlak perlunya para petani itu harus diperhatikan, karena petani yang mempersiapkan pangan itu. “Kalau dalam bahasa pepatahnya, *Al fallah sayyid al bilaad*, petani itu sesungguhnya tuan negara ini, tuan suatu negara. Dalam pepatah China, *Nong Fu Kuo Chiang* (petani kaya negara kuat),” tegas Syaykh.

Selain itu, kata Syaykh, tata kelola pendistribusian hasil panen pertanian ke seluruh penduduk Indonesia juga semestinya diperbaiki. Menurutnya, tatkala distribusi tercapai (menjangkau seluruh pendu-



Para petani sedang membersihkan gulma pada lahan garapannya atau ngoyos.

duk), kelaparan itu sudah tidak ada lagi. Di samping itu, perlu juga semakin diintensifkan sosialisasi konsumsi aneka ragam makanan. “Jadi makanannya itu ada keanekaragamannya, diversifikasinya banyak, bisa ubi, singkong, kedelai atau kacang-kacangan dan lain-lain,” jelasnya. Dengan demikian para petani bisa menanam yang lainnya, misalnya, pisang, ubi, singkong, jagung dan lain sebagainya. “Umpamanya, di pematang ditanami jagung, belum panen padi, kita panen jagung. Talas bisa bersamaan waktunya dengan padi, habis panen padi kita panen talas. Di sudut-sudut petakan sawah ditanam pisang, sebagaimana yang kita praktikkan di Al-Zaytun ini,” Syaykh menjelaskan.

Syaykh Panji Gumilang memberi gambaran tentang lahan potensial untuk menghasilkan pangan, khususnya padi di Indonesia. Lahan yang dimiliki Indonesia itu lebih 11 juta hektar, yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta pulau yang lain. Saat musim rendeng atau musim penghujan di Indonesia hampir bersamaan waktunya antara Indonesia bagian Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Katakanlah musim hujan dimulai dari November sampai April. Enam bulan mempunyai potensi air yang tanpa dialirkan, tanpa digali sudah mencukupi. Air hujan ini cukup untuk bertanam pangan.

Menurut Syaykh, seandainya lahan yang ada, tidak usah 11 juta hektar tetapi 90 persen



atau 80 persen saja yang ditanami padi, maka ada 8,8 juta hektar. Ini sudah menakjubkan, sekali tanam saja serentak seluruh Indonesia. Jangan dulu cerita tiga kali tanam. Kemudian konsumen beras Indonesia ini semuanya hampir 250 juta dengan rata-rata 0,135 ton per kapita. Jika dihitung, $0,135 \times 250$ juta, maka diperlukan beras 33.750 juta ton per tahun.

Semestinya, kata Syaykh Panji Gumilang, bangsa Indonesia ini sudah harus menekan konsumsi beras, jangan sampai memakan beras sebegitu besar. Mengapa kita menganjurkan konsumsi beras ini harus ditekan? Dia mengambil contoh di Al-Zaytun, misalnya dengan jumlah 4.200 orang, setiap hari mengonsumsi beras 1.100 kg, berarti per kapitanya 262 gr per hari, atau 96 kg per tahun. Jumlah itu sudah layak dan cukup, semuanya bisa beraktivitas

secara penuh. Tentu saja ada makanan-makanan lain, maka di sini (Al-Zaytun) ditanam banyak tanaman. Jadi, kalau mengambil contoh di Al-Zaytun ini, dengan per kapita hanya memakan 96 kg per tahun, maka kebutuhan beras Indonesia setiap tahunnya hanya 24 juta ton. Bisa berkurang sekitar 10 juta ton.

Lalu, Syaykh memberi contoh sederhana. Jika dihitung, per bahu (1 bahu=7000 m²) menghasilkan padi sekitar 4 ton, kemudian digiling menjadi beras menghasilkan 2.120 kg. Atau jika dihitung per hektarnya akan menghasilkan 3.028 kg beras. "Nah, jika kebutuhan beras bangsa Indonesia 24 juta ton, katakanlah 24 juta dibagi 3 ton saja (beras bersih), hanya diperlukan lahan 8 juta ha. Dan itu hanya sekali tanam. Dengan ini saja, semestinya sudah tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kelaparan," ujarnya.

Dia meyakini hal itu berdasarkan pengalaman yang ada di Al-Zaytun. Sampai detik ini, ada 406 bahu, atau sama dengan 285 ha lahan Al-Zaytun yang ditanami padi. Ternyata sudah bisa memenuhi hajat makan di Al-Zaytun. "Jadi mengatasi pangan seperti itu. Dengan perhitungan matematika dan praktik seperti yang kita jalankan di Al-Zaytun, tidak ada lagi kelaparan. Bahkan, memiliki surplus. Itu kita belum berbicara tanam kedua, bahkan kalau mungkin bisa tanam tiga kali. Kalau kita bicarakan tanam kedua, itu kelebihanannya. Tentu hasilnya tidak seperti musim rendeng, kecuali yang mempunyai air dengan irigasi cukup. Kemudian di musim ketiga, bisa ditanami tanaman yang lain, yang hasilnya bisa untuk tambahan *snack*. Jadi tidak ada bahasa kelaparan di Indonesia. Semestinya begitu," jelas Syaykh Panji Gumilang.





SIGROMILIR:
Potensi bulir
Sigromilir 1,
sebanyak 350
sampai 500.
Sementara,
Sigromilir 2,
berlebih, 200
sampai 250 bulir
dibandingkan
sigromilir 1

Dengan kalkulasi ini, seharusnya Indonesia tidak mengalami kekurangan pangan. Tetapi mengapa Indonesia sampai saat ini masih mengimpor beras? “Ya memang sengaja ingin impor. Padahal apa yang dilakukan oleh Al-Zaytun kalau dijadikan sampel, itu sudah cukup,” katanya.

Televisi Pertanian Indonesia

Menurut Syaykh, kalau melihat besarnya konsumsi per kapita 0,135 kg, berarti bangsa kita tidak makan makanan yang lain-lainnya, hanya makan beras. Sedangkan perut perlu adanya pelbagai asupan. Jadi perlu disosialisasikan harus ada makanan lain, goreng pisang, goreng ubi, goreng singkong, goreng talas, kacang rebus, kedelai rebus dan lain sebagainya yang bisa mengenyangkan, menguatkan, menyehatkan. Kalau tidak mau digoreng atau direbus bisa dibikin kue.

Untuk menanamkan kesadaran ini, menurutnya, semestinya negara memberikan informasi yang cukup untuk membantu petani. “Kalau dahulu memberikan penyuluhan melalui penyuluhan lapangan, PPL di setiap kecamatan, bahkan ada yang di desa, alangkah baiknya sekarang diganti dengan Televisi Pertanian Indonesia yang memberikan informasi tentang pertanian. Kalau ada iklan, ya iklan pertanian. Mengudara 24 jam, karena waktu kita itu ada tengah, timur dan barat. Nah itu akan memberikan informasi bagaimana cara makan yang baik, cara tanam padi yang baik, mengonsumsi selain beras. Menanam padi di lahan tumpang sari. Kalau diberikan percontohan semua akan berjalan,” kata Syaykh yakin.

Menurutnya, petani kita itu sudah pintar-pintar. Dia menegaskan, Televisi Pertanian Indonesia itu bisa diterbitkan oleh negara. Sekarang ini, katanya, TVRI sudah tidak mendukung untuk program pertanian, karena TVRI sekarang isinya campuran. “Kalau perlu TVRI diganti TV Pertanian saja. Pertanian dan berita. Beritanya internasional,” saran Syaykh.

Kelompok Tani

Dalam rangka memperkuat posisi petani, baik dalam proses produksi maupun pengolahan dan pemasaran hasil panen pertanian, Syaykh Panji Gumilang menyarankan perlunya petani dikoordinasikan. Diadakan kelompok tani yang betul-betul kelompok tani. Kemudian, kelompok tani tersebut menjual hasil pertaniannya tidak berupa gelondongan gabah. Paling tidak dijual berbentuk beras maka petani akan mempunyai lebih (nilai tambah) menir dan katul. Sekamnya juga bisa untuk pupuk dan lain sebagainya. Katulnya untuk ternak, makanan tambahan dari menirnya. Ini merupakan produk turunan padi.

Dengan demikian, negara juga bisa lebih mudah dan efektif melindungi petani dan produknya. Syaykh memberi contoh, jika Bulog sanggup membeli produk luar jutaan ton, mestinya sanggup membeli produk petani juga. Oh, kalau dibilang kualitasnya rendah, kurang ini dan itu. Tingkatkan saja. “Kalau kita mencela hasil petani Indonesia sama saja mencela negaranya sendiri. Kita bilang, produk luar negeri lebih baik, itu juga mencoreng muka sendiri, karena tidak ada bimbingan bagi petani,” tegas Syaykh Panji Gumilang.

Dia memisalkan, disebut kadar air petani kita sering menipu. Menurutnya, ini terjadi karena tidak ada fasilitas pengukur kadar air padi. Bagaimana bisa mengukur kadar

air? Fasilitasnya tenaga matahari saja. Dijemur, kalau sudah terdengar kletak saat digigit dianggap kering dan kadar airnya rendah. Mestinya ada alat ukur, ada mesin pengering padi. Padahal potensi pertanian itu sangat luar biasa. Syaykh memberi contoh, Desa Mekar Jaya, kalau tidak salah, lahan yang bisa ditanami padi di atas 3000 ha. Tapi, coba lihat dari sudut ke sudut, ada nggak pabrik padi yang dimiliki petani? Nggak ada kelompok tani yang memiliki mesin *dryer*.

Seharusnya, menurut Syaykh, kalau sudah 2000 ha, mestinya petani mengelompokkan diri membuat pabrik beras sendiri, berasnya dijual ke KUD. "Ini sudah nggak berpikir ke situ. Apa lagi memikirkan untuk menyejahterakan petani," keluhannya.

Menurutnya, kalau para petani mempunyai kelompok tani, jelas akan bisa lebih sejahtera. Kelompok tani itu memiliki *rice milling* walaupun kecil-kecilan. Nanti ada produk turunan gabah. Semuanya harus mempunyai nilai tambah. Apa yang tidak mempunyai nilai? Sekam ada nilainya, katul ada nilainya, menir ada nilainya. Kalau tadi mengatasi kekurangan itu tambahannya dari katul, juga dari menir. Sekamnya diangkut ke sawah lagi, kalau tidak dijual untuk bahan bakar.

Dalam rangka menggalang kelompok tani tersebut, kini Syaykh Panji Gumilang memprakarsai Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indramayu (P3KPI). Dia mengajak para petani di sekitar Al-Zaytun (Indramayu) secara berkelompok menggarap lahan Al-Zaytun. Para petani diberikan pinjaman modal tanpa bunga dan pengembaliannya saat panen. Ketika ditanya, dari mana yayasan akan mendapatkan keuntungan? Syaykh Panji Gumilang mengatakan keuntungannya banyak, petani bisa menghasilkan produk yang tinggi, itu sebuah keuntungan, mereka tekun bertani itu juga sudah keuntungan. "Jadi keuntungan

itu jangan dihitung dari rupiah saja," katanya.

Selain menggalang kelompok tani, Syaykh Panji Gumilang (Al-Zaytun) juga mendorong masyarakat desa (petani) setempat aktif dalam Koperasi Serba Usaha Desa Kota yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat desa dan kota. Koperasi ini sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat desa (petani) dengan masyarakat kota (konsumen hasil pertanian) dan sebaliknya. Bersamaan dengan itu, juga digalakkan penyimpanan beras di 'Istana Beras' bukan di lumbung beras.

Di samping itu, para petani juga dibimbing untuk menanam padi dengan bibit unggul yang dikembangkan di Al-Zaytun. Sejak berdiri, memang Al-Zaytun terus meneliti dan mengembangkan berbagai bibit unggul, di antaranya padi. Kini, mereka memiliki bibit unggul Sigromilir. Sigromilir 1 bisa memiliki anak dua puluh yang produktif dan hasilnya mencapai 14 ton per ha.

Saat ini belum semua petani bisa diajak 'mengakrabi' bibit Sigromilir tersebut. Baru beberapa persen. "Belum nyambung antara sini (sambil menunjuk hati dan kepala) kita, dengan mereka," ujar Syaykh. Contohnya, disebar semauanya dengan dicampur bibit yang lain.

Sementara, di musim tanam rendengan tahun ini, mereka sudah bisa mulai menanam Sigromilir 2. Hasil Sigromilir 2 ini kemungkinannya lebih tinggi lagi, karena potensi anakannya lebih banyak. Kalau Sigromilir 1 itu 20 yang produktif, Sigromilir 2 kemungkinan 40, karena dari 82 anakan cuma 6 % yang tidak keluar malai. Berarti tinggal 77, jika dibagi dua 38,50%. Kemungkinan jika dirata-rata yang produktif antara 38 sampai 40 yang produktif. Kemudian, potensi bulir Sigromilir 1, sebanyak 350 sampai 500. Sementara, Sigromilir 2, berlebih, 200 sampai 250 bulir dibandingkan sigromilir 1. "Potensi itu merupakan target maksimal. Kalau fasilitas yang biasa rata-rata 14 malai kali potensi yang paling rendah yaitu 350 bulir, tinggal dikalikan saja 14 x 350," jelasnya. Direncanakan, bulan sebelas tahun ini sudah bisa dicoba di lahan seluas 50 atau 100 bahu.

Sigromilir 2 itu bukan bibit yang sama dengan Sigromilir 1. "Namanya satu, tetapi berbeda. Cuma nama Sigromilir itu milik Al-Zaytun, tetapi sumbernya beda-beda, seperti Pelita 1, Pelita 2, itu bukan dari sumber yang sama," jelas Syaykh Al-Zaytun.

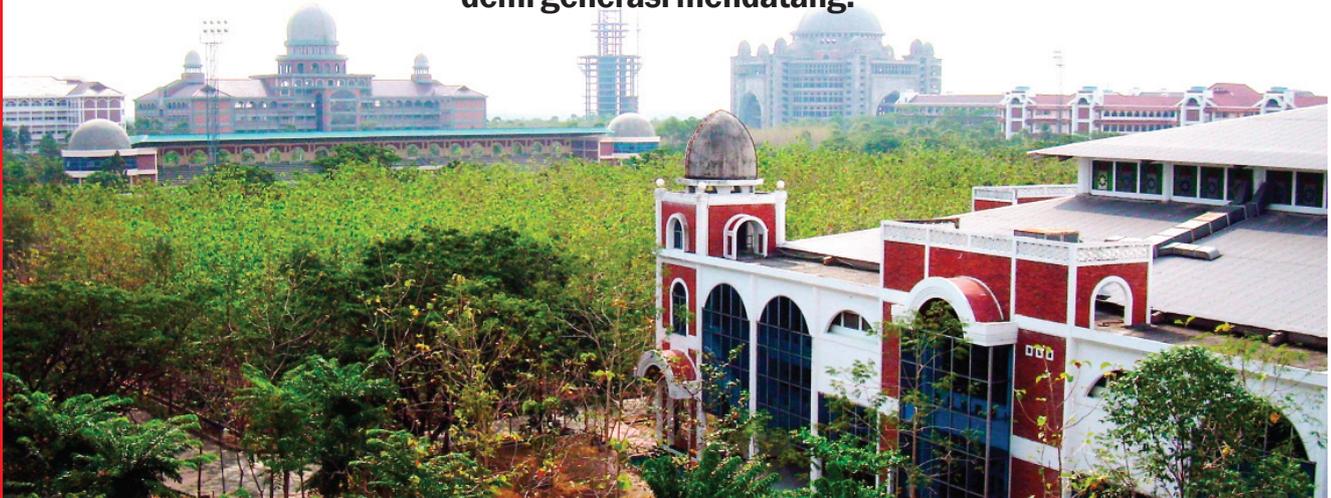
■ Berindo-AZ-crs



Muslih Fais, sebagai administrator Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indramayu (P3KPI) sedang memberikan kemudahan kepada para Petani berupa pinjaman modal kerja tanpa bunga.

Jati Emas Demi Generasi

Pohon jati (*tectona grandis*) merupakan primadona tanaman hutan yang dikembangkan di Al-Zaytun. Pohon berdaun lebar ini bernilai ganda, selain bernilai ekonomi juga berfungsi sebagai pohon pelindung dan peneduh serta menanam demi generasi mendatang.



Sebanyak dua juta pohon jati emas ditanam di kawasan kampus Al-Zaytun. Pohon jati yang ditanam pun bukan sembarang, tetapi merupakan bibit jati pilihan (unggul), yang pada awalnya didatangkan dari Myanmar dalam bentuk stek dan dari Cepu, Jawa Tengah. Kemudian pembibitan pohon jati dikembangkan melalui teknologi kultur jaringan.

Bibit-bibit jati yang dikembangkan dengan teknologi kultur jaringan itu merupakan hasil seleksi dari 250 ribu pohon jati. Dari ribuan pohon unggul tersebut, berhasil diseleksi 572 pohon terbaik dengan berbagai nilai plusnya. Kemudian diseleksi lagi hingga hanya 286 pohon atau sekitar 50 persen saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber *explant*.

Lalu pada 23 Juni 2001, sebatang pohon jati yang berusia 28 bulan dengan ketinggian 10,20 m dengan diameter 8 cm, ditebang untuk dijadikan sebagai *explant* kultur jaringan. Setelah kultur jaringan berhasil,

JATI EMAS: Inilah hutan jati kampus Al-Zaytun, ditanam tahun 1999, diangan-angani oleh Syaikh Al-Zaytun AS. Panji Gumilang pada 100 tahun yang akan datang akan menjadi pokok jati seperti di Alas Roban.

maka tak perlu lagi mengimpor bibit-bibit jati dari luar, bahkan mampu menyediakan bibit pohon jati bagi siapa saja yang membutuhkan.

Jenis jati yang dikembangkan pun sangat unggul. Keunggulannya terlihat dari pertumbuhan (besar dan tingginya) yang lebih cepat dibandingkan dengan jati-jati lokal biasa. Juga jangka masa panennya yang begitu cepat berkisar antara 5 sampai 15 tahun. Itulah sebabnya penduduk setempat menyebut pohon-pohon jati yang ditanam di Al-Zaytun sebagai pohon emas.

Penyebutan nama itu, pada mulanya berawal dari penamaan pohon jati MAZ (Ma'had Al-Zaytun). Oleh penduduk setempat dilafalkan pohon jati mas. Kemudian dipopulerkan menjadi pohon jati emas. Pohon jati unggul yang bernilai ekonomi emas sekaligus berfungsi tinggi sebagai pohon penghijauan.

Penanaman pohon jati emas ini telah dilakukan sejak tahun 1999. Pohon-pohon jati emas itu telah menghijaukan kompleks pendidikan Islam terpadu tersebut dan telah menjadi daya tarik tersendiri. Pohon-pohon jati berdaun lebar dan berbatang "bong-sor" itu tampak tumbuh subur menghiasi keasrian dan kesejukan kompleks Al-Zaytun.

Penanaman pohon jati tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memanfaatkan secara produktif setiap jengkal tanah yang ada di arena pendidikan itu. Menurut Syaykh Panji Gumilang, keseluruhan apa yang ada di kompleks ini didedahkan (diperlihatkan) untuk memberikan inspirasi kepada santri bahwa bila kita berminat mengolah bumi, maka Allah akan memberikan kemakmuran. Syaykh mengatakan bahwa penanaman pohon jati emas juga merupakan bagian dari pembangunan masa depan, demi generasi mendatang. Menanam untuk generasi mendatang.

Syaykh Al-Zaytun mengimpikan hutan jati kampus al-Zaytun yang ditanam tahun 1999, pada 100 tahun yang akan datang akan menjadi pokok jati yang seperti di Alas Roban. Pohon jati di Alas Roban yang ditanam pada tahun 1914, kini (100 tahun kemudian) lingkarannya sudah tiga kali dekapan orang dewasa. Syaykh berharap diameter pohon jati emas Al-Zaytun pada tahun 2099 akan lebih besar dari pohon jati di Alas Roban tersebut. ■ **Berindo-AZ-crs**



JATI ALAS ROBAN: Syaykh sedang menerawang, mengangani bagaimana pohon jati di Al-Zaytun pada tahun 2099 nanti seperti pohon jati yang di Alas Roban yang ditanam pada 100 tahun lalu (tahun 1914), sudah berdiameter (lingkarannya) tiga kali dekapan orang dewasa.

Sudah bukan rahasia lagi apabila berbagai tarian tradisional Aceh sering ditampilkan dalam pertunjukan budaya di tingkat nasional maupun internasional. Tari Rapai Geleng misalnya, dibawakan oleh kelompok kesenian Sekolah Pembangunan Jaya di Pavilion "Remarkable Indonesia" untuk memperingati pameran dagang "Mustermesse Basel (MUBA) 2013" di Exhibition Centre Basel, Swiss, akhir Februari 2013 lalu. Indonesia menjadi *guest country* dalam penyelenggaraan pameran yang terbesar dan tertua di Swiss itu.

Sebelumnya, tarian Rapai Geleng juga menyemarakkan Festival Internasional Abu Simbel di Aswan, Mesir. Tim kesenian Indonesia yang beranggotakan 13 orang tampil piawai dan disambut hangat oleh penonton di festival internasional yang diikuti sejumlah negara, antara lain Prancis, Amerika Serikat, China dan Turki itu.

Rapai Geleng adalah salah satu tarian dari Aceh yang sering ditampilkan selain tari Saman dan tari Seudati. Rapai Geleng mempertunjukkan keserasian gerak, gelengan kepala, dan bunyi rebana yang ditabuh secara ritmik diiringi syair religi dalam bahasa Aceh. Gerakannya bervariasi dari lambat, cepat, sangat cepat, dan diam tanpa gerak. Konsentrasi penuh merupakan kunci keberhasilan kesenian ini, karena jika ada salah satu pemain yang salah gerak, maka akan mengakibatkan rusaknya permainan. Secara filosofis, Rapai Geleng menggambarkan kehidupan harus dinamis dan harmonis.

Sebelum Islam berkembang di Aceh, kebudayaan di sana dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dari Hindia yang dibawa oleh pedagang melalui jalur laut. Dalam hubungan kesenian, budaya dari India ini kemudian berkembang dalam seni budaya lokal masyarakat Aceh. Karena itulah, banyak kita dapati unsur-unsur kesenian Hindustan dalam tarian Aceh. Baik dari segi warna dan corak pakaian, maupun gerakan-gerakan tari. Begitu pula ketika ajaran Islam mulai berkembang, kesenian Aceh pun berkembang sesuai dengan corak yang islami.

Pada dasarnya, tarian Aceh memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ditarikan oleh satu jenis kelamin dalam satu regu, pengulangan gerakan serupa yang relatif banyak, durasi penyajian yang panjang, kombinasi dari tari musik dan sastra, pola lantai yang terbatas dan gerak tubuh terbatas. Secara umum tarian Aceh bisa dikelompokkan berdasarkan asal suku tarian tersebut. Misalnya, tarian Aceh yang berasal dari Suku Gayo seperti tari Saman, Bines, Munalu, Didong, Guel, dan tari Turun Ku Aih Aunen. Sementara, dari Suku Aceh, ada tari Rateb Meuseukat, Seudati, Pho, Ranup Lampuan, Tarket Pukat, Laweut, Likok Pulo, dan tari Ratoh Duek.

Spirit keislaman terlihat jelas dalam berbagai tarian, baik Seudati, Saman, Meuseukat, Ranup Lampuan dan lainnya. Misalnya saja tari Seudati yang diciptakan setelah berdirinya masyarakat Islam Aceh, berfungsi sebagai dakwah dan hiburan. Seudati yang merupakan perpaduan antara seni suara dan seni tari ini juga bernama saman (kata dari bahasa Arab yang artinya delapan) karena para pemainnya terdiri dari delapan orang yaitu



TARI SAMAN

Identitas Budaya Masyarakat Aceh

Lewat tarian, masyarakat Aceh membangun identitas budaya sendiri yang sarat nilai syariah dan spirit keislaman.

Syekh dan para pembantunya berpakaian seragam.

Sedangkan keindahan tari Saman yang banyak memikat hati orang terletak pada kekompakan gerakannya yang sangat menakjubkan. Para penari saman dapat bergerak serentak mengikuti irama musik yang harmonis. Gerakan-gerakan teratur itu seolah digerakkan satu tubuh, terus menari dengan kompak, mengikuti dendang lagu yang dinamis.

Tarian juga dipakai dalam berbagai upacara seperti Tari Ranub Lampuan yang biasa dimainkan untuk menyambut tamu terhormat dan pejabat-pejabat yang berkunjung ke Aceh. Tarian ini juga ditampilkan pada acara-acara khusus, seperti pada acara Preh linto, Tueng Dara Baro. Tarian ini dimainkan oleh tujuh orang penari wanita dan diiringi dengan instrumen musik tradisional Seurunee Kalee. Penari memegang Cerana atau Puan yang di dalamnya berisi sirih (ranub) yang akan diberikan kepada tamu-tamu sebagai tanda kemuliaan.

Untuk melestarikan tarian-tarian tradisional Aceh, anak-anak sekolah wajib mempelajarinya. Seperti Tari Likok Pulo yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran kesenian dan menjadi salah satu tari wajib bagi murid sekolah di Banda Aceh. Tarian yang dibawakan oleh 12 orang penari pria ini menjadi media pengembangan dakwah Islam di era kesultanan Aceh. Gerak tari Likok Pulo komposisinya dimulai dengan gerakan salam anggukan kepala dan tangan yang diselingi gerakan pinggul. Ritme tarian saling membentang dan seling ke kiri dan ke kanan sambil melantunkan syair-syair pujian kepada Tuhan yang diiringi dengan musik Rapai dan vokal yang menyanyikan syair Aceh.

Dengan tersedianya tenaga kreatif yang benar-benar memahami dan menggemari kesenian Aceh, didukung adanya pemain-pemain seni tari yang penuh dedikasi dan mau belajar dengan sungguh, tarian tradisional Aceh tetap lestari sampai sekarang. ■ cid

Menumpas Kejahatan Tanpa Basa-basi



Citra Oliver Queen sebagai 'playboy kaya yang suka pesta' dikikis habis dalam serial televisi 'Arrow'. Di situ, The Green Arrow yang tangguh harus berhadapan dengan penjahat licik, mitos dan cinta segitiga yang rumit.

Bagi Anda yang pernah menonton serial televisi "Smallville", karakter Oliver Queen pasti tidak asing lagi. Dalam serial itu, Oliver Queen dikenal sebagai playboy kaya yang tampil berdampingan (bersahabat) dengan Clark Kent (Superman) dalam membasmi kejahatan. Di situ, Oliver disebut The Green Arrow karena memakai jubah dan panah hijau tiap kali beraksi. Jujur, tidak ada yang istimewa dengan latar belakang Oliver Queen yang menjadi superhero di serial Smallville ini. Dia hanyalah sosok manusia biasa yang kebetulan kaya raya sehingga bisa memiliki perlengkapan-perengkapan canggih (panah, bom, dsb), bertubuh atletis dan tidak mempunyai kekuatan supernatural.

Meski demikian, The CW Television Network (CW) berusaha lebih mendalami karakter The Green Arrow yang dikenalkan oleh DC Comics ini dalam satu film seri tersendiri berjudul 'Arrow'. Film ini tayang perdana di Amerika Utara (CW) pada 10 Oktober 2012. Season 1 terdiri dari 21 episode yang akan berakhir pada 1 Mei 2013.

Di awal kemunculannya, cukup banyak orang yang beranggapan bahwa sosok The Green Arrow dalam serial 'Arrow' tidak berbeda jauh dengan versi DC Comics. Si-

kap skeptis itu nampaknya sudah diantisipasi oleh pihak produser. Pertama, mereka dengan sengaja menamakan serial ini dengan hanya satu suku kata saja, "Arrow". Selain bisa menimbulkan rasa penasaran, sebuah judul film yang memakai satu suku kata akan lebih mudah diingat dan lebih memiliki makna yang luas, tidak hanya terpaku pada sosok pemeran utama.

Kedua, bila Anda menyaksikan episode 1 (pilot) hingga episode 5, citra Oliver Queen sebagai 'playboy kaya yang suka pesta' dikikis habis. Anda akan dibuat terkejut dengan cara dia menghabiskan musuhnya, tanpa basa-basi. Sekali panah, langsung mati. Pukul beberapa kali, musuh jatuh pingsan. Berbeda dengan karakter Batman yang malah berharap, jangan sampai ada musuh yang mati.

Gaya Oliver Queen yang tangguh dan brutal itu tidak muncul begitu saja. Penonton diberikan kisah latar belakang bagaimana Oliver Queen bertransformasi menjadi tangguh seperti itu. Dikisahkan, sang playboy yang diperankan oleh Stephen Amell berhasil kembali ke kotanya, Starling City setelah lima tahun terdampar di sebuah pulau dekat Cina Utara bernama Purgatory. Saat terdampar di pulau itu, Oliver

bertemu dengan kriminal dan tentara-tentara bayaran. Di pulau itulah, ia bertemu dengan beberapa *survivor* yang mengajarnya untuk bertahan hidup dan memanah.

Kehidupan keras dan brutal di pulau itulah yang membuat Oliver berubah. Ia bukan lagi pria yang suka pesta dan berbuat sesukanya. Sekembalinya ke Starling City, Oliver perlahan-lahan mulai beraksi menumpas kejahatan-penjahat yang sudah meracuni kotanya. Oliver terdorong melakukannya karena sang ayah berpesan agar Oliver memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat ayahnya semasa hidup. Sebelum meninggal, sang ayah memberikan sebuah buku kecil berisi daftar nama orang-orang yang 'merusak' Starling City.

Agar lebih meyakinkan penonton, sosok The Green Arrow juga ditampilkan rutin berolahraga - ia sering muncul bertelanjang dada memamerkan perut *sixpack* dan bekas luka bakar di tangan dan badannya - dan rajin berlatih beladiri dan memanah. Ia sanggup memanah bola-bola kecil yang dilemparkan atau papan target dengan cepat dan akurat. Ia juga bisa melompati pagar dan naik ke tempat-tempat tinggi dengan lincah. Melihat aksinya seperti melihat aksi Parkour, sebuah teknik berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan efisien dan secepat-cepatnya.

Ketiga, pihak produser tidak terpaku pada kisah komik asli. Mereka membuat pengembangan dan variasi cerita. Misalnya, kisah cinta segitiga antara Oliver Queen, Tommy Merlyn (Colin Donnell), dan Laurel Lance (Katie Cassidy). Oliver Queen dan Laurel Lance sebenarnya masih saling mencintai, tapi karena sejarah hubungan yang kompleks (Oliver pernah selingkuh dengan adik Laurel), mereka memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri. Kompleksitas hubungan itulah yang ingin dijual kepada penonton. Selain itu, agar penonton semakin penasaran, dimunculkan beberapa karakter penjahat misterius seperti Deathstroke dan Dark Archer, dalam beberapa kesempatan.

Sepanjang episode 1 (pilot) hingga episode 15, Anda akan mendapati beberapa episode yang kisahnya terkesan 'dipanjang-panjangkan'. Dalam salah satu episode misalnya, Oliver jatuh hati pada seorang perempuan dan berharap bisa mengajaknya untuk bersama-sama membasmi kejahatan. Belakangan, Oliver menyadari bahwa hal itu tidaklah mungkin sebab perempuan itu punya agenda sendiri dan dipenuhi dengan dendam. Dalam episode lain, ia mengalami krisis pribadi dan ingin berhenti sebagai The Green Arrow karena dikalahkan oleh Dark Archer. Meski demikian, pada setiap episode, penonton tetap akan diberikan suguhan menarik dan secuil misteri yang terungkap satu per satu. ■ roy



Menjawab Tantangan Zaman

Kurikulum 2013 menuntut banyak perubahan mulai dari jumlah mata pelajaran, manajemen sekolah dan guru, pengadaan buku dan silabus hingga penerapan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Semua unsur yang berperan di dalamnya harus mau berubah dan bekerjasama demi menjawab tantangan zaman.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013 secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan, kurikulum 2013 diterapkan pada tahun pertama untuk murid kelas satu dan kelas empat Sekolah Dasar (SD) serta kelas satu SMP dan SMA. Selanjutnya, pada tahun kedua akan diberlakukan kepada kelas dua dan kelas lima SD serta kelas dua SMP dan SMA, kemudian pada tahun ketiga akan diberlakukan kepada kelas empat dan kelas enam SD serta kelas tiga SMP dan SMA.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemdikbud, jumlah Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan kurikulum 2013 sebanyak 44.609 sekolah. Sebanyak 102.053

sekolah di seluruh Indonesia dari semua jenjang pendidikan menjadi sasaran dari penerapan kurikulum 2013.

Pada tahap pertama untuk jenjang SD, hanya 30 persen sekolah dari seluruh SD di Indonesia yang dijadikan tempat penerapan kurikulum 2013. Itu pun hanya SD dengan akreditasi A dan B. Untuk SD berakreditasi C akan menerapkan kurikulum 2013 mulai tahun 2014.

Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan kurikulum 2013 sebanyak 36.434 sekolah. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.535 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 9.875 sekolah di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Ka-

sim mengatakan, pelatihan akan diberikan pada para guru kelas mulai Maret 2013. Pelatihan ini untuk menyiapkan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 sehingga tidak terjadi kebingungan saat mengajar. Pada tahap pertama pelatihan implementasi kurikulum baru, untuk jenjang SD akan diikuti guru kelas 1, guru kelas 4 dan guru pendidikan jasmani yang sudah terpilih di masing-masing sekolah.

Tak hanya kesiapan para guru, ketersediaan buku guna menunjang proses belajar-mengajar juga terus dipercepat. Kemdikbud menargetkan proses penyusunan buku mata pelajaran kurikulum baru selesai pada Februari 2013. Ketersediaan buku merupakan salah satu kunci suksesnya kurikulum 2013. Pelatihan mengenai pelaksanaan kurikulum baru terhadap para pengajar tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa terwujudnya buku yang berfungsi sebagai panduan.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahsun mengatakan, kurikulum 2013 berbeda diban-

dingkan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Selain isi pengajaran, juga diubah cara penyampaian, termasuk penyiapan dan penyediaan buku ajarnya. Nantinya, empat mata pelajaran wajib menggunakan buku yang distandarkan oleh kementerian. Sedangkan mata pelajaran lain boleh menggunakan buku pedoman berbeda, namun harus di bawah pengawasan kementerian.

Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembuatan silabus pada kurikulum 2013. Guru tak lagi dibebani dengan kewajiban membuat silabus untuk pengajaran terhadap anak didiknya seperti yang terjadi pada saat KTSP.

Dilihat dari strategi, kurikulum baru ini akan menekankan pada model pembelajaran tematik yang mengarah pada pendidikan karakter. Pendidikan bersifat tematik menitikberatkan pada mata pelajaran yang membentuk sikap untuk siswa sekolah dasar (*character building*), mengasah keterampilan untuk siswa SMP, dan membangun pengetahuan untuk siswa SMA.

Perbedaan yang cukup mendasar pada kurikulum baru, adalah adanya pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam belajar. Ada empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Jumlah mata pelajaran untuk anak SD yang semula 10 mata pelajaran dipadatkan menjadi 6 mata pelajaran, yaitu Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Bahasa Inggris termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler bersama dengan Palang Merah Remaja (PMR), UKS, dan Pramuka. Sementara, untuk tingkat SMP, sebanyak tujuh mata pelajaran dan SMA sebanyak 10 mata pelajaran.

Empat mata pelajaran yang dulu berdiri sendiri, yaitu IPA, IPS, muatan lokal, dan pengembangan diri, di kurikulum baru SD akan diintegrasikan dengan enam mata pelajaran lainnya. Untuk mata pelajaran IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Mata pelajaran IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan muatan dan pengembangan diri akan dikaitkan dengan Seni Budaya.

Di tingkat SMP, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan ditiadakan. Mapel TIK tidak diajarkan secara terpisah dan akan menjadi media

pembelajaran semua mapel sehingga anak-anak mampu mengenal teknologi dengan lebih baik. Bahasa Inggris yang mulai diajarkan untuk membentuk keterampilan bahasa, masuk dalam struktur kurikulum baru sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ada pula, mata pelajaran Prakarya untuk mendorong agar anak-anak bisa kreatif.

Di tingkat SMA, penjurusan dihapuskan sehingga pelajar bisa memilih mata pelajaran yang diminatinya. Metode pengajaran dibuat untuk merangsang keaktifan siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh berujar, sistem baru ini menuntut perubahan manajemen sekolah karena jumlah siswa yang mengambil mata pelajaran tertentu akan berbeda setiap tahun.

Guru SMA harus menguasai mata pelajaran lain berdasarkan mayor dan minornya. Misalnya, guru yang mengambil mata pelajaran Biologi sebagai mata pelajaran mayor juga harus mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam lain sebagai minor.

Menurut Nuh, para guru SMA nanti akan mendapatkan pelatihan agar mampu mengajar mata pelajaran lain yang bukan minornya. Dengan begini, sekolah tidak perlu khawatir akan ada guru yang menganggur karena murid yang mengambil mata pelajarannya sedikit atau sebaliknya, akan kekurangan pengajar karena banyak siswa yang mengambil mata pelajaran tertentu.

Nuh bertutur, dalam menyambut perubahan kurikulum pendidikan ini, tidak hanya guru yang akan dilatih. Kepala sekolah dan pengawas sekolah juga bakal dilatih karena manajemennya berbeda dengan yang sekarang.

Pemadatan mata pelajaran akan membuat kurikulum ini mengharuskan anak-anak belajar lebih lama di sekolah. Untuk kelas I-III yang awalnya belajar selama 26-28 jam dalam seminggu bertambah menjadi 30-32 jam seminggu. Sedangkan untuk kelas IV-VI yang semula belajar selama 32 jam per minggu di sekolah bertambah menjadi 36 jam per minggu.

Sistem pembelajaran berbasis tematik integratif telah dijalankan di banyak negara, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Finlandia, Skotlandia, Australia, Selandia Baru, sebagian Amerika Serikat, Korea Selatan,



Mendikbud
Muhammad Nuh



Wamendikbud Bidang
Pendidikan, Musliar Kasim

Singapura, Hongkong, dan Filipina. Penambahan jam belajar di sekolah dianggap masih sesuai karena dibandingkan negara lain, Indonesia terbilang masih singkat durasinya untuk anak usia 7-9 tahun.

Selama era reformasi, ini adalah ketiga kalinya kurikulum ditelaah dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Sama seperti kurikulum sebelumnya, pro dan kontra juga mewarnai pelaksanaan kurikulum 2013.

Pihak yang mendukung menyatakan, kurikulum 2013 memadatkan pelajaran sehingga tidak membebani siswa, lebih fokus pada tantangan masa depan bangsa, dan tidak memberatkan guru dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sedangkan yang kontra menyatakan, kurikulum 2013 justru kurang fokus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dengan Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ini terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan guru serta tidak dilakukan uji coba dulu di sejumlah sekolah sebelum diterapkan.

Terlepas dari pro kontra yang ada, publik sedang menantikan perubahan yang ditawarkan dalam kurikulum baru serta dampak apa yang bisa diharapkan pada keluaran sistem pendidikan ke depan, sebagai akibat dari intervensi pemerintah melalui pengembangan kurikulum ini.

Para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, beserta semua unsur yang berperan di dalamnya diharapkan mampu melaksanakan kurikulum 2013. Semoga saja, kurikulum pendidikan baru ini memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sehingga lahir generasi yang dapat menjawab tantangan zaman. ■ **dgr-pan**



Penulis:
Dr. Darmin Nasution,
Gubernur Bank
Indonesia

Integrasi Ekonomi ASEAN 2015

Peluang atau Ancaman Bagi Perbankan Nasional

Oleh Dr. Darmin Nasution

**Apakah
"tingkat suku
bunga"
perbankan
saat ini sudah
merepresen-
tasikan
tingkat yang
wajar (fair
value)?
Apakah
"struktur
suku bunga"
yang
terbentuk
(term
structure)
sudah
menggamban-
kan kondisi
yang
rasional?**

Sejak krisis global 2008, Indonesia merupakan sedikit dari negara Asia yang secara konsisten membukukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Struktur pertumbuhan pun semakin berimbang, dengan meningkatnya peran investasi. Setelah tumbuh 4.5% di tengah krisis global 2009, pada tahun 2010 dan 2011 lalu ekonomi kita tumbuh 6.0% dan 6,5%.

Perkembangan inflasi IHK juga menunjukkan tren yang menurun. Inflasi inti turun dari 6,05% (yoy) di awal 2007, menjadi 4,24% (yoy) pada April 2012. Dalam kurun waktu yang sama, penurunan inflasi juga didukung membaiknya inflasi *volatile food* dari 12,15% (yoy) menjadi 6,99% (yoy). Kita mengharapkan tingkat inflasi akan terus menurun mencapai target $4\pm 1\%$ pada 2015.

Menurunnya inflasi telah memberikan ruang bagi penurunan suku bunga kebijakan (BI Rate). Pada Oktober 2008, BI Rate masih berada pada level 9,5% dan pada saat ini telah mencapai 5,75%. Dalam tataran operasional, batas bawah koridor suku bunga atau FASBI bergerak turun ke 3,75%, sama dengan suku bunga kebijakan (*reverse repo rate*) di Filipina.

Tren menurunnya inflasi dan suku bunga kebijakan di Indonesia diharapkan akan berlanjut sehingga pada gilirannya sejajar dengan beberapa negara utama ASEAN. Apabila kondisi ini dapat dicapai maka akan memberikan daya dukung bagi peningkatan daya saing perekonomian secara makro.

Peningkatan daya saing yang dicapai dalam perekonomian makro, juga diharapkan terjadi pada sektor mikro, khususnya melalui peningkatan daya saing lembaga keuangan dan dunia usaha di Indonesia.

Perbaikan daya saing di sektor mikro ini sangat relevan dengan adanya rencana integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan integrasi sektor keuangan pada tahun 2020. Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN ini membawa arti penting bagi perbankan nasional mengingat integrasi keuangan akan dimulai dengan integrasi sektor perbankan.

Sebagaimana diketahui, rencana integrasi sektor perbankan tersebut disikapi oleh negara-negara ASEAN dengan membentuk *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*. Framework ini akan membuka peluang dan kesempatan bagi perbankan negara-negara ASEAN untuk memperluas wilayah operasionalnya dan memperluas pasarnya.

Namun, *framework* ini juga mensyaratkan: (i) terciptanya harmonisasi regulasi prudensial, (ii) kesiapan infrastruktur stabilitas sistem keuangan, (iii) *capacity building* bagi negara ASEAN yang relatif tertinggal, dan (iv) kesepakatan terhadap kriteria *Qualified ASEAN Banks (QAB)*.

Bagi industri perbankan Indonesia, berlakunya *framework* tersebut tentu menyediakan peluang sekaligus tantangan. Dari perspektif regulasi, Bank Indonesia akan mengantisipasi tantangan ini dengan terus menyempurnakan berbagai kebijakan agar efisiensi dan ketahanan perbankan semakin baik. Penyempurnaan regulasi atau kebijakan termasuk penataan struktur suku bunga khususnya suku bunga perbankan, penguatan permodalan, perbaikan tata kelola (*governance*) bank, dan lain sebagainya.

Saya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penataan struktur suku bunga di sektor keuangan terutama sektor perbankan. Karena ini akan mendorong mobilisasi dan alokasi dana secara efisien dan efektif bagi pembiayaan perekonomian sekaligus "pendalaman pasar keuangan domestik".

Beberapa pertanyaan selalu muncul dalam benak saya. Apakah "tingkat suku bunga" perbankan saat ini sudah merepresentasikan tingkat yang wajar (*fair value*)? Apakah "struktur suku bunga" yang terbentuk (*term structure*) sudah menggambarkan kondisi yang rasional?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang lebih terjawab dari hasil survei Bank Indonesia¹. Survei ini mengungkap tabir bagaimana suku bunga deposito perbankan terbentuk secara 'tidak efisien' karena struktur pasar pendanaan bank (*bank funding market*) yang '*oligopolistic*'.

Dengan struktur pasar seperti itu, pemilik dana besar sangat berpengaruh dalam penentuan suku bunga deposito. Pemilik dana besar tersebut termasuk di antaranya institusi penghimpun dana jangka panjang, yang seharusnya melakukan investasi pada instrumen jangka panjang seperti pasar obligasi.

Dari hasil survei terhadap 71 bank, jumlah nasabah dengan deposito di atas Rp 2 miliar memang hanya 3%. Namun, secara nominal, nasabah yang jumlahnya hanya 3% ini menguasai 62% dari total nominal deposito perbankan.

Sekitar 36% dari total nasabah di 71 bank itu memperoleh imbal hasil di atas suku bunga penjaminan atau '*special rate*'. Ini sudah menjadi fenomena laten karena 67 bank (97%) memberikan *special rate*, yang berlangsung sudah cukup lama. Bahkan, 33 bank (47%) memberikan *special rate* 200 bps di atas BI rate. Implikasi dari fenomena ini, perkembangan suku bunga deposito menjadi kurang responsif terhadap penurunan BI Rate.

Struktur suku bunga deposito yang terbentuk pun tampak tidak rasional. Konsep *time value of money* tidak berlaku. Tidak terdapat perbedaan

¹ Kajian Bank Indonesia (DPNP) Maret 2012

yang berarti antara tingkat suku bunga satu bulan dibandingkan dengan dua belas bulan. Implikasinya, struktur DPK perbankan terkonsentrasi (77%) pada deposito satu bulan. Ini menyebabkan penyaluran dana perbankan juga terkonsentrasi ke pembiayaan jangka pendek.

Selain pentingnya kita memperbaiki struktur suku bunga, ke depan saya memandang perlunya perbaikan *governance* industri perbankan kita. Sebagaimana berlaku di beberapa negara ASEAN lain, sudah saatnya dilakukan penerapan kebijakan pemberian izin berjenjang atau *multi-license*. Termasuk di dalamnya adalah penataan permodalan bank, pengaturan *governance* melalui pembatasan kepemilikan per pihak, proses persetujuan produk dan aktivitas bank, dan proses persetujuan pembukaan jaringan kantor bank.

Di beberapa negara misalnya, diberlakukan ketentuan, bank perlu menyesuaikan cakupan produk dan aktivitasnya sesuai kelompok di mana bank tersebut berada, serta wajib memperoleh izin untuk dapat melaksanakan produk dan aktivitas lainnya. Dalam hal bank ingin tetap menjalankan produk dan aktivitas sesuai cakupan yang dilaksanakan saat ini namun tidak didukung dengan permodalan yang cukup, maka bank wajib memenuhi kekurangan permodalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Apakah Kita Siap?

Lantas, apakah apabila dilakukan penyempurnaan berbagai regulasi membuat kita menjadi siap menghadapi integrasi perbankan pada 2020 nanti? Siap atau tidaknya kita juga bergantung dari adanya peran aktif industri perbankan sendiri. Bagaimanakah visi dan pandangan jangka panjang perbankan terhadap rencana bisnisnya terkait integrasi ini?

Terkait dengan hal itu, pertanyaan-pertanyaan berikut patut kita lontarkan agar mendorong kita untuk terus melakukan retrospeksi. *Pertama*, mampukah perbankan Indonesia 'bersaing secara efisien' dengan bank-bank dari negara ASEAN lain yang akan beroperasi di dalam negeri?

Sebagai salah satu ukuran daya saing dapat dilihat dari *Net-Interest Margin* (NIM). NIM perbankan Indonesia (5,44%) masih cukup lebar apabila dibandingkan dengan NIM perbankan Thailand (3,41%) dan Malaysia (2,61%).

Dengan NIM yang lebar, tidak mengherankan

rata-rata ROA untuk 14 bank besar di Indonesia mencapai 2,46%, tertinggi di antara lima negara ASEAN (Tabel). Bahkan, ROA untuk keseluruhan bank (industri) mencapai 3,03%. Ini menjadikan Indonesia sebagai *lucrative market* bagi perbankan luar negeri.

Kedua, perlukah perbankan Indonesia melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain? Sebaliknya, sudah optimalkah perbankan kita memberikan kontribusinya bagi perekonomian nasional? Kontribusi perbankan dapat kita ukur dari rasio kredit terhadap PDB, dan rasio kredit/PDB di Indonesia (29,6%) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Thailand (90,6%) dan Malaysia (116,1%).

Rendahnya rasio kredit perbankan terhadap PDB seharusnya membuka peluang besar bagi perbankan kita dalam pembiayaan perekonomian nasional. Jangan pernah lupa, populasi Indonesia mencapai 40% dari total populasi ASEAN yang berjumlah hampir 600 juta jiwa.

Dengan populasi terbesar, dengan jumlah usia produktif terbanyak, dan dengan masyarakat menengahnya yang terus tumbuh, Indonesia adalah pasar yang amat menggiurkan. Dengan posisi Indonesia sebagai pasar terbesar di kawasan, kita harus bisa menjadikan hal ini menjadi aset, bukannya sebagai beban.

Dalam konteks ini, saya juga melihat adanya peluang yang cukup potensial bagi perbankan kita untuk terus menggerakkan sektor UMKM. Sektor ini terbukti memiliki ketahanan yang cukup kuat di masa krisis global. Per Maret 2012, pangsa kredit UMKM dalam total kredit perbankan baru mencapai 20,8%² dan pertumbuhannya mencapai 17,4% (yoy). Tantangannya adalah bagaimana menurunkan suku bunga UMKM ini yang masih terlalu tinggi.

Demikian pokok-pokok pemikiran dalam menyikapi peluang dan tantangan ke depan terkait kesiapan industri perbankan kita dalam menghadapi integrasi perbankan ASEAN 2020.

Disampaikan pada Diskusi dan Peluncuran Buku 'Inovasi 17 Bank' di Jakarta, 21 Mei 2012.

² Definisi baru: mencakup kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang penetapannya berdasarkan skala usaha dan kekayaan bersih perusahaan.

RETROSPEKSI:
Pertama, mampukah perbankan Indonesia 'bersaing secara efisien' dengan bank-bank dari negara ASEAN lain yang akan beroperasi di dalam negeri?
Kedua, perlukah perbankan Indonesia melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain?

Tabel Indikator Beberapa Bank Besar ASEAN

No	Indikator Bank	CAR	ROA	NPL	BOPO	NIM	Credit/GDP	Deposit Rate	Inflation
1	Malaysia	14.81	1.21	2.54	44.37	2.67	116.11	2.93	2.10
2	Philipina	17.44	1.69	5.49	59.06	4.06	32.31	3.04	3.10
3	Singapura	21.37	1.09	1.98	47.50	2.10			
4	Thailand	16.25	1.14	4.86	52.65	3.41	90.60	1.73	3.45
5	Indonesia*	14.75	2.46	2.21	80.11	5.44	29.63	5.75	4.50
	ASEAN (rata-rata)	16.92	1.52	3.41	56.74	3.53	67.16	3.36	3.29

* 14 bank besar

* ROA secara industri (seluruh bank) mencapai 3,03%

Demam Akuisisi Bisnis Bakrie Grup

Sejumlah bisnis keluarga Bakrie dikabarkan mengalami kemelut keuangan, sehingga menjual beberapa aset unggulannya.

Pakar bisnis keluarga, AB Susanto menangkap isyarat sedang terjadi krisis manajemen pada perusahaan Bakrie, khususnya terkait pengelolaan keuangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Susanto menyangkan apa yang telah dilakukan keluarga Bakrie, padahal bisnis keluarga Bakrie sudah menggurita di semua lini bisnis.

Pengelolaan keuangan dinilai tidak tepat, kata Susanto, karena perusahaan menggunakan utang jangka panjang untuk membiayai usaha berjangka pendek, begitu sebaliknya. Hal seperti ini, menurut Susanto masih lumrah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya di era Orde Baru. Era itu memberi peluang berkembang pesat bagi model perusahaan seperti itu. Namun tidak tepat diterapkan pada era demokrasi.

"Mereka juga berspekulasi terlalu tinggi, ini berbahaya," tambah Susanto. Solusinya, keluarga Bakrie harus segera merevitalisasi keuangannya agar dapat berbisnis secara sehat.

Grup Bakrie telah menetapkan niat genggang dari Bumi Plc. Namun, ada masalah lain, karena Bakrie Grup harus menyediakan dana USD 278 juta untuk membeli kembali saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Bumi Plc. Padahal pembayaran kembali harus sudah selesai sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bumi Plc, 21 Februari. Lantaran keadaan tersebut, Bakrie Grup gencar mencari dana.

Pengusaha Hary Tanoesoedibjo mengaku dimintai Bakrie Grup untuk membeli saham Bumi Plc. *Big Boss* MNC Grup ini mengutarakan sejumlah alasan untuk membeli saham tersebut.

Pertama, karena layak untuk investasi, *kedua* solidaritas sesama pengusaha nasional. Dan *ketiga*, sewaktu-waktu ada saham yang mau dijual, "mereka minta tolong saya, saya bantu," kata Hary (19/2).



Aburizal Bakrie Bos Bakrie Grup

Namun, dia mengaku tidak mengetahui teknis pembelian saham Bumi Plc, sebab awalnya mereka minta tolong. "Saya tidak ingat rinciannya, karena staf saya yang menyelesaikan semuanya." Kata Hary, yang jelas sewaktu minta tolong kepadanya, mereka membutuhkan dana tunai (*cash flow*) dari Recapital.

Peta "perang saham" di Bumi Plc berubah cepat. Bakrie Grup mendapat dukungan Hary, masuk ke perusahaan tersebut dengan membeli 3 juta saham milik Recapital. Manajemen Bumi Plc (18/2), PT Recapital Advisors dan PT Bukit Mutiara mengumumkan menjual 24,20 juta unit atau setara 13,1% saham Bumi Plc kepada tiga pihak. Avenue Luxembourg SARL membeli 13,67 juta unit atau 7,4%; Flaming Luck Investment Ltd, milik keluarga Tanoe membeli 3 juta saham atau 1,7%, dan Argyle Street Management Limited membeli 7,54 juta saham atau 4%.

Dia menolak aksinya terkait kedekatannya dengan Bakrie Grup setelah membeli sejumlah aset milik konglomerasi tambang tersebut. Hary juga merahasiakan harga akuisisi

Bumi Plc, harganya kemarin GBP 389,9 per saham.

Beredar spekulasi bahwa aksi Hary mendukung "penyelamatan" Bakrie Grup tidak lepas dari ambisinya memburu sejumlah aset lain milik Bakrie Grup. Pemilik MNC Grup ini kabarnya akan memborong 70% saham PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) senilai Rp 6 triliun. Dia juga ingin masuk ke dalam PT Berau Coal Energi Tbk (BRAU). Namun, Chairman Bumi Plc, Samin Tan, tidak memberi komentar atas spekulasi tersebut.

Jika kehadiran Hary di Bumi Plc memang bertujuan mendukung Bakrie Grup, posisi suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bakal bertambah. Sebab, Bakrie Grup membutuhkan minimal 8% suara untuk memenangkan pertarungan di Bumi Plc.

Aksi menggalang dukungan bagi kubu Bakrie Grup tidak hanya terjadi di London. Di dalam negeri, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida serta Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, ikut mendukung Bakrie Grup.

Nurhaida menyatakan akan mengambil tindakan tegas jika terjadi perubahan pengendalian Bumi Plc akibat RUPSLB, 21 Februari 2013. Harga saham BUMI (18/2) melonjak drastik, naik 9,41% atau Rp 930 per saham dari hari sebelumnya (17/2).

PT Bakrieland Development Tbk atau ELTY lewat PT Bakrie Swastika Utama dikabarkan menjual lahannya di Rasuna Epicentrum bernilai total Rp 2,5 triliun. ELTY juga telah menjual Bakrie Toll Road (BTR) dan Lido senilai Rp 3 triliun. Kemudian PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) juga telah menjual lahan sawitnya seluas 16.000 hektar. UNSP juga ingin menjual perusahaan olekimia Grup Domba Mas seharga USD 470 juta.

Seteru Makin Panas

Perseteruan Nat Rothschild dengan Keluarga Bakrie di Bumi Plc semakin panas. Bakrie Grup mendapat dukungan bos MNC Grup, Hary Tanoe baru saja membeli 3 juta saham milik Recapital. Di sisi lain, Nat sejak beberapa waktu lalu dikabarkan menggandeng Hashim Djojohadikusumo, pemilik Arsari Grup, masuk ke dalam Bumi Plc.

Hashim kepada Financial Time mengungkapkan perkongsiannya dengan Nat berawal di Belvedere resort, Holland Park, London, Septem-

Hary Tanoë Incar VIVA

Ambisi Hary Tanoesoedibyo untuk menguasai jaringan televisi di Indonesia makin tinggi. Pemilik tiga stasiun televisi ini, berambisi mengakuisisi TVOne dan ANTV milik Bakrie Grup, setelah memiliki RCTI, MNC TV dan Global TV.

Pengelola dua stasiun televisi-TVOne, ANTV dan portal VIVAnews di bawah naungan PT. Visi Media Asia Tbk (VIVA) milik Bakrie Grup, sedang diincar oleh raja media Hary Tanoesoedibyo, pemilik MNC Grup. Boleh dibbilang Visi Media meraih laba cukup berarti bagi Bakrie Grup.

Bantahan tegas datang dari *big boss* perusahaan kelompok Bakrie, Aburizal Bakrie yang beralih jadi politisi, juga calon Presiden Partai Golkar 2014. Aburizal yang mempromosikan nama inisialnya, ARB, dalam kaitan pencalonan tersebut, menyangkal tegas tentang isu penjualan VIVA.

"Namanya isu, tentu tidak benar. VIVA tidak akan dijual," kata ARB kepada pers usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu di Wilayah Timur, di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (9/2). Sangkalan ini menghalau kabar tentang rencana MNC Grup untuk mengakuisisi bisnis media Bakrie Grup, Visi Media Asia, emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode VIVA.

Sinyal kuat bahwa MNC Grup mengincar VIVA datang dari salah satu sayap bisnisnya, yakni PT Global Mediacom Tbk yang menyiapkan dana Rp 4-5 triliun. Sebaliknya, Neil Tobing, Corporate Secretary VIVA,



Hary Tanoesoedibyo, Bos MNC Grup

mengatakan andaikan VIVA dijual, harganya tentu sangat tinggi. "Soalnya nilai kapitalisasi pasar kami cukup besar," kata Neil. Per Jumat (8/2), nilai kapitalisasi pasar VIVA di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp 8,67 triliun.

Hubungan bisnis Grup MNC dan Grup Bakrie belakangan ini cukup intensif. Hary Tanoë juga pengusaha yang beralih jadi politisi, menjalin

hubungan bisnis yang intensif dengan mitranya, ARB. Dia mengakuisisi bisnis jalan tol yang dikelola PT Bakrieland Development Tbk. Namun Hary, pemilik MNC Grup belum memberi konfirmasi tentang rencananya untuk membeli VIVA.

VIVA juga diincar sejumlah perusahaan media lain, salah satunya PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, pemilik stasiun televisi SCTV dan Indosiar. Namun Komisaris Elang Mahkota, Fofa Sariaatmadja, belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut.

Ambisi Hary untuk menguasai jaringan televisi di Indonesia tetap tinggi. Dia berambisi menguasai dua stasiun TV - TVOne dan ANTV - setelah menguasai tiga stasiun televisi, RCTI, MNC TV dan Global TV. Hary beserta gerbong politiknya bergabung dengan Partai Hanura setelah hengkang dari Partai Nasdem.

David Audy, Direktur Global Mediacom, anggota MNC Grup, mengatakan, dana sebesar Rp 4-5 triliun disiapkan untuk membeli media. "Itu dana kas internal kami, khusus untuk ekspansi media. Yang kami lirik saat ini adalah media online," kata David, Kamis (7/2). Global Mediacom membuka opsi pendanaan eksternal seperti pinjaman bank. ■ **Sam Jacoeb**

ber 2012. Perkenalan tersebut diprakarsai teman mereka Robert Friedland, taipan minyak AS. Sebulan kemudian, Hashim setuju bergabung dalam perahu Nat untuk membeli Bumi Plc.

Saat itu perseteruan Nat dan Bakrie Grup sedang memanas. Hubungan baik keduanya retak setelah 2 tahun membentuk Bumi Plc, tahun 2010. Harga saham Bumi Plc terus menurun dengan mencuatnya tuduhan memburuknya manajemen dan manipulasi keuangan Bumi Resources.

Keterlibatan Hashim memperparah intrik sengketa Bumi Plc. Boleh jadi

seteru ini akan membuat dua dinasti politik, Prabowo Subianto (kakak Hashim) dan Aburizal dari Bakrie saling berhadapan dalam pemilihan presiden, tahun 2014. Hashim bukan pemain baru dalam bisnis tambang. Dia melakukan investasi Migas di Azerbaijan, Kazakhstan sampai ke Amerika Serikat. Pria berusia 58 tahun ini akan menyeter jutaan dolar di Bumi jika usulan Nat sukses.

Saham Bumi diperdagangkan pada separuh dari total nilai perusahaan batubara lainnya, karena salah manajemen dan inkompetensi. Menurut Hashim, sengketa yang terjadi telah

menghancurkan kredibilitas dan nama baik banyak perusahaan publik Indonesia. Namun dia percaya direksi baru akan mudah membalikkan persepsi ini dengan memperbaiki manajemen Bumi dan mempublikasikan laporan manipulasi keuangan, seperti yang dituduhkan Macfarlanes.

Meskipun hanya aktor pendukung, Hashim mengklaim koneksi Indonesianya akan membantu kampanye Nat. Hashim memiliki lahan luas di sebelah Berau Coal. Untuk mengembangkan kapasitasnya, Berau butuh izin Hashim melintasi lahannya. ■ **Sam Jacoeb**

Regulasi Lemah, Rokok Merajalela

Rokok masih merajalela di Indonesia. Regulasi yang lemah membuat industri rokok berlomba-lomba memproduksi rokok dan menjualnya kepada siapa saja, termasuk pada anak dan remaja.

Di negara berkembang seperti Indonesia, rokok masih menjadi masalah besar karena cukainya sangat rendah, sehingga harga rokok pun menjadi sangat terjangkau bahkan bagi keluarga miskin. Tarif cukai rokok untuk tahun 2013 rata-rata mengalami kenaikan 8,5 persen. Kenaikan tarif ini tidak terlalu besar sehingga dampaknya ke harga rokok juga minimal.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan, cukai rokok setahun sekitar Rp 55 triliun, tetapi konsumsi rokok, biaya kesehatan, dan kehilangan nilai ekonomi tenaga kerja produktif akibat rokok dalam setahun mencapai empat kali lipatnya yaitu mencapai Rp 225 triliun per tahun. Peneliti Lembaga Demografi FEUI Abdillah Ahsan menambahkan bahwa sistem cukai rokok di Indonesia terlalu banyak penggolongan yang implikasinya memperlebar gap harga antara yang termahal dan termurah. Kenaikan harga jual eceran minimum pun menjadi tidak berarti. Untuk SKT golongan 3 (rokok kretek buatan tangan), harga sebatang rokok naik dari Rp 234 menjadi Rp 250. Lebih murah dari sebungkus permen.

Menurut Abdillah, cukai rokok adalah salah satu instrumen yang ampuh untuk mengendalikan konsumsi rokok. Cukai rokok yang tinggi diharapkan dapat mencegah masuknya perokok pemula. Tarif cukai rokok yang baru lebih menguntungkan industri besar, karena menurut industri besar, kenaikan cukai rokok sangat kecil, dibandingkan golongan lainnya (rokok kretek buatan tangan). Idealnya, cukai rokok harus *single* (berlaku untuk harga per batang rokok), tinggi dan berlaku untuk semua golongan, baik rokok buatan mesin dan tangan.

Saat ini, harga rokok kretek termurah sekitar 5-6 ribu rupiah per bungkus. Cukai tertinggi sekarang Rp 375, bila dikalikan dua menjadi Rp 700. Jadi paling tidak harga rokok termurah harus di atas Rp 700 per batang. Itu pun tidak boleh dijual satuan sehingga harga rokok tidak terjangkau

kau untuk anak-anak dan orang miskin.

Survei tahun 2010 pada 2.000 orang perokok menyimpulkan bila harga rokok sebesar 25 ribu per bungkus dapat membuat mereka berhenti merokok. Artinya, harga rokok harus dinaikkan 2 hingga 4 kali lipat.

Dengan besaran cukai di atas, saat ini cukai rokok dapat menyumbang puluhan triliun rupiah setiap tahun, dan membuat banyak pihak terlena dan menganggap industri rokok memberi lebih banyak manfaat dibanding mudarat. Padahal rokok telah menyebabkan kematian sekitar 400.000 orang (25.000 orang di antaranya perokok pasif) setiap tahun dan jutaan orang sakit serta menjadi tidak produktif.

Penyebab lain merajalelanya rokok di Indonesia adalah regulasi yang lemah. Industri rokok berlomba-lomba memproduksi rokok dan menjualnya, termasuk pada anak dan remaja. Setiap tahun, sekitar 265 miliar batang rokok diproduksi di Indonesia. Iklan dan promosi rokok sangat masif. Televisi, radio, dan media cetak di Indonesia umumnya juga amat haus akan iklan rokok. Ini belum termasuk media luar ruang yang masih tetap diizinkan oleh PP No 109/2012.

Menurut data Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011, jumlah perokok di Indonesia mencapai 61,4 juta penduduk usia 15 tahun ke atas. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah perokok anak yang juga semakin meningkat.

Selain perokok aktif, yang perlu mendapat perhatian adalah orang bukan perokok tapi menghisap asap rokok (perokok pasif). Mereka memiliki risiko terkena



penyakit yang mematikan sebagaimana perokok aktif. Data GATS 2011 menunjukkan sebanyak 78,4 persen penduduk usia 15 tahun ke atas (atau 133,3 juta orang) terkena asap rokok saat berada di dalam rumah meskipun bukan perokok.

Data jumlah perokok hanya ada untuk usia 15 tahun ke atas, belum ada yang 15 tahun ke bawah. Kenyataannya, perokok anak di Indonesia jumlahnya semakin banyak. Bahkan ada fenomena *baby smoker* yang hanya ada di Indonesia. Penyebabnya adalah karena banyaknya bayi dan balita yang mendapatkan contoh buruk dari para orang tua yang terbiasa merokok di dalam rumah. Selain menjadi perokok pasif, si anak akhirnya menganggap merokok adalah perilaku normal yang patut dibanggakan.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kemen-

Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2003.



Kampanye Anti Tembakau

terian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama mengatakan, kebiasaan merokok menyebabkan satu dari 10 kematian orang dewasa di dunia dengan lebih dari 4.000 jenis racun pada tiap batang. Daftar penyakit yang dipicu dari kandungan nikotinnya, di antaranya kanker paru-paru, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, infertilitas pria dan juga disfungsi ereksi alias impotensi.

Sejauh ini, Indonesia adalah negara peringkat ketiga perokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2003. Ironisnya, Indonesia termasuk negara penyusun aktif konvensi yang sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh 174 negara itu.

Saat ini, Indonesia baru menerapkan beberapa poin dari FCTC, yakni upaya untuk pengurangan dan pembatasan iklan rokok serta membuat area khusus untuk merokok. Beberapa poin dari FCTC yang belum dipenuhi Indonesia yaitu, pemberian peringatan bergambar tentang bah-

ya rokok pada produk rokok, pembatasan akses anak terhadap rokok dan penjualan rokok secara tertutup.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan Indonesia perlu ikut meratifikasi penuh Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Ia mengaku, pihaknya terus berupaya mendesak Kementerian Luar Negeri agar Indonesia segera meratifikasi FCTC.

Menurut Nafsiah, ratifikasi ini penting untuk mengendalikan peredaran rokok di Tanah Air. Pengendalian rokok adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah penyakit yang diakibatkan konsumsi tembakau, melindungi hak asasi manusia untuk hidup sehat serta melindungi bangsa dan negara dari kerugian ekonomi yang lebih besar.

Melihat Negara Lain

China dengan penduduk terbesar di dunia mencapai lebih dari 1,3 miliar jiwa, produsen sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia telah menandatangani FCTC pada November 2003 dan meratifikasinya pada tahun 2005. Perusahaan monopoli, Chinese National Tobacco Cor-

poration (CNTC) yang mempekerjakan 10 juta orang, menguasai 98 persen pasar rokok di China dan menghasilkan lebih dari 2,1 triliun batang rokok (2008).

Sekitar sepertiga penduduk dewasa di China adalah perokok. Laki-laki dewasa 53 persen (bandingkan dengan Indonesia yang mencapai 67 persen) dan perempuan 2 persen. Cukai rokok di China sangat rendah sehingga rokok dijual murah sekitar 10-14 ribu rupiah per kemasan. Industri rokok di China berkontribusi 10% dari pendapatan pemerintah pusat.

Sedangkan di India, lebih dari 275 juta perokok atau sepertiga penduduk dewasanya mengonsumsi tembakau. Prevalensi laki-laki perokok 48 persen dan perempuan 20 persen. Rokok dilarang diiklankan dan dipromosikan di media massa, media luar ruang, ataupun menjadi sponsor olahraga dan gelaran musik. India telah meratifikasi FCTC pada 5 Februari 2004.

Produk tembakau yang mendominasi di India adalah semacam rokok lintingan yang dibungkus daun tendu yang dikeringkan, khas India yang disebut bidi. Oleh produ-sennya, bidi diberi perasa menarik seperti vanila, cokelat, stroberi, atau mangga.

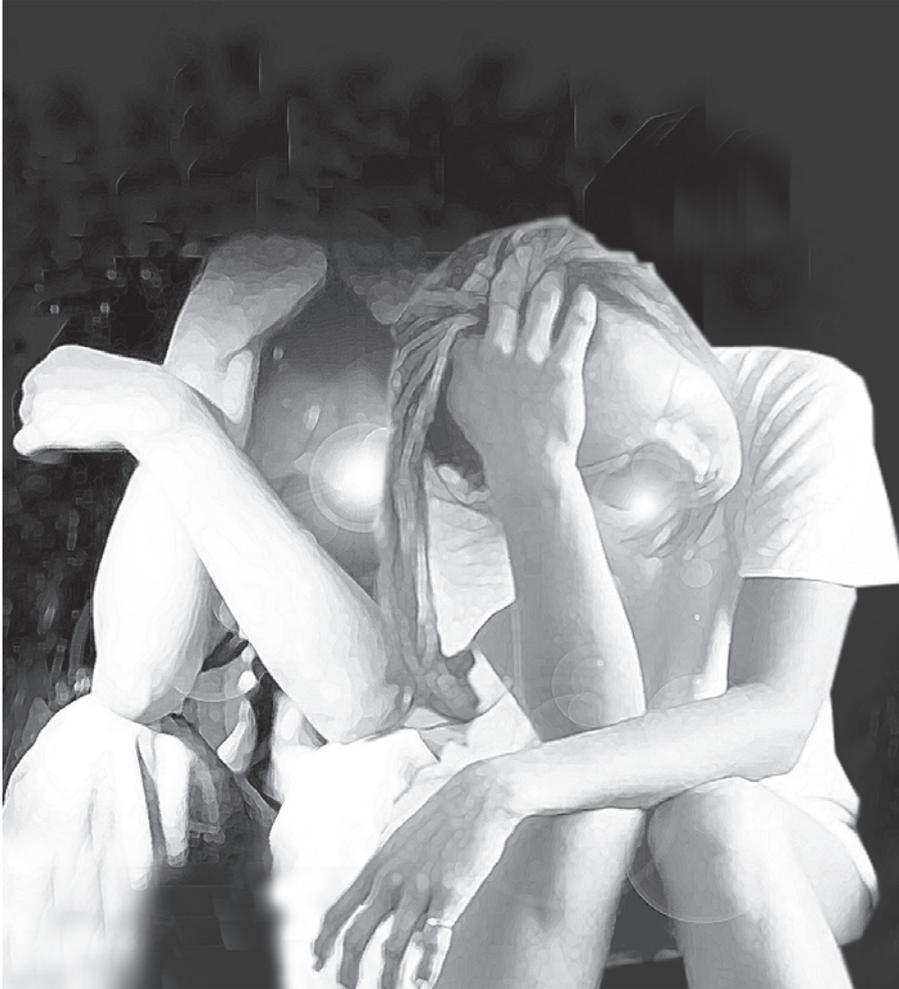
Cukai rokok di India masih rendah sekitar 40 persen dan cukai bidi sekitar 9 persen. Harga bidi di India sangat murah, sekitar Rp 700 per pak berisi 10-12 batang. Harga rokok sekitar Rp 3.600 per pak. Pada tahun 2008, sekitar 98 miliar batang rokok terjual di India. Diperkirakan sekitar satu juta warga India meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh tembakau.

Indonesia perlu belajar pada negara yang tergolong maju dalam regulasi rokok seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Thailand telah meratifikasi FCTC pada 8 November 2004. Thailand mengalami banyak kemajuan dalam mengendalikan konsumsi rokok di negaranya. Ditandai dengan prevalensi perokok yang turun dari 70 persen (tahun 1995) menjadi 40 persen.

Kemajuan Thailand ini didukung oleh sejumlah regulasi pemerintahnya yang mendukung pengendalian tembakau. Pada tahun 1992, Thailand menerbitkan dua perundangan yang mengontrol tembakau yaitu UU Pengendalian Produk Tembakau yang mengatur pengemasan, pelabelan, promosi, periklanan, dan sponsorship produk tembakau. Juga UU Perlindungan Kesehatan bagi Nonperokok yang melarang semua kegiatan merokok di tempat publik, tempat kerja, dan transportasi publik. Harga rokok di negara ini cukup mahal, sekitar Rp 50.000 per pak. Ini karena cukai rokok di Thailand sangat tinggi yang dinaikkan bertahap dari 55 persen (1992) hingga 85 persen (2009). ■ **dgr-pan**

Narkoba Semakin Merasuk

Akhir Januari lalu, tanah air dihebohkan dengan penangkapan belasan artis di kediaman presenter Raffi Ahmad. Mereka ditangkap karena menggunakan *methylone*, bahan baru yang mengandung zat penenang dan bisa memberikan efek pada otak dan syaraf.



Di beberapa negara, obat ini dianggap sebagai obat golongan neuro stimulan dan dilarang untuk diperjualbelikan. Pertama kali dikenal pada tahun 2004 oleh peneliti Belanda dan diperjualbelikan sejak saat itu. Selanjutnya, peredaran obat ini dilarang dan dianggap ilegal karena mengandung substrata atau zat psikoaktif seperti *salvia divinorum*, *psycolibin mushroom* dan zat aktif lainnya. Obat ini bisa memberi rangsangan, rasa senang yang berlebihan, mengurangi rasa cemas, meningkatkan rasa bersosia-

lisasi, sulit tidur, dan susah istirahat.

Dalam kasus penangkapan belasan artis itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan Raffi sebagai tersangka bersama tujuh orang rekannya yang sama-sama ditangkap di kediamannya. Gerakan BNN ini tentu saja seperti menampar keras Presiden SBY yang baru saja memberikan grasi bagi dua gembong narkoba internasional, Mairika Franola alias Ola dan Deni Setia Maharwan. Meski dikritik berbagai pihak, SBY tetap tutup telinga seolah tidak mau tahu bahwa apa yang diputuskannya seperti menganggap

ringan penggunaan dan penyebaran narkoba yang telah banyak menelan korban tersebut. Meski grasi merupakan hak prerogatif presiden, namun apa yang dilakukan SBY juga telah mengabaikan hukum dunia yang hendak menindak tegas gembong narkoba.

Di sisi lain, himbauan berupa spanduk, plakat di pojok-pojok jalan utama di negeri ini agar tidak memakai narkoba sudah begitu banyak tersebar. Begitu pula iklan di media-media elektronik, cetak, hingga media online yang mengkampanyekan "*Say No to Drug* (katakan tidak pada narkoba)". Tetapi sampai sekarang masih banyak orang yang tidak memedulikannya. Dari data BNN diketahui setiap tahun pemakai narkoba (sabu, ganja, ekstasi, heroin dan lain-lain) bertambah.

Tidak hanya BNN, polisi pun sudah sering mengusut pengedaran narkoba dan sejenisnya. Mulai dari membongkar pabrik narkoba besar-besaran beromzet miliaran rupiah hingga penangkapan *cukong* narkoba di bandara atau tempat-tempat lain yang kerap dijadikan area 'empuk' untuk melakukan transaksi. Penangkapan ini bisa bersumber dari pengakuan pemakai yang tertangkap, orang yang sedang melakukan transaksi narkoba dan bisa juga dari keluhan masyarakat yang curiga dengan aktivitas di lingkungan mereka.

Kendati demikian, cerita selalu berbalik arah. Mati satu, tumbuh seribu. Semakin banyak penikmat dan pengedar narkoba ditangkap, semakin banyak pula pengedar-pengedar baru yang siap menggantikan. Inilah fenomena narkoba di negeri ini, yang terus merebak tanpa mengenal batas waktu, jarak, dan usia.

Tak Kenal Status Sosial

Menghentikan peredaran dan penggunaan narkoba tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini karena narkoba telah merasuki masyarakat negeri ini tanpa mengenal usia, identitas maupun status sosial. Dengan kata lain, bila melihat kenyataan beberapa tahun terakhir, maka narkoba menjadi semacam 'panggung' semua kalangan.

Di kalangan artis, tentu saja persoalan narkoba bukan barang baru. Fakta bahwa mereka kerap berhubungan dengan obat pembunuh itu sudah banyak terungkap. Misalnya pada 2010, secara mengejutkan Polda Metro Jaya mengumumkan telah mengantongi 22 artis pengguna narkoba se-

lain Revaldo. Namun polisi enggan mengungkap artis-artis tersebut karena mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Selain Revaldo, ada banyak artis yang diketahui pernah menjadi penikmat narkoba, misalnya Krisdayanti. Ia mengaku mengonsumsi narkoba saat sedang gamang dan stres berat dengan kariernya. Pengakuan yang cukup mengejutkan tersebut terekam dalam buku memoarnya berjudul *My Life My Secret*. Ia berharap kejujurannya bisa menjadi pembelajaran bagi siapa pun. Ada pula nama Gogon. Pelawak jebolan Srimulat ini tertangkap basah petugas Polsek Neglasari, Tangerang, saat sedang menghisap sabu-sabu di kediamannya, Perumahan Bandara Mas, Sela Panjang, pada 2007 silam. Pada 2009, seorang artis Jennifer Dunn juga dipastikan sebagai pengguna narkoba oleh Polda Metro Jaya. Begitu pun dengan Gary Iskak. Bintang sinetron dan film ini menyandang status terdakwa dengan tuduhan memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika jenis sabu-sabu.

Fariz Roestam Munaf atau dikenal dengan nama Fariz RM, juga pernah terlibat dalam dunia gelap narkoba. Penyanyi dan pencipta lagu itu tertangkap membawa ganja dalam razia narkoba yang dilakukan aparat kepolisian. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan 1,5 linting ganja di dalam tasnya. Nama-nama populer yang juga masuk dalam dunia ini adalah Roy Marten. Meski pernah mendekam di penjara karena sabu-sabu, ia kembali tersangkut kasus serupa. Roy dibekuk polisi saat pesta sabu-sabu bersama empat temannya di Apartemen Novotel, Jalan Ngagel, Surabaya, 2007 lalu.

Tidak hanya Roy, seorang rocker gaek, Ahmad Albar juga terlibat skandal serupa. Polisi menemukan 490 ribu butir ekstasi di apartemen yang ditempatinya, di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Sammy, seorang vokalis Kerispatih juga menjadi bagian dari dunia narkoba. Ia ditangkap saat sedang berpesta shabu-shabu di sebuah rumah kos-kosan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, 2010 lalu.

Namun, tidak hanya dunia artis yang menjadi sasaran empuk narkoba. Berbagai profesi mulai dari siswa, hakim, anggota DPRD, hingga orang-orang di lingkungan istana, menjadi subyek kejahatan narkoba. Sebut saja yang terbaru misalnya, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Puji Widjayanto. Setelah dilakukan tes urine, BNN menyatakan hakim itu positif menggunakan narkoba jenis shabu dan ekstasi. Bahkan pada penangkapan Desember 2012 itu, berdasar laporan Puji, Komisi Yudisial (KY) menyebutkan ada 10 hakim yang ditengarai sebagai pengguna aktif zat adiktif itu.

Tidak hanya hakim, beberapa anggota



KHAT: Kahumas BNN Kombes Sumirat menjelaskan kepada masyarakat di Cisarua, Jawa Barat, Selasa (5/2/2013) bahwa tanaman khat mengandung bahan narkotika golongan I karena menjadi bahan baku katinon

DPRD juga terperangkap dalam dunia narkoba. Misalnya, Ate Durangga, anggota Dewan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, digerebek bersama lima orang rekannya di salah satu hotel di Tasikmalaya awal Januari lalu. Bahkan mafia narkoba ini disinyalir sudah masuk ke lingkaran Istana. Dugaan ini semakin kuat setelah Presiden SBY memberikan grasi bagi bandar narkoba, Meirika Franola alias Ola. Padahal Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi ternyata tidak termasuk pihak yang ikut merekomendasikan pemberian grasi tersebut. Sehingga patut diduga ada kekuatan yang turut berperan memengaruhi lembaga yang biasa memberikan masukan terkait dengan pemberian grasi kepada presiden. Dan ini diduga kuat merupakan jaringan istana. Masih adakah lembaga atau profesi yang jauh dari narkoba?

Kenapa Terperangkap Narkoba?

Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa untuk menemukan pengguna-pengguna narkoba di negeri ini tidaklah terlalu sulit. Sebab pengguna narkoba sudah bukan lagi dari golongan-golongan khusus seperti artis dan pejabat negara yang bergelimang harta saja. Tetapi juga dari orang-orang yang lemah ekonominya.

Memang, harus diakui bahwa kuatnya finansial dan tingginya tingkat kesibukan seseorang kerap dijadikan dalih untuk mengonsumsi narkoba. Ada pula yang berdalih, demi ketenangan. Namun bila kita soroti, konsumsi narkoba ini bisa disebabkan faktor-faktor lain yang lebih personal, misalnya kegagalan seseorang dalam menjalani kehidupan yang diakibatkan tidak memiliki rasa percaya diri

ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua atau keluarga mengalami kehancuran (*broken home*); atau karena adanya pergaulan yang bebas di lingkungan yang kurang tepat. Dalam teori Waddington, mengenai "*developmental landscape*" disebutkan, jika seorang anak ditempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika lingkungan itu sangat kuat memengaruhi anak tersebut. Maka, mencari *landscape* (lingkungan) yang baik menjadi hal yang mesti betul-betul diperhatikan bagi kehidupan anak.

Selain faktor-faktor di atas, tentu saja juga karena keringnya kehidupan agama mereka. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Mereka mesti disadarkan tentang bahaya narkoba, sehingga tidak pernah terlintas keinginan untuk mengonsumsi narkoba, walau sekadar coba-coba. Sebab sekali mencoba, maka akan selalu muncul keinginan untuk mengulanginya. Lemahnya pengetahuan tentang bahaya narkoba ini, mungkin saja karena lemahnya sosialisasi maupun penyuluhan membuat banyak remaja 'penasaran' dan ingin mencobanya. Oleh karenanya, penyadaran, penguatan informasi sekaligus pemberian motivasi agar seseorang terhindar dari narkoba perlu digalakkan. Dalam konteks ini, BNN atau lembaga lainnya perlu kiranya menggalakkan sosialisasi tentang bahaya narkoba, baik dengan cara kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun dengan lembaga lainnya. ■ mbi/bh-ilyas

Adu Kekuatan di Perang Cyber

Sekarang, perang sudah bergeser dari metode konvensional ke metode modern. Arenanya terjadi di dunia maya, tentaranya bersenjata komputer, virus dan worm dalam jumlah besar.

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia virtual (tidak nyata) yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Internet membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Sekarang, kita bisa melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *e-banking*, belanja apa saja lewat *e-commerce*, atau belajar apa saja lewat *e-library*. Di sisi lain, internet juga membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pencurian, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil.

Istilah-istilah seperti *cyber war*, *cyber attack*, *cyber espionage*, atau *cyber crime* pun makin akrab kita dengar. Sekarang, target kejahatan di internet (baca: serangan cyber/perang cyber) tidak hanya terjadi antarpribadi dan organisasi, tapi juga sudah dilakukan antarnegara. Kevin Haley, Direktur Security Respon Symantec mengatakan bahwa serangan cyber sudah setara dengan *saber rattling*. Setiap negara, organisasi, atau individu berusaha menunjukkan kekuatan serangan sembari mengirimkan pesan-pesan tertentu.

Sebagian besar serangan cyber yang dilakukan kelompok individu, organisasi, atau negara dilandasi oleh kepentingan politik. Hal itu bisa terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan sebuah kelompok hacktivist bernama Anonymous. Sejak dibentuk pada 2003, Anonymous telah berulang kali melakukan serangan cyber ke berbagai negara. Pada April 2012, misalnya, Anonymous menyerang sejumlah website milik pemerintah Inggris. Anonymous juga diketahui melakukan serangan terhadap CIA pada Februari 2012.

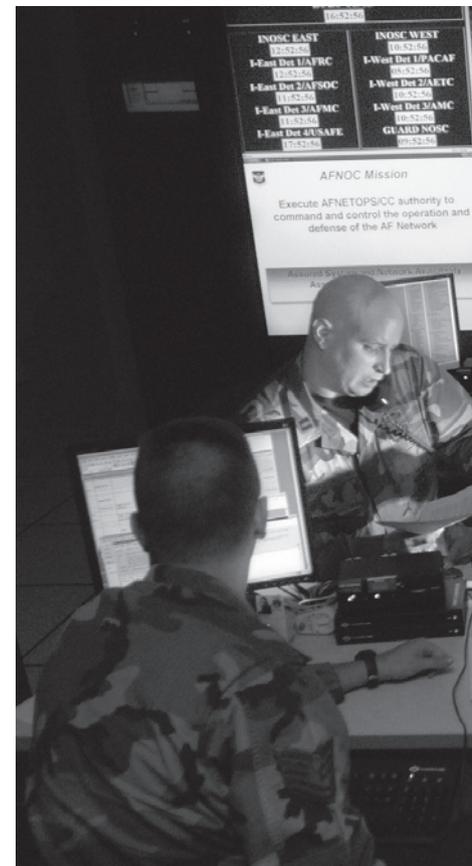
Anonymous juga menyerang Israel sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Jalur Gaza. Anonymous menyen-

barkan 5.000 data pribadi pejabat Israel seperti nama, nomor telepon, alamat surat elektronik, dan media sosial. Salah satu pejabat Israel yang diserang adalah Wakil Perdana Menteri Israel, Silvan Shalom. Sejumlah akun media sosialnya, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, dan LinkedIn, diretas dengan pernyataan pro-Israel. Sejumlah lembaga juga tidak luput dari serangan Anonymous, yaitu Bank Jerusalem, Kementerian Pertahanan Israel, dan situs Pemerintah Israel. Penyerangan situs suatu lembaga atau pemerintahan merupakan bagian dari aksi Distributed Denied of Service (DDoS). Sebelumnya, 3.000 penyandang dana pro-Israel telah diserang Anonymous. Seditiknya, 44 juta serangan cyber dialami Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Situs resmi Takhta Suci Vatikan pun ikut kebakaran jenggot saat jaringannya mati total sebagai wujud protes peretas atas skandal sodomi. Tak sampai di situ, Anonymous berhasil menguak data mengenai konspirasi terbesar abad ini yakni runtuhnya menara World Trade Center pada 9 September 2001. Mereka pula yang berhasil mengungkap data jenazah Usamah Bin Ladin dibakar dan bukan dibuang ke laut seperti diberitakan pemerintahan Amerika.

Dari jutaan anggota Anonymous, diperkirakan 15-20% diantaranya adalah orang Indonesia. Tatkala Malaysia mengklaim tari Tor-Tor sebagai bagian dari budaya mereka, hacktivist asal Indonesia mengamu. Mereka beramai-ramai membobol berbagai situs negara tetangga itu dan diberi tanda Tari Tor Tor Milik Indonesia. Mereka juga mengancam bakal melakukan serangan lebih besar lagi jika Malaysia terus mengklaim budaya Indonesia. Setelah mendapatkan banyak kritik sekaligus serangan negatif dari masyarakat Indonesia, pihak Malaysia akhirnya membuat klarifikasi bahwa tarian itu asli milik Indonesia.

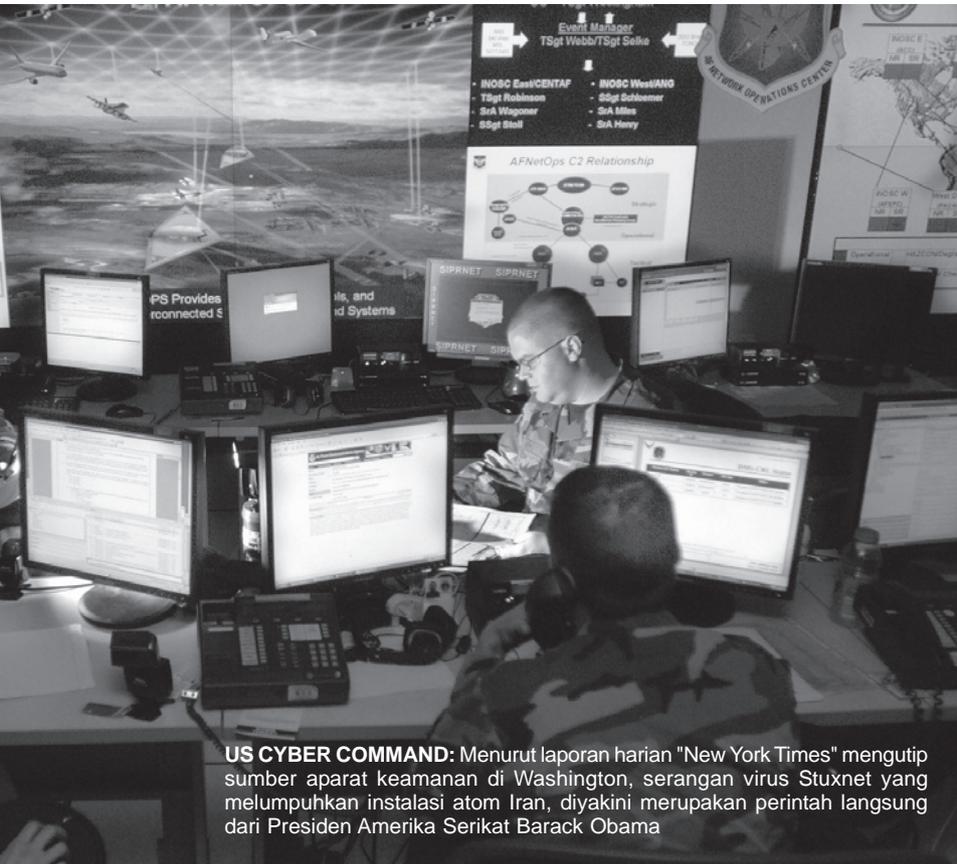
Contoh lain dari perang cyber antar negara adalah serangan cyber terkejut



yang menimpa perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, Saudi Aramco, pada Agustus 2012. Serangan itu sempat melumpuhkan 30.000 komputer pribadi di dalam perusahaan tersebut. Amerika Serikat menuduh Iran berada di balik serangan itu.

Bagi Amerika Serikat sendiri, perang cyber bukan hal baru. Menurut laporan harian "New York Times" mengutip sumber aparat keamanan di Washington, serangan virus Stuxnet yang melumpuhkan instalasi atom Iran, diyakini merupakan perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Gedung Putih tidak menolak atau mengkonfirmasi berita itu. Akibat serangan itu, lebih dari 1.000 sentrifugal di instalasi atom Natanz dapat dilumpuhkan. Stuxnet merupakan virus komputer amat canggih yang dirancang secara khusus menyerang sistem pengendali sentrifugal atom yang dikembangkan perusahaan Jerman, Siemens.

Sementara itu, Cina makin menanggapi serius soal perang cyber ini sejak 2011 dengan membangun pasukan khusus yang disebut sebagai Tentara Biru. Tugas utamanya adalah memperkuat ketahanan Cina di dunia maya. Bahkan China telah menggelar latihan perang untuk mewujudkan hal itu. Senjata yang digunakan adalah virus dan spam dalam jumlah besar.



US CYBER COMMAND: Menurut laporan harian "New York Times" mengutip sumber aparat keamanan di Washington, serangan virus Stuxnet yang melumpuhkan instalasi atom Iran, diyakini merupakan perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama

Situs-situs besar dan populer juga tidak luput dari serangan cyber. Dua situs jejaring sosial, LinkedIn dan eHarmony berhasil dibobol oleh hacker pada Juni 2012. Sekitar 6,46 juta password pengguna LinkedIn dan 1,5 juta password pengguna eHarmony dicuri oleh seorang peretas yang kabarnya adalah anggota sebuah forum di Rusia. Begitu pula situs Facebook, Twitter, Reuters, Foxconn, Sony PlayStation Network, Gmail, dan Yahoo, pernah diretas oleh hacker.

Di Indonesia sendiri, serangan cyber makin sering terjadi. Salah satunya adalah serangan *deface* terhadap situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beralamat di www.presidentby.info, Januari 2013 lalu. *Deface* artinya mengubah atau mengganti tampilan suatu website.

Situs yang memuat berbagai kegiatan presiden itu diubah tampilannya, hanya ada gambar dengan ikon labu mirip gambar pocong bertuliskan *jemberhacker.web.id* dengan latar belakang berwarna hitam, serta tulisan "Hacked by MJL 007! This is a PayBack From Jember Hacker Team." Pada umumnya, *deface* menggunakan teknik Structured Query Language (SQL) Injection, namun untuk kasus situs SBY, menurut sejumlah praktisi teknologi informasi, kemungkinan besar terjadi Domain Name System (DNS)

Poisoning atau populer disebut DNS Hijack (pembajakan DNS), bukan server situs Presiden SBY yang diretas, tetapi terjadi pembelokan ke situs lain. Pembajakan DNS biasanya dilakukan jika server susah diretas.

Aksi meretas situs resmi Presiden SBY itu bukanlah yang pertama. Pada tahun 2007, tampilan muka situs presidentby.info diubah isinya oleh peretas dengan beberapa tuntutan. Isinya, meminta agar Presiden SBY menurunkan harga *bandwidth* agar internet bisa diakses secara murah oleh masyarakat. Mereka juga menuntut agar SBY mendukung Indonesia Goes to Open Sources (IGOS).

Bila kita mundur lebih ke belakang, kita pasti akan mengingat aksi Dani Hermansyah yang melakukan *deface* terhadap website www.kpu.go.id pada 17 April 2004. Nama-nama partai berubah menjadi nama-nama buah. Publik pun menjadi ragu terhadap Pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu. Dikhawatirkan, hacker juga telah mengubah angka-angka jumlah pemilih. KPU pun menjadi sorotan karena dana yang dikeluarkan untuk sistem teknologi informasi yang digunakan oleh KPU saat itu sudah sangat besar.

Perusahaan-perusahaan besar juga tidak luput dari serangan. Sistem keamanan surat elektronik PT Bakrie and Brothers Tbk berhasil dibajak dan dibobol bulan

Desember 2012 lalu. Pihak perusahaan mengakui telah mencurigai beberapa nama pelaku dan sudah menyerahkan nama-nama itu kepada pihak kepolisian.

Teknik lain yang lazim digunakan oleh hacker dalam perang cyber adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem keamanan server/situs alias Cross-site Scripting (XSS). Makin terkenal sebuah website yang mereka obrak-abrik, makin tinggi rasa kebanggaan yang didapat. Teknik ini pulalah yang menjadi andalan saat terjadi perang cyber antara hacker Indonesia dan hacker Malaysia.

Pada tahun 2013 ini, beberapa penyedia jasa layanan keamanan internet memprediksi sedikitnya ada lima tren serangan yakni maraknya *man in browser attack*, *watering hole attack*, *mobile malware*, *cross platform attack*, dan *hypervisor attack*.

Man in browser attack berhubungan dengan maraknya penggunaan *e-banking* dan *mobile banking* yang mengundang penyerang mencuri informasi dari pengguna. Tidak seperti metode *phishing* tradisional yang menggunakan tautan dalam tubuh e-mail langsung kepada pengguna ke situs palsu dan meminta mereka memasukkan data, *man in the browser* mampu langsung menangkap data yang pengguna masukkan. Pengguna tidak akan menyadari datanya dibajak karena berinteraksi dengan situs asli.

Watering hole attack akan meningkat levelnya. Penyerang tidak akan langsung menuju target individu, tapi lebih dahulu menginfeksi situs terpercaya yang sering dikunjungi individu tersebut. Melalui metode ini, penyerang mampu mendapatkan celah untuk menyerang akibat lemahnya situs.

Seiring dengan meningkatnya kepemilikan ponsel pintar, khususnya Android yang pada 2012 memiliki pangsa pasar global terluas yakni 68,3%, *mobile malware* akan menjadi metode penyerangan yang lebih berbahaya. Sementara *cross platform attack* diprediksi menyerang beberapa sistem operasi berbeda seperti Jacksbot.

Selain itu, *hypervisor attack* atau serangan terhadap infrastruktur komputasi awan untuk mencuri data penting perusahaan juga akan makin gencar dilakukan. Kebocoran sejumlah kata kunci pengguna di DropBox dan LinkedIn misalnya, menunjukkan kerentanan penyimpanan data secara awan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan layanan *software as a service* (SaaS) dan layanan berbasis awan lainnya, serangan DDoS pun menjadi perhatian utama di kalangan *chief information officer* (CIO) dan *chief security officer* (CSO). ■ cid

Tim Sembilan Terbelit Tipikor

Kasus tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan PLTU Tarakan akan terus berlanjut. Setelah Walikota diperiksa, kemungkinan Wakil Walikota dan Sekretaris Kota Tarakan akan menyusul.

Hampir tanpa menoleh, Sekretaris Kota Tarakan, Drs H Badrun, M.Si bergegas begitu selesai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Senin siang beberapa pekan lalu. Ia berusaha menghindari dari cegatan wartawan. Sejumlah pertanyaan yang diajukan media ini hanya dijawab, "Bagus, bagus, silakan hubungi Diskominfo," katanya berjalan menuju ruang makan.

Memang, hingga sekarang, Ketua Tim Sembilan pembebasan sedikitnya 28 Ha. lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Maya, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Timur itu disebut-sebut ikut merugikan negara sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp 7,4 miliar. Sejauh ini, orang nomor tiga di Pemerintahan Kota Tarakan ini dipanggil Polres Tarakan hanya sebatas saksi. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan dijadikan tersangka. "Kita lihatlah nanti perkembangannya. Kami masih terus mengusut kasusnya," kata Kapolres Tarakan, AKBP Desman Sujaya Tarigan, SH.

Polres Tarakan sudah menetapkan tujuh tersangka. Lima orang diantaranya dari Tim Sembilan, masing-masing, mantan Asisten Satu Pemkot Tarakan, Drs Nasib MAP ; mantan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Tarakan, Abu Bakar ; Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Pemetaan BPN Tarakan, Puryono ; Camat Tarakan Utara, Jarkasih, SE dan Lurah Juwata Laut Arispriyanto, SE.MM. Mereka sudah ditahan bersama dua orang, I Gusti Ngurah Armata, oknum Brimob dan Muallik warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Berkas ketujuh tersangka, menurut Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan, SH sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan tidak menutup kemungkinan tersangka lain akan bertambah. Tapi, Tarigan enggan menyebut nama-nama yang bakal jadi tersangka.



Pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Kapolres Tarakan, AKBP Desman Sujaya Tarigan, SH

Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Tarakan mendesak Polres Tarakan untuk segera menyeret semua pejabat yang tergabung dalam "Tim Sembilan" beserta mereka yang terlibat memproses pembebasan lahan seperti Wakil Walikota Tarakan, dan seorang oknum anggota DPRD Tarakan untuk diproses secara hukum. Namun, belum jelas apa keputusan penyidik terhadap status mereka. Di sisi lain, diduga kuat kemudahan pengurusan pembebasan lahan tanah tidak bertuan di Sungai Maya tidak terlepas dari peran serta orang-orang dalam tersebut.

Anggota DPRD Tarakan, H Fadlan Hamid mengatakan, saat pembebasan lahan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, legislatif tidak pernah dilibatkan. "Pemkot seharusnya mengkonsultasikannya dengan DPRD Tarakan sebelumnya. Ini menyangkut uang ganti rugi yang jumlahnya miliaran rupiah. Saya sendiri di Komisi Satu tidak pernah diberitahu," katanya.

Walikota sendiri, memang sudah di-

panggil untuk didengar penjelasannya, karena ia yang membentuk tim. Dan, hasilnya? Kapolres meminta agar kasus ini dipercayakan sepenuhnya kepada Polres Tarakan. "Tolong dipercayakan kepada kami. Saya dan jajaran kami punya komitmen untuk mengungkap kasus ini secara profesional," kata Tarigan. "Mari kita lihat masalah ini secara keseluruhan karena ini kepentingan kita bersama. Dan sebagai profesi, polisi wajib melindungi aset negara," imbuhnya.

Soal lahan pembangunan PLTU yang telah menyeret lima anggota Tim Sembilan, seorang anggota Brimob, dan seorang warga masyarakat Kampung Bugis ke dalam bui, jadi perdebatan sengit. Fadlan Hamid mengatakan, lahan tersebut milik beberapa orang warga yang berdomisili di Juwata Laut, Tarakan Utara. "Mereka memiliki data-data otentik sebagai bukti kepemilikan," kata politisi dari PPP itu kepada Berita Indonesia Biro Kaltim di Tarakan.

Penjelasan ini bertolak belakang dengan pernyataan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Baya Taka Tarakan. Sebab siapapun yang mengaku lahan yang ditumbuhi batang nipah itu sebagai miliknya tidak jadi masalah asalkan punya bukti kepemilikan. "Kalau ada surat-surat kita serahkan kepada Kepolisian untuk diuji keabsahannya di laboratorium," kata seorang anggota kelompok tani kepada media ini. Sepengetahuannya, di lokasi tersebut tidak ada kegiatan dari dulu. Kecuali kegiatan menangkap ikan dan udang di Sungai Maya yang dilakukan warga Tidung secara turun temurun. ■ **slp/yuri**



Lahan di sekitar Sungai Maya, Juwata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

Menjadi Milik Orang Berdasi

Perkembangan Kota Tarakan membuat lahan kosong menjadi milik para pejabat dalam sekejap. Lokasi pembangunan PLTU Sungai Maya misalnya, satu dari sekian bukti.

Terik panas matahari tidak mampu mengurangi langkah Tim Investigasi Berita Indonesia untuk mendatangi lokasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sungai Maya, Juwata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Sebuah perahu nelayan yang sedang menebar jaring ikan acuh menyambut kedatangan kami. Tapi, setelah tahu, kami dari majalah Berita Indonesia segera terjalin keakraban. "Kedatangan kalian tidak tepat. Seharusnya waktu air pasang supaya bisa naik ke darat," kata Ujang Djamel warga Juwata Laut. Nelayan yang berusia lebih 70 tahun ini sepertinya tahu tujuan kami untuk melakukan investigasi lokasi yang menyeret sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tarakan masuk bui.

Menurut Djamel, masalah lahan, bukan pada persoalan tumpang tindih kepemilikan. Masalah kepemilikan seharusnya dilihat dari sejarah warga Tidung, sebutan suku penduduk asli yang mendiami Tarakan dan pulau-pulau di wilayah

pantai Kaltim wilayah Utara. Sebab, nama sungai Maya sendiri berasal dari bahasa Tidung, yang artinya "ikut". Selain itu, dari dulu di daerah itu tidak ada kegiatan seperti orang berkebun kecuali untuk tempat memasang bubu atau kelong di sepanjang muara sungai - mulai dari sungai Binalantung sampai sungai Maya. "Semua ini masih hutan nipah dan kayu api-api tempat baho (babi) dan bekantan atau monyet belanda (kera hidung panjang) mencari makan," kata Djamel.

Toh, seorang pengusaha Tarakan Budi Kartono mengakui lahan seluas 110 Ha di Sungai Maya sebagai miliknya. Ini sesuai surat Nomor 0150/HJH/TK/1990 tanggal 15 September 1990 yang diajukan PT Tarakan Estetika Plaza kepada pemerintah. Atas dasar permohonan ini, keluarlah rekomendasi Kepala Desa Juwata Laut, Nurda Gani dengan Nomor 162/KD-JL/06/IX/1990 tanggal 22 September 1990 untuk usaha perkebunan kelapa hibrida.

Rencana pemilik Tarakan Plaza Hotel itu untuk berkebun di ujung pulau Tarakan disambut baik pemerintah. Buktinya,

Camat Tarakan Barat meneruskan ke Bupati Bulungan cq. Badan Pertanahan Negara (BPN) Bulungan meneruskan ke jenjang lebih tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya, Pemprov Kaltim memang menyetujui ijin prinsip tersebut setelah mendapat advis teknis dari Pertamina Kalimantan di Balikpapan dan Dinas Perkebunan Kaltim. Dan, terhadap permohonan tersebut, Kanwil Kehutanan Kaltim mengeluarkan ijin nomor 5515/KWH/PTGH-3/1991 untuk masa 6 bulan, tanggal 19 Desember 1991. Hanya saja, ijin tersebut tidak dapat direalisasikan oleh pihak pemohon yang ingin menjadikan perkebunan tanaman kelapa hibrida di areal termohon. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya - semua ijin yang dimiliki PT Tarakan Estetika Plaza, batal demi hukum.

Diduga, setelah ada rencana Pemkot Tarakan beralih dari listrik diesel dan gas, ke listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, lokasi yang pernah dimohon oleh PT Tarakan Estetika Plaza yang dalam hal ini Budi Kartono diserahkan kepada oknum Dan Sat Brimob Tarakan Amustian. Itu, terjadi pada 28 Agustus 2008. Amustian yang berpangkat Letnan Satu ini kemudian menyerahkan lagi kepada oknum Anggota Kesatuan Brimob Tarakan I Gusti Ngurah Arnata pada 24 Februari 2011. Kemudian, lahan dibagi menjadi 29 kapling masing-masing 2 Ha, yang dilegalisir oleh Nurda Gani, mantan Kepala Desa dan Yohanes sebagai mantan ketua RT Desa Juwata Laut.

Selanjutnya, Camat Tarakan Utara Jarkasih, SE menerbitkan SIMTAN (Surat Ijin Menempati Tanah Negara) untuk masing-masing pemilik pada 20 Desember 2010. Lahan inilah yang kemudian dibebaskan Pemkot Tarakan dengan biaya sebesar Rp. 7.437.350.000. Diduga, penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Sungai Maya Juwata Tarakan, merupakan salah satu dari sekian lahan yang dibebaskan untuk kepentingan pemerintah.

Berbagai kalangan di Kota Tarakan berharap agar pembangunan PLTU di Sungai Maya segera dibangun. Paulus Turu, misalnya menghimbau agar Pemerintah segera mencari solusinya. "Jika ada masalah di lapangan, tolonglah yang membidangi segera menyelesaikan," kata Paulus. Menurut anggota Komisi Satu DPRD Tarakan ini, ia kuatir jika pembangunan PLTU berlarut-larut, dana yang sudah dikucurkan sebesar Rp 270 miliar oleh pemerintah pusat ditarik kembali. ■ **slp/yuri**

Penyelewengan di Balik Empat Kapal

Empat kapal perintis sudah lama berhenti beroperasi namun dana operasional kapal tersebut selalu dianggarkan setiap tahun.

Untuk memajukan kota Batam khususnya masyarakat *hinterland* (masyarakat pulau), Pemko Batam memberikan bantuan berupa empat unit kapal Perintis untuk memudakan *hinterland* menjangkau pulau-pulau. Kapal-kapal tersebut dianggarkan dari APBD dengan dana sebesar 3 miliar rupiah.

Keempat kapal yang dipesan dari PT. M. Gemanusa itu antara lain KM. Sri Bulang, KM. Sri Lengkang, KM. Sri Todak dan KM. Sri Galang. Namun, masyarakat *hinterland* tidak lama menikmati kehadiran kapal itu karena sudah disimpan di sebuah workshop di daerah Batu Aji Batam.

Dari hasil temuan BPK pada tahun 2006, hasil penerimaan penjualan tiket kapal perintis ini tidak sebanding dengan biaya operasional, dimana Pemko Batam mensubsidi biaya operasional dan pemeliharaannya hingga ratusan juta rupiah. Pada tahun 2007, keempat unit kapal perintis ini hanya mampu memberikan PAD sekitar 700 juta, padahal target yang ditetapkan di APBD sebesar Rp1,2 miliar. Dari data yang berhasil dihimpun Berita Indonesia, pengoperasian dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. PCB yang diatur dalam kontrak kerjasama dengan Dinas Perhubungan (13/01/2005).

Di dalam draf anggaran APBD Kota Batam tercantum biaya pengoperasian dan pemeliharaan rutin secara berkala. Namun, biaya yang dianggarkan dalam APBD dari tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak pernah terealisasi alias raib entah kemana. Ada dugaan bahwa Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pengguna anggaran memberikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif untuk menutupi kecurangan di Dinas Perhubungan.

Kepala Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Batam, Failasuf,



mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya anggaran untuk perawatan kapal perintis pada tahun 2011, karena sepengetahuan Failasuf, kapal itu tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011 dan sudah diserahkan ke bagian aset Pemko Batam. "Untuk lebih jelasnya, tanyakan saja kepada Kepala dinas," kata Failasuf.

Kepala Dinas Kota Batam Zuhendri mengatakan, jika sudah diserahkan ke aset artinya sudah tidak beroperasi lagi dan otomatis tidak bisa dianggarkan lagi. Karena saat akan diajukan usulan anggaran dibahas terlebih dahulu oleh tim Banggar Pemerintah Kota bersama Tim Penggar DPRD, dan setiap akhir tahun, pelaksanaan kegiatan diaudit oleh Pengawas internal Inspektorat dan pengawas ekster-

nal: BPK dan BPKP. "Suatu kegiatan pada tahun tersebut tidak bisa dilaksanakan jika tidak dianggarkan," ujar Zuhendri.

Ketua LSM Gebuki Thomas AE mengatakan, Kepala Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Batam, Failasuf merupakan orang yang paling tahu tentang kapal perintis ini. "Kita tidak bisa percaya begitu saja dengan *statement* Failasuf. Dia adalah pengguna anggaran," kata Thomas. Diduga kuat, Failasuf telah menyelewengkan anggaran dana pengoperasian dan perawatan kapal perintis tersebut. Karena dari tahun 2010, kapal tidak beroperasi lagi mengangkut penumpang dari pulau ke pulau. Thomas berharap Kejaksaan Negeri Batam segera mengusut lebih jauh kasus dugaan korupsi ini. ■ **rid**

Tersandung 'Karung Beras'

Semenjak 1 April 2009, Pemerintah menetapkan Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPB) Free Trade Zone (FTZ) wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Namun, pemberlakuan/penerapan peraturan dan ketentuan itu masih menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Bintan khususnya. Masalahnya, keberadaan infrastruktur pelabuhan bongkar muat barang (*loading and unloading cargo*) berbagai jenis kebutuhan masyarakat di Tanjung Uban Kawasan FTZ bagian Utara dari tahun ke tahun masih sebatas khayalan Pemerintah Daerah.

Sehingga, baik sebelum dan sesudah Bintan Bagian Utara masuk dalam wilayah kerja Badan Pengusahaan KPBPB Bintan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang impor (gula, beras, kacang kedele, pupuk, bawang putih, dsb) dipasok oleh beberapa orang pedagang secara ilegal dari Kawasan Berikat/Perdagangan Bebas Batam. Pengangkutan berbagai jenis komoditi barang dagang tersebut dari

Batam dengan Pompong (sarana angkutan laut) bertonage, daya angkut 3, 5, 10, 20 sampai ratusan ton. Bongkar muat dilakukan di pelabuhan tikus (tidak resmi) seperti Gentong, Pasar Baru, Mentigi dan Pasar Lama. Miliaran kerugian negara setiap bulan dari penerimaan bea masuk, cukai, pajak, selama ini tidak pernah menjadi perhatian dari instansi terkait.

Hal yang berbeda terlihat pada pasokan barang dagangan yang diangkut puluhan truk setiap hari dari Batam melalui pelabuhan RoRo yang harus dilengkapi dengan dokumen resmi bayar cukai, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahkan, hari Minggu 20 Januari 2013 lalu, dua truk bermuatan beras impor sebanyak 330 karung isi 25 kilogram ditangkap Pencegahan Penindakan (P2) Subseksi Hanggar Bea dan Cukai Tanjung Uban, di sekitar pelabuhan Gentong Pasar Baru. Truk bersama muatan (beras impor ilegal) tersebut diamankan di gudang Bea & Cukai Bati V Tanjung Pinang. Menurut petugas P2 Bea Cukai Tanjung Uban, penangkapan dilakukan terhadap beras impor yang tidak dilindungi dokumen alias ilegal di jalan keluar pelabuhan tikus yang hendak mengantarkan beras tersebut kepada pedagang di Tanjung Pinang.

Dari supir, mereka tahu siapa pemilik beras yang sebenarnya. Mereka melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Kepabeanan, terang petugas bea cukai yang tidak bersedia namanya ditulis. Kepala Kantor Pengawasan dan Penindakan (KPP) Bea dan Cukai Tipe Madya Tanjung Pinang yang dikonfirmasi via pesan pendek, membenarkan penangkapan 2 truk bermuatan beras impor ilegal itu. "Mengetahui hukumnya 'Barang Disita Negara'," katanya.

Pemilik barang, Indra Setiawan alias Een yang dikonfirmasi Berita Indonesia melalui SMS (24/1/2013) mengakui bahwa 330 karung beras impor yang diangkut dari Batam lalu ditangkap petugas Bea Cukai itu adalah dagangannya. Een yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Bintan itu mengakui menjual beras impor ilegal, sebagaimana dipublikasikan beberapa media di Bintan, 21 Jan 2013. Tujuan memperjualbelikan beras impor adalah lebih murah dari beras lokal sehingga membantu masyarakat. "Usaha ini sudah ada sejak almarhum ayah saya, dan bukan saya saja yang memiliki usaha seperti ini. Banyak yang lain kok. Dan semua diamankan dulu. Tapi kok saya saja yang disorot," katanya. ■ **rid**

Ganjil Genap Pro Si Kaya

Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pro orang-orang kaya adalah akan diterapkannya nomor polisi ganjil-genap dalam upaya mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. Kebijakan itu dinilai sangat prematur karena tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai.

Tidak selamanya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah bawah. Kali ini, penguasa Jakarta tersebut, secara jelas, mengutamakan kepentingan orang-orang kaya. Jokowi bersikukuh akan melaksanakan kebijakan kendaraan bernomor polisi ganjil-genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta pada Juni 2013 setelah diundur dari rencana semula pada Maret 2013.

Kebijakan ganjil-genap ala Jokowi itu akan membatasi kendaraan bermotor (mobil) memasuki jalan-jalan di wilayah Jakarta berdasarkan nomor polisi ganjil-genap yang ditandai dengan pemberian stiker. Akan diatur hari-hari tertentu untuk ganjil-genap tersebut. Misalnya, hari Senin hanya kendaraan bernomor polisi ganjil yang bisa melintas di Jakarta. Selasa, genap dan seterusnya.

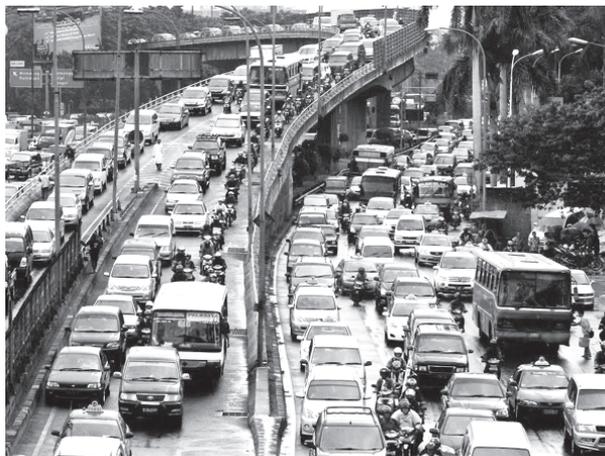
Kebijakan ini dinilai sangat prematur, tidak realistis dan sangat berpihak kepada orang-orang kaya, karena sama sekali belum didukung dengan sarana transportasi umum yang memadai.

Kenapa kebijakan ganjil-genap ini dinilai berpihak kepada orang kaya dan mengorbankan orang kecil dan menengah bawah? Karena kebijakan ini hanya akan sangat menyulitkan kelompok masyarakat menengah bawah (pekerja) dan akan menguntungkan orang-orang kaya. Sebab orang-orang kaya akan menguasai lalu lintas Jakarta. Bagi orang kaya, membeli dua-tiga-empat mobil, minimal dua (ganjil dan genap) untuk setiap anggota keluarga bukan hal sulit. Mereka tidak mungkin beralih menggunakan transportasi umum, apalagi dalam kondisi kurang memadai (manusiawi) seperti sekarang.

Kebijakan ini hanya berdampak kepada kelompok menengah bawah, pemilik kendaraan 'butut' dan/atau ber-cc 1500 yang terpaksa membeli kendaraan karena tidak memadainya kendaraan umum. Sebagian mereka kemungkinan akan memaksakan diri mencicil mobil bekas atau baru agar bisa memiliki mobil bernomor polisi ganjil dan genap. Atau terpaksa melanggar hukum dengan memalsukan nomor polisi

atau stiker ganjil-genap.

Selama sarana transportasi umum belum memadai, kebijakan ganjil-genap ini tidak akan efektif mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. Justru akan memicu pembelian mobil bekas dan baru semakin banyak. Paling tidak akan mendorong pa-



Jakarta macet, transportasi massal tak memadai

ra orang kaya memiliki dua mobil untuk setiap anggota keluarga. Dan, merekalah yang berselancar menikmati kebijakan ini. Sementara sebagian besar kelompok menengah bawah (pekerja) akan terpaksa menderita menggunakan kendaraan umum yang belum manusiawi.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memperkirakan akan ada 2 juta orang yang terkena dampak. "Kita tidak hanya bicara di Jakarta, tetapi di Jabodetabek. Kita bicara sekitar 4,5 juta (orang) perjalanan yang masuk setiap hari. Dengan kebijakan ini, akan ada 2 juta orang yang terkena dampak," kata Danang.

Danang menilai, perkembangan pertumbuhan moda transportasi di Jakarta, khususnya untuk mendukung kebijakan ganjil-genap, belum mampu menampung dampak kebijakan itu, baik dilihat dari segi penambahan rute maupun sarana transportasi yang tersedia. Menurutnya, paling tidak dibutuhkan sekitar 10.000 bus baru on top dari sekarang untuk bisa mengakomodasi 2 juta orang itu. Makanya, Danang menyarankan supaya mengevaluasi betul program ganjil-genap itu sebelum dijalankan.

Danang meminta Pemprov DKI untuk meninjau kebijakan itu dari segi mobilitas masyarakat Jakarta, apakah kebijakan tersebut berimplikasi terhadap mobilitas masyarakat, hak asasi dalam berkendaraan, dan perekonomian Jakarta khususnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga mengatakan, kebijakan Jokowi soal ganjil-genap itu sangat tak realistis. Neta mengatakan, seharusnya Jokowi membenahi dulu angkutan umum yang sangat tidak memadai. Menurutnya, pelayanan busway saja masih sangat buruk, selain berjubel, di atas jam 21.00, busway tidak berhenti di semua halte.

Maka, Neta mendesak agar Polda Metro Jaya tidak mendukung gagasan ganjil-genap tersebut karena sangat tidak realistis dan akan merugikan rakyat. Menurut Neta, bukan langkah seperti itu yang mesti diambil oleh Pemprov DKI. "Justru yang mesti lebih diperhatikan adalah mengenai pertumbuhan kendaraan bermotor dan tidak adanya langkah pengendalian produksi kendaraan bermotor itu sendiri yang jumlahnya terus meningkat," kata Neta.

Menurut Neta, terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnya konsep pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Bahkan, pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan asing dalam mengumbar produksi kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintah tidak peduli dengan keberadaan angkutan umum (massal). "Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi (mobil atau motor)," ujar Neta.

Gubernur Jokowi dengan santai menanggapi pro kontra mengenai kebijakan sistem ganjil genap ini. Menurutnya, sebuah kebijakan selalu ada yang pro dan kontra. Dia menegaskan, untuk mengatasi kemacetan Jakarta butuh kebijakan radikal. Salah satunya adalah menggunakan sistem ganjil genap untuk kendaraan seperti mobil. Jokowi membantah kebijakan ini akan menelan Rp62 miliar tahun ini. ■ mbi-tsl



Bukan Simbol Belaka

Kampanye The 60+ Earth Hour ternyata berdampak besar bagi pelestarian lingkungan. Kampanye ini terus mendapat dukungan dan diikuti oleh banyak negara di dunia.

Kegiatan kampanye The 60+ Earth Hour 2013 yang direncanakan berlangsung selama 60 hari sudah dimulai sejak 22 Februari 2013. Kampanye ini dimulai 30 hari jelang hari-H puncak acara pada 23 Maret hingga berakhir 30 hari kemudian pada 22 April 2013. Puncak acara Earth Hour akan dilangsungkan dengan aksi pemadaman secara serentak mulai pukul 20.30-21.30 waktu setempat. Durasi yang memakan waktu 60 hari ini memang sengaja ditekankan karena selama ini masyarakat awam berpikir Earth Hour hanya berlangsung satu jam pada akhir bulan Maret tiap tahunnya.

Gerakan yang digalang WWF (World Wide Fund for Nature) ini rutin digelar tahunan bertujuan untuk mengajak masyarakat dunia menyelamatkan bumi demi keberlangsungan serta kesinambungan lingkungan dan alam. Berawal dari kota Sydney, Australia, di tahun 2007, program Earth Hour meluas dan dilakukan di berbagai kota di dunia. Cara yang ditempuh sangat sederhana yaitu mematikan listrik selama satu jam berdasarkan waktu lokal yang sudah ditetapkan. Dukungan kampanye hemat energi diwu-

judkan dengan meminta pengusaha di bidang restoran, hotel, tempat hiburan dan instansi pemerintah supaya mengurangi penggunaan daya listrik.

Bagi Indonesia, tahun 2013 adalah kali kelima ikut berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour. Tahun 2012, DKI Jakarta sebagai tuan rumah Earth Hour 2012 di Indonesia, berhasil menurunkan beban listrik hingga 214 Mega Watt (MW). Listrik sebanyak ini sama dengan menghemat bahan bakar minyak sebanyak 64.000 liter atau setara dengan penurunan emisi karbon sebesar 154 ton.

Kampanye Earth Hour 2012 di Indonesia sukses dilaksanakan di 22 kota, menyoentuh 255 komunitas, 77 sekolah, 44 universitas, dengan total satu juta orang. Aksi nyata yang dilakukan oleh mereka yang terlibat, beragam. Seperti Yosef (21) yang menghindari penggunaan kantong plastik atau Dian (21) yang lebih memilih kendaraan umum dibanding transportasi pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan WWF Indonesia, mematikan lampu selama 1 jam dapat menghemat 300MW (cukup untuk mengistirahatkan 1 pembangkit listrik dan menyalakan 900 desa),

mengurangi beban biaya listrik seperti kota Jakarta sekitar Rp 200 juta, mengurangi emisi sekitar 284 ton CO₂, menyelamatkan lebih dari 284 pohon, menghasilkan O₂ untuk lebih dari 568 orang.

Pada 2009 dan 2010, Earth Hour menjadi kampanye lingkungan hidup terbesar dalam sejarah karena berhasil mengikutkan 1,5 miliar warga dari 4616 kota di 128 negara. Di tahun 2011, total negara yang berpartisipasi mencapai 135 negara, dengan 5251 kota dan 1,8 miliar partisipan.

Sejak tahun 2011, ada sedikit perbedaan pada simbol Earth Hour yakni ditambahkan simbol "Plus" (+) pada sisi sebelah kanan angka 60. Penambahan simbol "Plus" tersebut memiliki arti bahwa kampanye Earth Hour tidak sekadar pada penghematan energi listrik, tetapi juga pada kampanye ramah lingkungan lainnya, seperti pemakaian kertas daur ulang, penanaman pohon, pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam.

Dengan dilaksanakannya Earth Hour tahun 2013 ini, diharapkan tidak hanya sebagai simbol belaka, namun bisa menjadi awal sebuah aksi dan gaya hidup hemat dan ramah terhadap lingkungan.

■ pan

Catatan untuk Wisata Kuliner

Beragam kuliner nusantara belum serius dieksplorasi untuk dijadikan promosi pariwisata maupun produk pariwisata.

Bagi mereka yang hobi makan/jajan, ketika mendengar kata "Wisata" maka yang melintas pertama kali di pikiran pastilah "Wisata Kuliner". Ke mana pun kaki melangkah, mereka akan mencari tempat makan atau restoran yang terkenal dengan makanan enaknya.

Kegiatan berwisata kuliner pastilah tiada habisnya. Pasalnya, kuliner Indonesia sangat beragam. Tiap daerah mempunyai menu masakan tersendiri dan punya ciri khas. Namun sayang, belum banyak kuliner tradisional Indonesia yang terekspos dengan baik. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kita sudah terbiasa menjumpai masakan-masakan Padang, Manado dan Makassar. Namun masakan asal daerah lain misalkan Bali, masih terhitung oleh jari.

Soal destinasi wisata kuliner pun, belum semua daerah di Indonesia mengembangkannya secara serius. Sejumlah daerah yang sudah akrab bagi wisatawan kuliner adalah kota Yogyakarta, DI Yogyakarta ; Medan, Sumatera Utara ; Bandung, Jawa Barat ; Padang dan Bukittinggi, Sumatera Barat ; Bogor, Jawa Barat ; dan Malang, Jawa Timur. Kota Bandung misalnya, sejak 1941, sudah diposisikan sebagai sentra kuliner nusantara karena memiliki jumlah rumah makan terbanyak di seluruh Indonesia. Beberapa produk makanan yang sudah terkenal antara lain Brownies Amanda, Pisang Molen Kartika Sari, Yoghurt Cikapayang, Bumbu Desa, dan lain-lain.

Sedangkan dari segi promosi pariwisata maupun produk pariwisata, kuliner masih disepelekan. Padahal, negara lain sudah berupaya menciptakan *image* masakan nasional. Singapura, misalnya, telah menetapkan laksa sebagai masakan nasional. Tempe, rendang, dan nasi goreng telah menjadi hak paten Malaysia. Negara Thailand sudah membuat program promosi pariwisata melalui pendekatan kuliner, yaitu "Thai Kitchen to The



Menu kuliner Jawa

World". Dengan program tersebut, restoran-restoran Thailand di berbagai negara di dunia makin banyak bermunculan. Sehingga, walau tak ke Thailand, orang-orang seluruh dunia dapat merasakan masakan Thailand.

Oleh sebab itu, untuk menghindari hilangnya khazanah kuliner nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) membentuk Kelompok Kerja yang melibatkan 40 orang terdiri dari pencinta kuliner, ahli kuliner dan pebisnis kuliner. Setelah bekerja sekitar empat bulan, pokja menetapkan 30 ikon kuliner yang terdiri atas makanan dan minuman khas Indonesia, mulai dari makanan pembuka, menu utama, hidangan penutup hingga kudapan.

Makanan yang menjadi ikon Indonesia mempertimbangkan *tasty* (rasa), *healthy* (sehat), dan *beauty* (menarik). Artinya, tidak hanya menonjolkan sisi rasa enak saja, melainkan juga aspek nutrisi dan penyajiannya. Nasi Tumpeng misalnya dipilih sebagai andalan ikon kuliner tradisional Indonesia dengan beberapa pertimbangan, dianta-

ranya mempunyai dasar filosofi Indonesia yang kuat serta mempresentasikan budaya makan orang Indonesia, memiliki tampilan yang menarik, mudah dibuat di luar negeri dan dapat dijadikan sebagai menu wajib restoran Indonesia di luar negeri.

Sedangkan 29 ikon lainnya adalah Ayam Panggang Bumbu Rujak Yogyakarta, Gado-gado Jakarta, Nasi Goreng Kampung, Serabi Bandung, Sarikayo Minangkabau, Es Dawet Ayu Banjarnegara, Urap Sayuran Jogjakarta, Sayur Nangka Kapau, Lumpia Semarang, Nagasari Jogjakarta, Kue Lumpur Jakarta, Soto Ayam Lamongan, Rawon Surabaya, Asinan Jakarta, Sate Ayam Madura.

Berikutnya Sate Maranggi Purwakarta, Klappertaart Manado, Tahu Telur Surabaya, Sate Lilit Bali, Rendang Padang, Orak-arik Buncis Solo, Pindang Patin Palembang, Asam Padeh Tongkol Padang, Nasi Liwet Solo, Es Bir Pletok Jakarta, Kolak Pisang Ubi Bandung, Ayam Goreng Lengkuas Bandung, Laksa Bogor, dan Kunyit Asam Solo.

Kemenparekraf menginginkan semua acara Indonesia dan semua restoran Indonesia di luar negeri mengembangkan

30 ikon kuliner tersebut. Misalnya dengan menyajikan makanan Indonesia dalam Internationale Tourismus-Borse Berlin (ITB Berlin) pada 6-10 Maret di Berlin. Dalam salah satu menu jamuan makan malam yang dihadiri oleh pelaku pariwisata dunia itu disajikan rendang Sumatera Barat. Sebelumnya, ke-30 ikon kuliner tradisional itu sudah hadir dalam acara Patali (Market) Day di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, akhir Februari 2013 lalu.

Rencananya, jumlah ikon kuliner yang sudah ditetapkan oleh Kemenparekraf bekerja sama dengan *stakeholder* kuliner itu masih akan terus bertambah. Kemenparekraf merencanakan Tinutuan atau Bubur Manado, Sulawesi Utara, masuk sebagai ikon kuliner tradisional Indonesia.

Langkah yang diambil oleh Kemenparekraf ini mendapat sambutan positif dari *stakeholder* kuliner. Mereka berharap wisata kuliner nusantara lebih serius digarap karena termasuk wisata yang paling siap berkembang di Indonesia. Selain itu, wisata kuliner berpotensi menghidupkan ekonomi kerakyatan. ■ nir



Pink Beach

Mutiara Wisata di Lombok

Pesona wisata bertebaran di seluruh Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak sedikit pesiar mancanegara sangat mengenal dan menikmati Gili Terawangan (Lombok Utara), atau Pantai Kute (Lombok Tengah), dan obyek wisata baru Pantai Pink di Dusun Temeak, Desa Serewe (Lombok Utara), lebih kurang 82 kilometer arah tenggara Kota Mataram.

Pantai pasir putih yang menyatu dengan bukit-bukit hijau menciptakan kombinasi panorama alam yang sangat mempesona. Para pesiar yang baru mendarat di Bandara Internasional Praya, Lombok Tengah, jika ingin melanjutkan dengan perjalanan darat, dalam tempo lebih kurang 3 jam sudah bisa berada di lokasi wisata baru Lombok Utara, Pantai Pink atau Pantai Oranye.

Warga setempat menyebutnya Pantai Tangsi. Namun para turis asing menjulukinya Pink Beach alias Pantai Oranye. Mereka menyebutnya *pink* karena pasir putihnya bercampur serpihan terumbu karang merah. Jika tertimpa air laut yang dipancarkan sinar matahari pagi atau sore, maka butiran-butiran pasir halusnya berubah jadi oranye dan merah muda (*pink*). Maka para pesiar asing tidak salah jika menjulukinya Pink Beach. Pantai semacam ini di dunia hanya ada tujuh, termasuk dua di Lombok Utara dan Pulau Moyo, Sumbawa, NTB.

Sedangkan nama Tangsi dipakai warga setempat, karena satu kilometer ke arah tenggara yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sewaktu Perang Dunia II, jadi markas tentara Jepang. Senjata meriam kuno dipasang di Pantai Tanjung Ringgit, sekitar satu kilometer dari Pantai Pink. Atau lorong goa yang menembus perut bukit sepanjang sekitar 50 meter yang berhadapan dengan Pantai Pink, merupakan bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi markas tentara Dai Nippon. Artinya, berwisata ke Pantai Pink, selain menikmati panorama pantainya yang indah, sekaligus berkunjung ke obyek wisata sejarah.

Pantai Pink bertetangga dengan beberapa pantai, seperti Pantai Temeak dan Pantai Colong yang juga berpasir putih. Pantai-pantai ini dipisahkan oleh bukit-bukit karang, sehingga untuk menjangkaunya cukup dengan jalan kaki dan mendaki bukit. Sayangnya, beberapa kawasan pesisir sudah "dikuasai" oleh para pemilik modal. Sesaat mendaki di atas bukit karang, para pesiar leluasa memandangi panorama laut lepas, gemerincing gelombang, semilir angin serta gumpalan awan yang berkejaran. Suasana sepi Pantai Oranye terasa sangat syahdu dan romantis.

Harus Mandi

Anda belum sempurna datang ke

Pantai Pink sebelum bergulat dengan gelombang pantainya. Pantainya yang datar cocok untuk berkemah. Airnya yang jernih mengundang hasrat untuk mandi.

Tapak Pantai Pink cukup lebar, panjangnya dari ujung timur ke barat sekitar 500 meter. Sambil berjemur di bawah pancaran mentari pagi, Anda bisa memandang lepas ke arah utara - yaitu Gunung Rinjani yang menjulang 3.000 meter di atas permukaan laut.

Sayangnya transportasi umum ke Pantai Pink belum tersedia, karena itu sebaiknya menyewa mobil atau sepeda motor dari Mataram. Perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Mataram ke Pantai Pink ditempuh dalam 2,5 jam. Juga di sekitar pantai tersebut belum ada penginapan, harus menempuh jarak 4 kilometer untuk menemukan bungalow yang dikelola pemodal. Tarifnya cukup mahal, USD 185 dollar AS (Rp 1,7 juta) per malam.

Yang tidak nyaman, jalan sepanjang 14 kilometer menuju Pantai Pink masih berlobang-lobang, karena aspalnya banyak yang terkelupas, tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Jalannya berkelok-kelok, mendaki dan menurun, melintasi kawasan hutan lindung Sekaroh. Jalan ini berdebu di musim panas dan berkubang di musim hujan.

Namun semua ketidaknyamanan ini tidak mengurangi gairah para pesiar untuk mendatangi Pantai Pink yang elok dan eksotik. ■ **mbi/r-sam**

Dari Pantai Pink Menuju Gunung Rinjani

Di ketinggian 3.726 meter di puncak Rinjani bersemayam Ratu Jin Dewi Anjani. Demikian kepercayaan yang ratusan tahun hidup di kalangan penduduk setempat. Ratu Anjani adalah putri Raja Datu Tuan dari permaisurinya Dewi Mas, yang memerintah sebuah kerajaan kecil di Lombok. Terlepas dari kepercayaan masyarakat setempat, Gunung Rinjani merupakan salah satu tujuan wisata andalan Kabupaten Lombok Utara. Gunung tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyimpan sejuta pesona dan memiliki potensi geowisata yang menarik.

Daya pesonanya antara lain, panorama kaldera, danau, puncak, kawah, air terjun, mata air panas, goa, lubang letusan dan aliran lava baru. Pesona Rinjani dipercaya sebagai singgasana istana Ratu Dewi Anjani. Selain berbagai keunikan, Gunung Rinjani kaya dengan berbagai flora dan fauna. Di sebelah selatan dan barat pada ketinggian 1.000-2.000 meter, banyak ditumbuhi *Dysoxylum sp. pterospermum*, dan *Ficus superba*.

Pada ketinggian 2.000-3.000 meter banyak tumbuh cemara gunung (*Casuarina junghuhniana*). Namun pada ketinggian di atas 3.000 meter miskin tumbuhan, hanya ditumbuhi rumput dan bunga edelweiss (*Anaphalis javanica*) dan di sebelah timur gunung banyak ditumbuhi pohon akasia.

Selain itu, tercatat 109 jenis burung hidup di Gunung Rinjani. Beberapa di antaranya jenis burung yang ada di Australia, monyet perak yang berasal dari Bali, rusa dan landak. Di Pelawangan Sembalun, Lombok Timur terdapat monyet ekor panjang yang suka mengganggu kemah para pen-

daki. Mereka sangat pandai membuka tenda untuk mengambil makanan, sangat garang dan berani.

Di balik sejuta pesona yang dimilikinya, Gunung Rinjani sebenarnya satu dari enam gunung api di Indonesia yang cukup berbahaya untuk didaki, maka tidak berlebihan kalau dijuluki obyek wisata "maut". Rinjani sudah menelan banyak nyawa, karena cuaca sangat buruk bisa datang tiba-tiba.

Ditutup Tiga Bulan

Pada 2013 jalur pendakian ke Gu-



Perjalanan spiritual ke Puncak Rinjani, Lombok Timur

nung Rinjani ditutup sekitar tiga bulan, mulai 10 Januari hingga 31 Maret 2013. "Penutupan dilakukan karena musim hujan menyebabkan jalur pendakian licin dan pohon tumbang sehingga membahayakan keselamatan pendaki," kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Agus Sudiono di Mataram, Sabtu (5/1/2013).

Menurut Agus, selain untuk keselamatan pendaki, penutupan jalur pendakian juga dimaksudkan buat pemulihan ekosistem secara alami di taman nasional yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan nusantara itu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Internasional Lombok (BIL), curah hujan di TNGR dan sekitarnya

sudah meningkat dengan intensitas sedang hingga lebat.

Terkait dengan pemberlakuan larangan pendakian sementara, pihak TNGR melakukan pengawasan, baik di jalur pendakian Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara maupun Sembalun, Lombok Timur guna mencegah pada pendaki melakukan pendakian.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meminta masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi larangan mendaki Gunung Rinjani. Untuk mencegah masyarakat melakukan pendakian, Balai TNGR sudah menarik kembali semua tiket kunjungan dari para juru pungut di jalur pendakian resmi baik di Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara maupun Sembalun, Lombok Timur.

Jumlah wisatawan yang mendaki Gunung Rinjani selama 2012 tercatat 19.782 orang, meningkat dibandingkan 2011 sebanyak 15.020 orang. Jumlah pendaki di-

dominasi wisatawan mancanegara yang tercatat 10.956 orang, sedangkan wisatawan nusantara 8.826 orang. Para wisatawan tersebut mendaki Gunung Rinjani melalui empat jalur pendakian, yakni Sembalun sebanyak 8.984 orang, Senaru 5.540 orang, Kembang Kuning 4.520 orang dan jalur pendakian Timbanuh 738 orang.

Setiap bulan wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani rata-rata 1.600 orang lebih. Gunung Rinjani yang sarat tantangan dan bahaya itu menjadi salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Lombok Utara setelah Gili Trawangan di Kecamatan Pemenang. Meski "maut" tetap mengintai, ternyata Gunung Rinjani tetap memikat. ■ mbi/r-sam

■ HJ. INDAH SURYADHARMA ALI

Keharmonisan Komunikasi Keluarga Politisi

Ini adalah sebuah potret keluarga politisi (karir, profesional dan modern) yang sakinah. Suami-isteri sama-sama aktif sebagai politisi dalam tugas-tugas kemasyarakatan dan kenegaraan. Tetapi kesibukan tugas tidak menghalangi mereka tetap menikmati keharmonisan keluarga dengan kesepakatan selalu menjaga komunikasi. Keluarga ini punya moto: Membina Keluarga Membangun Bangsa.



Keluarga politisi sakinah itu adalah pasangan harmonis suami-isteri Drs. H. Suryadharmas Ali, MSi dan Dra. Hajjah

Wardatul Asriah.

Suami (Suryadharmas Ali) seorang politisi yang kini menjabat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Menteri Agama RI, yang tentu punya kesibukan yang amat padat. Sedangkan sang isteri (Wardatul Asriah) juga seorang politisi yang tengah aktif sebagai anggota DPR dari Fraksi PPP dan sibuk di Komisi VII yang membicarakan Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

Pasangan ini dikaruniai empat orang anak. Tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.



Hj. Indah Suryadharma Ali menyampaikan santunan dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu di Bitung, Bekasi, Minggu (5/9/2010)

Anak sulung bernama Kartika Yudisti, sangat cantik dan pintar lulusan Melbourne, Australia yang kini tengah mendalami pendidikan teknik kimia di London, Inggris. Anak kedua, tiga dan empat adalah: Sherlita Nabila, Abdurrahman Sagara Prakasa dan Nadia Jesica Nurul Wardani.

Menjaga terjalinnya komunikasi antar anggota keluarga (suami-isteri dan anak-anak) menjadi hal mutlak bagi keluarga Drs. H. Suryadharma Ali dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarganya.

Untuk menjaga komunikasi, keluarga ini punya kesepakatan yakni selalu sarapan pagi bersama. Mereka berkomitmen selalu menjaga kebiasaan sarapan bersama. Saat sarapan pagi itu mereka memanfaatkan ngobrol dengan santai. Sebab makan siang atau makan malam, kadang-kadang sudah sangat sulit waktunya. Namun, jika waktu memungkinkan mereka pun memanfaatkan makan siang atau malam untuk berkumpul dan ngobrol dengan santai, akrab dan berbagi.

Mereka berkomitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab suami atau isteri saja, tetapi secara bersama-sama dengan anak-anak.

Keluarga ini (suami-isteri) memilih jalur politik dalam perjalanan karir dan pengabdianya, terutama sejak reformasi bergulir (1998).

Memang, baik Suryadharma Ali (SDA) maupun Wardatul Asriah (akrab dipanggil Mbak Indah) telah memiliki proses pengkaderan politik tatkala mereka masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka sama-sama aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama).

Jadi, Mbak Indah yang berparas cantik dan teduh kelahiran Bekasi, 17 April 1965, itu bukanlah orang baru di dunia politik. Selain aktif sebagai Anggota PMII (1982-1985), kemudian Mbak Indah bergabung dengan PPP dan pernah menjabat Ketua Bidang Sosial WPP (Wanita

Persatuan Pembangunan) tahun 1989. Kemudian aktif sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PPP tahun 2003; Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi tahun 2004 dan Sekretaris Umum DPC PPP Kabupaten Bekasi (2006-2007).

Perjalanan karier politik di lembaga legislatif diawali sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, pada Pemilu 2009, Mbak Indah ikut caleg PPP untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jabar VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Karawang. Sementara, Suryadharma Ali menjadi caleg daerah pemilihan Jawa Barat III (Bogor-Cianjur).

Pada Dapil Jabar VII, Mbak Indah *head to head* dengan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Mbak Indah berparas cantik Indo Betawi ini menjadi caleg DPR RI dengan nomor urut satu. Dia pun terpilih dengan perolehan 53,782 suara (29.15% dari Bilangan Pembagi Pemilihan 184,498). Mbak Indah duduk di Komisi VII yang membicarakan Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup dan BKSAP 2009-2014.

Dra. Hajjah Wardatul yang akrab disebut Indah Suryadharma itu memantapkan pilihan menjadi wanita karir bidang politik, karena, menurutnya, ajaran Islam membuka peluang lebar-lebar bagi kaum perempuan untuk meniti karir.

■ mti/bhs



Hj. Indah Suryadharma bersama Menag Suryadharma Ali saat meninjau pameran dan Bazar dalam rangka STQ XXI di Banjarmasin, Sabtu (4/6/2011)

Hampa di Usia Senja

Kembali seperti anak kecil, itulah ungkapan yang disematkan bagi manula penderita Alzheimer. Limpahan kasih sayang dan perhatian dari keluarga sangat diperlukan oleh mereka.

Hingga sekarang, istilah Alzheimer masih terdengar asing dan aneh. Padahal, tanpa disadari, Alzheimer sudah hinggap di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengenal Alzheimer dengan istilah yang berbeda, yaitu kepikunan. Namun seringkali kepikunan pada orang lanjut usia dianggap wajar, padahal penyakit ini seharusnya segera ditangani oleh ahlinya. Alzheimer banyak dialami oleh orang lanjut usia (manula), terutama usia 65 tahun ke atas.

Penyakit ini tidak mengenal status. Muhammad Tohir Achmad bin H Achmad Raksawiguna (86 th), ayah dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang meninggal Februari 2013 lalu, ternyata mengidap Alzheimer selama kurang lebih dua tahun. Menurut keluarga, selama sakit, ayah Hatta Rajasa hanya dirawat di rumah, komunikasi susah dan kesehatannya pun melemah.

Menurut ilmu kedokteran, penyakit Alzheimer termasuk penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi saraf otak. Daya ingat penderita sangat merosot hingga tak mampu mengurus dirinya sendiri. Untuk menjalankan aktivitas harian seperti makan, mandi, dan buang air perlu bantuan orang lain. Hal itu juga dialami Suyatmi (65 tahun), nenek tiga cucu yang kini harus dititipkan di rumah jompo oleh keluarganya.

"Bukannya tidak mau mengurus ibu, tapi saya sangat kesulitan karena penyakit ibu bertambah parah dua tahun terakhir ini," kata Anisa, anak Suyatmi. "Sebenarnya, ibu sudah lama mengalami pikun. Awalnya hanya lupa nama cucu-cucunya, lupa menaruh barang, lupa makan atau bercerita berulang-ulang. Ibu juga kadang tiba-tiba marah bahkan nangis sendiri. Emosinya naik turun," kenang Anisa.

Gejala yang dialami Suyatmi adalah hal yang sering dialami para manula. Usia di atas 65 tahun merupakan faktor risiko terjadinya demensia/kepikunan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan,

demensia dapat dialami oleh orang muda yang biasanya disebabkan oleh faktor keturunan.

Para ahli juga menemukan bahwa beberapa faktor risiko untuk penyakit jantung dan stroke seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan rendahnya asam folat juga dapat meningkatkan risiko Alzheimer.

Berdasarkan waktu terjadinya, Alzheimer dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok *early onset*, istilah ini digunakan bagi penderita yang usianya kurang dari 58 tahun. Dan *late onset*, bila terjadi pada usia lebih dari 58 tahun.

Dokter spesialis kesehatan jiwa yang mendalami geriatri dari Departemen Psikiatri, FKUI, Martina Wiwie S Nasrun, mengatakan, proses dari tahap awal hingga akhir berlangsung 10-15 tahun. Pada tahap sedang, pasien kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari dan membutuhkan bantuan dalam makan, mandi, dan buang air. Pada tahap lanjut, penderita mengalami ketergantungan total.

Martina menganjurkan pada keluarga yang memiliki orang tua dengan perubahan perilaku dan emosi yang berubah seiring dengan proses penuaan, untuk berkonsultasi dengan dokter. Pengetahuan yang benar tentang gejala Alzheimer dapat membantu keluarga dalam beradaptasi dan sabar dalam menghadapi penderita.

Penderita Alzheimer tak hanya mengalami gangguan berpikir dan mengingat saja. Perubahan suasana hati, perilaku, kemampuan berkomunikasi, kemampuan motorik dan sensorik juga dialami. Tidak memperhatikan kebersihan dan perawatan tubuh, menarik diri, delusi, paranoia, dan bersifat kekanak-kanakan. Tak jarang penderita dianggap mengalami gangguan jiwa sehingga mereka dikucilkan.

Limpahan kasih sayang dan perhatian dari keluarga sangat diperlukan oleh penderita Alzheimer. Butuh kesabaran



ekstra, bahkan lebih bila dibandingkan dengan mengurus bayi. Selain rentan terkena penyakit, kondisi psikis atau kejiwaan mereka pun rapuh.

Pembentukan plak amiloid di otak diduga sebagai penyebab terjadinya kerusakan sel otak pada penderita Alzheimer. Sejauh ini, belum ada terapi untuk menyembuhkan Alzheimer. Obat-obatan yang diberikan hanya berguna untuk memperlambat perburukan demensia. Obat golongan *asetilkolin esterase inhibitor* (donepezil, rivastigmin, dan galantamin) dapat mempertahankan jumlah asetilkolin untuk membawa pesan antarsel saraf.

Obat lain, golongan *N-methyl-D-aspartate* (memantine), memperbaiki sinyal listrik pada dinding sel saraf untuk menyampaikan pesan memori dan penguatan memori. Obat golongan antidepresi dan antipsikotik diperlukan untuk meredakan gejala psikologis dan demensia.

Para ahli terus meneliti obat yang mampu menghentikan pembentukan plak amiloid di otak. Salah satu yang diteliti adalah vaksin untuk mencegah terbentuknya plak sehingga proses penyakit terhenti dan terjadi perbaikan.

Di sisi lain, penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan fisik, mental, dan aktivitas sosial dapat melindungi orang dari penyakit Alzheimer. Menjaga otak terus aktif diketahui mengurangi risiko Alzheimer. Misalnya dengan mendengarkan radio, membaca koran, mengisi teka-teki silang, berolahraga, dan menjalankan diet sehat. ■ **dgr**

Bila Otak Meradang



Bila badan Anda demam disertai kaku kuduk atau kaku pada tengkuk leher, patut dicurigai Anda terkena radang selaput otak (meningitis). Bila tidak ditangani segera, bisa menyebabkan kecacatan bahkan kematian.

Artis cantik Ashanty yang juga istri penyanyi Anang Hermansyah didiagnosa menderita radang selaput otak (meningitis). Dalam waktu singkat, penyakit ini menjadi populer dibicarakan oleh banyak kalangan. Ada yang takut, tak sedikit pula yang khawatir akan bahaya yang dapat timbul akibat keganasan penyakit ini.

Namun demikian, bukan mustahil penderita meningitis mengalami kesembuhan. Ketua Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia (Perdossi) Prof. Dr. dr. Hasan Machfoed, SpS (K), MS, menjelaskan, ada beberapa kondisi yang membuat meningitis bisa disembuhkan. Diagnosanya harus tepat, pemberian terapi segera, dan jenis obat yang diberikan juga tepat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan, meningitis adalah peradangan pada selaput yang mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Masa inkubasi bervariasi dari 2-10 hari, biasanya 3-4 hari.

Penyebab meningitis bisa virus, bakteri, atau jamur. Namun yang paling sering menyebabkan penyakit tersebut di Indonesia adalah virus dan bakteri. Meningitis viral dan TBC biasanya diderita oleh bayi dan anak-anak, sedangkan meningitis bakterialis seringkali menyerang orang dewasa yang memiliki sistem daya tahan tubuh yang lemah.

"Meningitis bisa disebabkan oleh banyak hal misalnya kuman meningo-kokus, Hib (*Haemophilus influenzae* type B) dan TBC, karena kita juga dapati orang



Prof. Dr. dr. Hasan Machfoed, SpS (K), MS

dengan TBC terkena meningitis. Sekarang juga sering ditemukan orang dengan HIV terkena meningitis," ujar Prof Dr dr Samsuridjal, SpPD-KAI.

Prof Samsuridjal menambahkan, jika disebabkan oleh kuman meningo-kokus, biasanya kuman dari udara masuk ke dalam tenggorokan, lalu ke darah dan bisa mencapai otak sehingga mengakibatkan radang selaput otak. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian dalam waktu 24-48 jam sejak gejala pertama muncul.

Pada saat seseorang badannya demam disertai kaku kuduk atau kaku pada tengkuk leher, patut dicurigai terkena meningitis. Selain itu, ada beberapa gejala meningitis lainnya yakni sakit kepala, nyeri otot, mengantuk, kurang responsif, dan tidak menyukai cahaya terang.

Meningitis juga dapat menyerang bayi, balita dan anak-anak. Bila terjadi pada bayi atau balita, yang perlu diperhatikan adalah balita menjadi rewel, cenderung lemas, mendadak tidak aktif. Secara umum, gejala meningitis hampir sama pada orang dewasa maupun anak-anak

yaitu demam dan kaku kuduk.

Dokter mendiagnosa penyakit ini dengan gejala klinis pada pasien. Untuk semakin memastikan, dokter akan melakukan pemeriksaan cairan otak. Cairan otak dibiakkan sehingga kumannya diketahui lalu dicarikan obat yang tepat. Digunakan juga peta kuman sebab rumah sakit, negara, dan wilayah berbeda-beda peta kumannya. Ketepatan pengobatan menentukan lama pengobatan. Pengobatan yang efektif biasanya dua minggu pertama.

Penyakit ini bila tidak diobati dengan baik bisa mendatangkan kematian. Kalau diobati ada kemungkinan sembuh tapi bisa menyebabkan kecacatan," ujar Prof Samsuridjal.

Jika dalam dua minggu lebih pengobatan tidak efektif, maka pasien meningitis bisa memasuki masa gejala sisa (*sequelae*). Gejala sisa itu seperti lumpuh, tak bisa mendengar, kadang tak bisa melihat, gangguan perkembangan, bisa *retarded* ataupun cerebral palsy. Inilah yang harus diwaspadai.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah meningitis akibat kuman meningo-kokus adalah melalui vaksinasi. Prof Samsuridjal selaku Wakil Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), menganjurkan vaksinasi pada semua golongan umur dan orang dengan risiko tinggi yaitu bayi, balita, remaja, wisatawan yang ingin ke daerah endemik, personil militer dan jamaah haji atau umroh.

Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pemberian imunisasi HIB dilakukan untuk anak di bawah usia 1 tahun. Ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali selama 1 tahun, dan diulang kembali di usia antara 12-15 bulan. Waktu pemberian yaitu mulai usia 2 bulan dengan selang waktu 1-2 bulan. Selang waktu pemberian yang terlalu jauh membuat kenaikan zat anti dalam tubuh tidak akan optimal.

Sementara pemberian vaksin HIB, ada yang 2 kali atau 3 kali dalam setahun karena tergantung dari jenis vaksinnya. Vaksin HIB yang PRP-T (Poly Ribosil Phosphat Tetanus) diberikan sebanyak 3 kali dalam setahun. Sedangkan vaksin HIB yang PRP-OMP (Poly Ribosil Phosphat Outer Membrane Protein) sebanyak 2 kali sebelum umur 6 bulan. Bila diberikan di atas usia 1 tahun, cukup 1 kali saja.

Imunisasi pun hanya dilakukan sampai anak usia 4 tahun, sebab setelah itu, risiko anak terkena radang selaput otak akibat kuman ini, semakin rendah. Setelah diimunisasi HIB, biasanya 97-99 persen efektif dapat mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan kuman tersebut. Selain imunisasi, stamina juga harus ditingkatkan dengan makan dan minum yang cukup serta olahraga teratur. ■ **dgr**

Kiat Jitu Mengajar Anak

Buku-buku tentang cara mengajar anak sudah banyak beredar. Meski demikian, Tessie Setiabudi (psikolog) dan Joshua Maruta (*trainer*) tetap merasa perlu untuk membuat buku yang bisa membantu orang tua dalam mengajar anak. Lahirlah buku berjudul 'Cerdas Mengajar: Dampingi Anak Anda Belajar dengan 13 Kiat Jitu', yang berisi kiat-kiat praktis bagi para orangtua dan guru dalam mendampingi anak belajar. Bagaimana membuat anak mencintai belajar, tidak kewalahan dalam mengikuti pelajaran dan semangat pergi ke sekolah.

Sebagai pembeda dengan buku-buku sejenis, buku terbitan Grasindo ini disajikan dengan huruf yang besar, gaya bahasa yang ringan dan ringkas, disertai poin-poin yang mudah dipahami dan diingat, dipadu dengan gambar dan ilustrasi. Kedua penulis buku ini bahkan berkomitmen untuk memberikan uang royalti buku untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah mulai dari SD sampai SMA di sekolah negeri maupun swasta.

Buku setebal 160 halaman ini dibagi dalam 4 bab yang membahas bagaimana cara membangun pondasi belajar, memahami cara kerja otak, mengenali cara belajar dan belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dalam tiap bab terdapat



kiat-kiat praktis yang telah terbukti efektif. Secara keseluruhan ada 13 kiat jitu yang membantu orang tua dan guru mendampingi anak belajar.

Pada bab satu, orangtua akan dibimbing bagaimana membangun pondasi belajar dan bagaimana membuat proses be-

ajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pada bab dua, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai cara kerja otak agar kita dapat memaksimalkan kemampuan otak dan mengajar sesuai cara kerja otak. Ada 10 jenis inteligensi yang dimiliki manusia dan orang tua diajar cara mengembangkan inteligensi sesuai jenisnya.

Selanjutnya, bab tiga berisi tentang bagaimana mengenali cara belajar anak yang dibagi dalam 3 gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Teknik membaca secara cepat dan menghafal secara mudah juga penting bagi anak dalam belajar. Dengan teknik *mind mapping*, yang mengombinasikan otak kanan dan kiri, proses mengingat menjadi sangat mudah.

Bab terakhir membahas tentang menciptakan kondisi sekitar yang kondusif untuk kegiatan belajar anak. Situasi rumah yang gaduh dan ramai adalah hal yang harus kita hindari. Persiapan menghadapi ulangan juga dibahas dalam bab ini sebab tidak bisa dipungkiri, bila anak sangat kuatir dalam menghadapi ulangan, bukan tidak mungkin anak malah melupakan apa yang telah dipelajarinya, bahkan jatuh sakit. Informasi lebih lengkap tentang buku dan penulis bisa dilihat di cerdasmengajar.com. ■ do

Strategi Memperjuangkan Ide

Jika Anda pernah memimpin sebuah kelompok entah itu di perusahaan, lembaga sosial, di mana saja, yang membutuhkan ide-ide baru, Anda pasti mengalami betapa seringnya ide-ide bagus kandas di tengah jalan.

John P. Kotter dan Lorne A. Whitehead juga menyadari hal ini dan mereka ingin membantu kita agar bisa membawa ide-ide baru menembus berbagai penolakan sehingga sampai pada pihak yang berkepentingan. Lewat buku berjudul *Buy-In* ini, Kotter and Whitehead menunjukkan bahwa penolakan terhadap ide (gagasan) datang dari sekelompok kecil orang. Anda tidak perlu mempersuasi kelompok kecil itu tetapi Anda berusaha menjawab semua keberatan-keberatan mereka yang sekaligus bisa mengambil hati kelompok lain yang masih netral. Anda tetap memperlakukan mereka yang tidak jujur, tidak menggunakan akal sehat, dan licik dengan rasa hormat yang besar. Sekali Anda

bisa melakukannya, akan ada orang-orang yang mendukung Anda atau setidaknya ide Anda didengarkan.

Agar bisa memenangkan ide Anda, Anda harus mengenali tanda serangan utama. Kotter dan Whitehead membahas empat strategi serangan yang umum terjadi dan dua puluh empat serangan dasar beserta respon yang terjadi dari tiap serangan. Jika Anda bisa mengenali metode serangan yang digunakan oleh lawan, dan apa alasannya, Anda bisa menaklukkan penolakan-penolakan dan mempertahankan ide Anda. Selama ide Anda tetap hidup, ide itu masih berpeluang untuk didengarkan.

Gagasan dan saran dalam buku ini didasarkan pada pengamatan menyeluruh Lorne Whitehead dalam posisinya sebagai seorang pengusaha, seorang eksekutif, seorang administrator, dan seorang dosen fisika di Universitas British Columbia selama bertahun-tahun dan serangkaian penelitian yang dilakukan John Kotter di Harvard Business School dan karyanya yang



membahas tentang kepemimpinan dan perubahan, yang diterbitkan dalam empat buku: *Leading Change*, *The Heart of Change*, *Our Iceberg is Melting*, dan *A Sense of Urgency*.

Perlu dicatat, sebagaimana lazimnya buku terjemahan, memahami isi buku ini perlu usaha ekstra karena cenderung diterjemahkan langsung/mentah-mentah dari teks asli. ■ do



Al-Zaytun



BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI



Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



PESAN SEKARANG:

AL-ZAYTUN
(0234) 742815

BERITA INDONESIA
(021) 32195353

E-MAIL:
sales@tokohindonesia.com



SDA: EPISTEMOLOGI KAJIAN ISLAM

BERINDO

MAJALAH BERITA INDONESIA®

EDISI 87 TAHUN VII ★ MARET 2013

Rp.16.000,-

Semestinya,
Tidak Ada
Kelaparan
di Indonesia

JATI EMAS
DEMI GENERASI



SPG: KOPERASI DESA KOTA, KAYA DAN GAGAH